



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2019**



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023, diperlukan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut KUA PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
8. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun .

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
- (2) RKPD disusun berdasarkan hasil Musrenbang.
- (3) RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
 BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
 TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
 KEUANGAN DAERAH
 BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
 DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

- (2) Uraian dari sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal 5

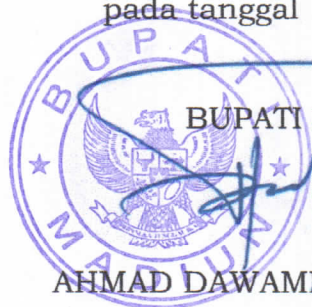
- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan RKPD Tahun 2020 dan menjabarkannya ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 Juni 2019



BUPATI MADIUN,

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

DAFTAR ISI

	Hal	
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
1.1.	Latar Belakang	I - 1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
1.3.	Hubungan Antar Dokumen	I - 5
1.4.	Maksud dan Tujuan	I - 6
1.5.	Sistematika Dokumen RKPD	I - 6
BAB II.	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II - 1
2.1.	Kondisi Umum Daerah	II - 1
2.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 14
2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum	II - 29
2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II - 57
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II - 62
2.3.	Permasalahan Pembangunan	II - 83
2.3.1.	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II - 83
2.3.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II - 85
BAB III.	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2017 dan 2018	III - 1
3.1.2.	Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2019 dan 2010	III - 3
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 4
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III - 6
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III - 9
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III - 12
BAB IV.	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020	IV - 5
4.2.1.	Prioritas Pembangunan Nasional	IV - 5
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur	IV - 5
4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Madiun	IV - 6
BAB V.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V - 1
BAB VI.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI - 1

6.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama	VI - 1
6.2.	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VI - 2

BAB VII.	PENUTUP	VII - 1
-----------------	----------------	----------------

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I 5
	-
Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Madiun	II 1
	-
Gambar 2.2 Grafik Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 2019	II 13
	-

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan	II - 2
Tabel 2.2 Jenis dan Luas Kemiringan Lahan	II - 3
Tabel 2.3 Jenis dan Luas Topografi Kabupaten Madiun	II - 4
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Menurut Kelompok Umur Tahun 2018	II - 13
Tabel 2.5 Penduduk Kabupaten Madiun Menurut jenis Kelamin Tahun 2018	II - 14
Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2014-2018 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah) Kabupaten Madiun	II - 15
Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2014-2018 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Madiun	II - 16
Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 17
Tabel 2.9 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2017-2018 Kabupaten Madiun	II - 17
Tabel 2.10 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 19
Tabel 2.11 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 20
Tabel 2.12 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 20
Tabel 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 21
Tabel 2.14 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 23
Tabel 2.15 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 24
Tabel 2.16 Usia Harapan Hidup Kabupaten Madiun Tahun 2014-2018	II - 25
Tabel 2.17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional	II - 25
Tabel 2.18 Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 26
Tabel 2.19 Persentase KK Miskin dan Jiwa Miskin Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 27

Tabel 2.20	Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 29
Tabel 2.21	Perkembangan Olahraga Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 29
Tabel 2.22	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 30
Tabel 2.23	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 31
Tabel 2.24	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 32
Tabel 2.25	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 34
Tabel 2.26	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 34
Tabel 2.27	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 35
Tabel 2.28	Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 36
Tabel 2.29	Indikator Urusan Perumahan Tahun 2014 – 2018 Kabupaten Madiun	II - 36
Tabel 2.30	Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 38
Tabel 2.31	Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 39
Tabel 2.32	Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012 – 2017 Kabupaten Madiun	II - 39
Tabel 2.33	Indikator Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 40
Tabel 2.34	Indikator Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 41
Tabel 2.35	Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 42
Tabel 2.36	Indikator Urusan Sosial Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 43
Tabel 2.37	Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 43
Tabel 2.38	Perkembangan Koperasi Tahun 2014 - 2018 Kabupaten Madiun	II - 45
Tabel 2.39	Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 46
Tabel 2.40	Perkembangan Seni Budaya Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 46

Tabel 2.41	Perkembangan Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 47
Tabel 2.42	Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 48
Tabel 2.43	Indikator Urusan Otonomi Daerah dan Kepemerintahan Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 49
Tabel 2.44	Perkembangan Ketersediaan Pangan Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 49
Tabel 2.45	Indikator Urusan Statistik Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 50
Tabel 2.46	Pengelolaan Kearsipan Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 50
Tabel 2.47	Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 51
Tabel 2.48	Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 51
Tabel 2.49	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 52
Tabel 2.50	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2014-2017 Kabupaten Madiun	II - 52
Tabel 2.51	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 53
Tabel 2.52	Indikator Urusan Pertanian Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 53
Tabel 2.53	Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 55
Tabel 2.54	Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2018	II - 55
Tabel 2.55	Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 55
Tabel 2.56	Indikator Urusan Industri Tahun 2014-2018	II - 56
Tabel 2.57	Indikator Urusan Ketrasmigrasian Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II - 56
Tabel 2.58	Indikator Daya Saing Daerah Tahun 2014-2018	II - 57
Tabel 2.58	Angka Konsumsi RT perkapita Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Madiun	II - 57
Tabel 2.59	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014 – 2018 Kabupaten Madiun	II - 59

Tabel 2.60	Persentase Konsumsi RT non-Pangan Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II -	60
Tabel 2.63	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II -	61
Tabel 2.64	Rasio Ketergantungan Tahun 2014 – 2018	II -	62
Tabel 2.65	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun	II -	63
Tabel 2.66	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	II -	85
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun 2017 s.d 2018	III	1
		-	
Tabel 3.2	Proyeksi Makro Makro Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2019 dan 2020	III	3
		-	
Tabel 3.3	Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020	III	8
		-	
Tabel 3.4	Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016- 2020	III	11
		-	
Tabel 3.5	Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020	III	16
		-	
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023	IV	2
		-	
Tabel 4.2	Hubungan RKP dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2020	IV	6
		-	
Tabel 4.3	Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2020	IV	7
		-	
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Madiun Tahun 2020	VI	1
		-	
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Madiun	VI	2
		-	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2020 merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi tentang pelaksanaan RKPD setiap tahunnya. Baik RPJPD, RPJMD dan RKPD ketiga dokumen tersebut disusun saling bersinergis dengan tujuan untuk mengarahkan pembangunan daerah supaya lebih terfokus pada pencapaian target yang sudah ditentukan secara tertulis.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar

pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas.

Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. RKPD disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dalam rangka penyusunan RKPD, BAPPEDA harus melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Penyusunan RKPD dilakukan berbasis pada *e-planning*. RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

1.2.Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023.

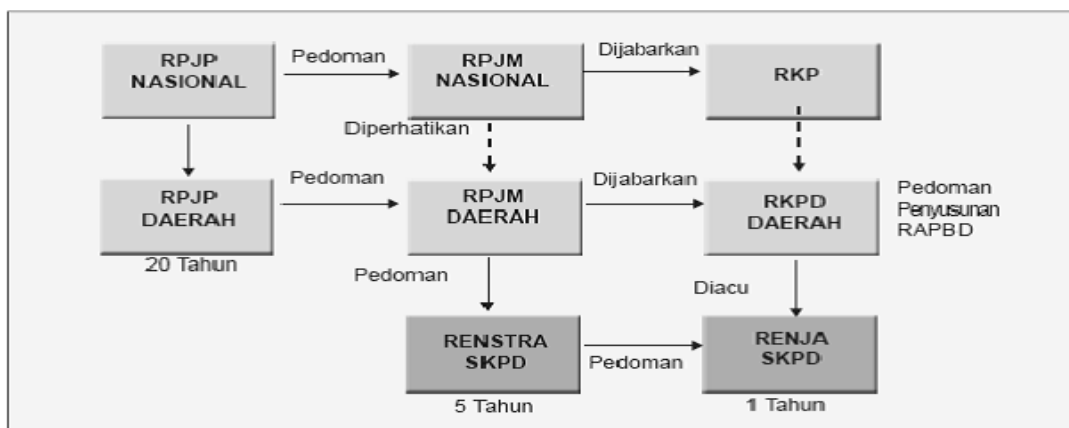
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023.

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya disinergikan dengan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Dokumen RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD ini.

Dokumen RKPD ini merupakan acuan bagi seluruh perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD. Penyusunan RKPD harus disusun saling bersinergis dan saling terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat.

Gambar 1.1
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4.MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Madiun yaitu:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah kabupaten Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Madiun dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.
2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Menyinkronkan agenda dan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dengan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Madiun.
2. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Madiun;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Memberikan gambaran mengenai proyeksi rencana kerangka daerah daerah sebagai referensi dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pelaku pembangunan daerah ;
5. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah.

1.5.Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2020, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen

	1.4.	Maksud dan Tujuan
	1.5.	Sistematika Dokumen RKPD
BAB II.		EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
	2.1.	Kondisi Umum Daerah
	2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
	2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah
BAB III.		KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
	3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
	3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020
BAB V		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI		KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII		PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

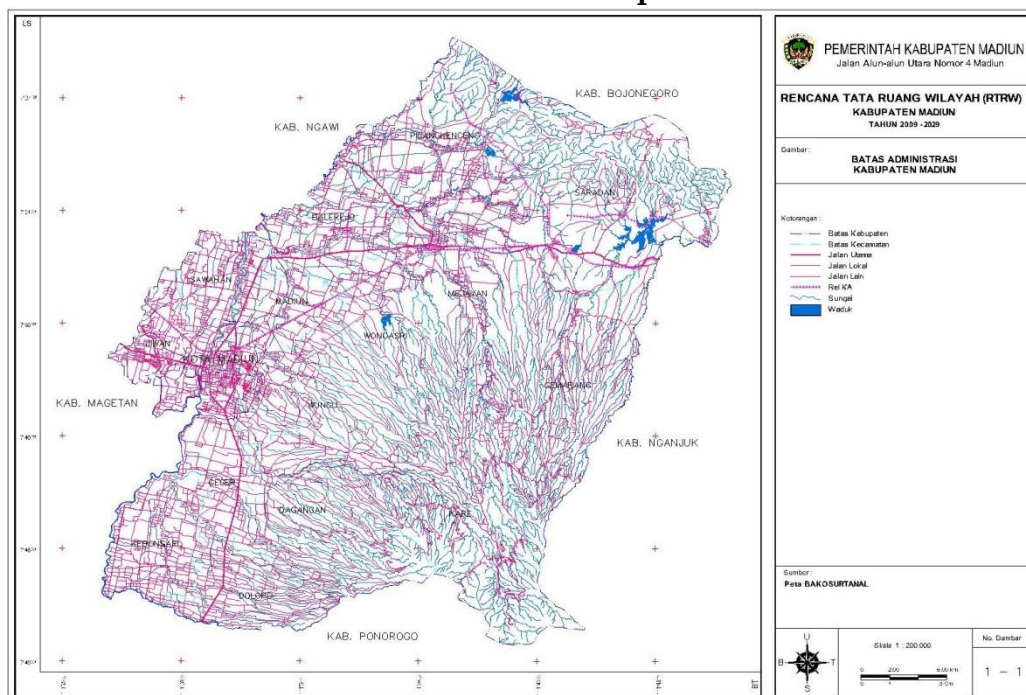
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Madiun adalah sebesar 1.010,86 Km², atau 101.086 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo
- Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk

Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Madiun



Sumber : BAPPEDA Kab. Madiun 2019 (RTRW Kab Madiun Tahun 2009-2029)

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Madiun terletak pada posisi 7° 12' - 7° 48' 30" Lintang Selatan dan 111° 25' 45" - 111° 51" Bujur Timur. Wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Madiun terbagi dalam

15 Kecamatan, 206 Desa/Kelurahan. Selengkapnya, jumlah dan luas wilayah administrasi Kabupaten Madiun dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Kebonsari	14	-	4.745
2	Geger	19	-	3.661
3	Dolopo	10	2	4.885
4	Dagangan	17	-	7.236
5	Wungu	12	2	4.554
6	Kare	8	-	19.085
7	Gemarang	7	-	10.197
8	Saradan	15	-	15.292
9	Pilangkenceng	18	-	8.134
10	Mejayan	11	3	5.522
11	Wonoasri	10	-	3.393
12	Balerejo	18	-	5.198
13	Madiun	12	1	3.593
14	Sawahan	13	-	2.215
15	Jiwan	14	-	3.376
	Jumlah	198	8	101.086

Sumber : Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2017

Ditinjau dari penggunaan / pemanfaatan Lahan, luasan wilayah Kabupaten Madiun dibagi sebagai berikut :

- Pemukiman/Pekarangan : 15.322 Ha (15,16%)
- Sawah : 30.951 Ha (30,62%)
- Tegall : 7.091 Ha (7,02%)
- Perkebunan : 2.472 Ha (2,45%)
- Hutan Negara : 40.511 Ha (40,08%)
- Perairan (kolam/waduk) : 836 Ha (0,83%)
- Lain-lain (jalan, sungai, makam) : 3.902 Ha (3,83%)

Secara Administrasi Kabupaten Madiun terdiri dari 15 Kecamatan, 198 Desa dan 8 Kelurahan.

c. Topografi

Topografi di Kabupaten Madiun membujur dari utara ke selatan dengan posisi terendah terdapat di lembah-lembah Bengawan Madiun berdekatan dengan pusat Kota Madiun.

a) Kemiringan Lahan

Sebagaimana halnya topografi, maka kelerengan di Kabupaten Madiun juga bervariasi mulai dari kelerengan 0-8% sampai >45%. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun pada umumnya berada pada kelerengan 0-8% dan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare.

Sedangkan kecamatan-kecamatan yang berada pada ketinggian 1000 sampai >2000 meter di atas permukaan laut umumnya mempunyai kelerengan wilayah di > 25%. Kecamatan dimaksud antara lain adalah Kecamatan Dolopo, Dagangan, Kare, Wungu, Gemarang, Mejayan dan Wonoasri, dimana kecamatan-kecamatan tersebut umumnya berada di bagian selatan berdekatan dengan Pegunungan Wilis. Untuk lebih jelasnya kelerengan di Kabupaten Madiun dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2
Jenis dan Luas Kemiringan Lahan Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Kemiringan Lahan (Ha)					Jumlah
		0-8%	8-15%	15-25%	25-45%	>45%	
1	Kebonsari	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00
2	Geger	3.403,50	255,45	2,04	0,00	0,00	3.661,00
3	Dolopo	1.890,02	1.562,29	1.406,07	5,58	21,04	4.885,00
4	Dagangan	1.021,50	1.948,52	1.112,50	653,93	2.499,55	7.236,00
5	Wungu	1.075,50	1.589,73	1.853,53	15,76	19,48	4.554,00
6	Kare	0,00	231,47	5.425,47	2.742,31	10.685,75	19.085,00
7	Gemarang	1.538,62	1.797,02	3.685,77	1.652,06	1.523,53	10.197,00
8	Saradan	14.881,34	410,66	0,00	0,00	0,00	15.292,00
9	Pilangkencen	8.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,00
10	Mejayan	1.602,27	2.128,89	1.448,12	342,72	0,00	5.522,00
11	Wonoasri	1.406,66	513,63	1.147,45	325,27	0,00	3.393,00
12	Balerejo	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
13	Madiun	3.055,90	95,02	411,48	30,61	0,00	3.593,00
14	Sawahan	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
15	Jiwan	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00
	Jumlah	53.543,31	10.532,67	16.492,43	5.768,23	14.749,36	101.086,00

Sumber : Peta Bakosurtanal

b) Ketinggian Lahan

Kabupaten Madiun mulai dari wilayah utara ke selatan dengan posisi terendah terdapat di lembah-lembah Bengawan Madiun berdekatan dengan pusat Kota Madiun dengan ketinggian antara 21 - 100 mdpl. Kemudian berturut-turut ke arah selatan

yang semakin bertambah tinggi hingga ketinggian hampir 2.000 mdpl. Kecamatan-kecamatan dengan ketinggian antara 1000-2000 mdpl diantaranya adalah Kecamatan Kare, Gemarang dan Dagangan sedangkan kecamatan dengan ketinggian >2000 mdpl adalah Kecamatan Kare.

Dari tabel berikut terlihat bahwa untuk Kabupaten Madiun prosentase terbesar didominasi oleh ketinggian 100 - 500 meter di atas permukaan laut disusul kemudian oleh ketinggian 50 - 100 meter di atas permukaan laut yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun.

Tabel 2.3
Jenis dan Luas Topografi Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Topografi (Ha)						Jumlah
		0 - 50 mdpl	50-100 mdpl	100-500 mdpl	500-1000 mdpl	1000-2000 mdpl	>2000 mdpl	
1	Kebonsari	0,00	3.940,16	804,84	0,00	0,00	0,00	4.745,00
2	Geger	0,00	2.427,94	1.233,06	0,00	0,00	0,00	3.661,00
3	Dolopo	0,00	0,41	4.881,93	2,66	0,00	0,00	4.885,00
4	Dagangan	0,00	485,14	5.134,75	1.378,99	237,12	0,00	7.236,00
5	Wungu	0,00	1.809,78	2.744,22	0,00	0,00	0,00	4.554,00
6	Karee	0,00	0,00	8.885,10	6.125,13	4.002,56	72,21	19.085,00
7	Gemarang	0,00	0,00	0,18	8.790,93	1.391,16	14,73	10.197,00
8	Saradan	0,00	2.540,13	12.579,44	172,42	0,00	0,00	15.292,00
9	Pilangkenceng	0,00	6.034,58	2.099,42	0,00	0,00	0,00	8.134,00
10	Mejayan	0,00	2.290,89	3.231,11	0,00	0,00	0,00	5.522,00
11	Wonoasri	0,00	2.059,79	1.333,21	0,00	0,00	0,00	3.393,00
12	Balerejo	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
13	Madiun	1,89	3.263,73	327,38	0,00	0,00	0,00	3.593,00
14	Sawahan	12,07	2.202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
15	Jiwan	0,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00
	Jumlah	13,96	35.629,49	43.254,63	16.470,13	5.630,84	86,95	101.086,00

Sumber : Peta Bakosurtanal

d. Geologi

Jenis batuan yang membentuk Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Morfoset Jeding - Patukbanteng (Qj)

Penyebarannya meliputi Kecamatan Kebonsari dan Kare dengan luas mencapai 7.667,99 ha.

2. Morfonit Tanjungsari (Qjt)

Batuan ini tersebar di Kecamatan Kebonsari, Geger, Dolopo, Dagangan, Wungu dan Kare dengan luas mencapai 13.918,18 ha.

3. Morfonit Ngebel (Qjn)

Batuan ini tersusun oleh breksi gunung api, tuf dan konglomerat gunung api, lapisannya tidak jelas. Batuan ini tersebar di Kecamatan Dolopo dan Dagangan dengan luas mencapai 601,30 ha.

4. Alluvium (Qa)

Batuan ini merupakan bahan gunung api berupa lumpur, pasir, kerikil, kerakal dan sedikit bongkah. Batuan ini tersebar di seluruh Kecamatan kecuali Dolopo, Kare dan Gemarang dengan luas mencapai 26.343,77 ha.

5. Morfoset Argokalangan (Qav)

Satuan ini merupakan satuan termuda dari ketiga morfoset di Kompleks Gunung Wilis. Batuannya berupa endapan tefra dan lava andesit horeblenda. Batuan ini tersebar di Kecamatan Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Mejayan, Wonoasri dan Madiun dengan luas mencapai 34.486,70 ha.

6. Formasi Notopuro (Qpnv)

Satuan ini merupakan breksi gunung api, tuf dan aglomerat. Satuan ini dijumpai di Kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Mejayan dan Wonoasri dengan luas sebesar 13.871,88 ha.

7. Formasi Kabuh (Qpk)

Satuan ini merupakan batuan konglomerat, batu pasir setempat bersisipan lempung dan napal. Satuan ini dijumpai di Kecamatan Saradan dan Pilangkenceng dengan luas mencapai 2.055,88 ha.

8. Breksi Pandan (Qpv)

Satuan ini merupakan breksi andesit dan dijumpai di Kecamatan Saradan dengan luas 993,69 ha.

9. Formasi Pucangan (Qtp)

Satuan ini merupakan batuan breksi dan batu pasir tufan. Satuan ini dijumpai di Kecamatan Saradan dan Pilangkenceng dengan luas mencapai 1.016,96 ha.

10. Formasi Klitik (Tpk)

Satuan ini merupakan batu gamping klastika dan terumbu dengan sisipan napal dan batu lempung. Satuan ini dijumpai di Kecamatan Pilangkenceng dengan luas mencapai 72, 71 ha.

11. Formasi Sonde (Tpso)

Satuan ini merupakan perselingan batu lempung dan batu pasir tufan, bersisipan batu gamping. Satuan ini dijumpai di Kecamatan Pilangkenceng seluas 11,84 ha.

12. Formasi Kalibeng (Tmpk)

Satuan ini merupakan napal, setempat bersisipan tuf, batu pasir tufan dan Kalkarenit. Jenis batuan ini dijumpai di Kecamatan Pilangkenceng seluas 45,91 ha.

13. Morfonit Sedudo (Qas)

Satuan ini dikuasai lava andesit horeblendita dengan sisipan breksi gunung api. Jenis batuan ini dijumpai di Kecamatan Kare dan Gemarang seluas 8.341,16 ha.

e. Hidrologi

Di Kabupaten Madiun terdapat 41 (empat puluh satu) sungai, antara lain Kali Jerohan, Kali Kembang, Kali Bruwok, Kali Notopuro, Kali Catur, Kali Asin, Kali Sono, Kali Sareng dan kali-kali lainnya yang memuat debit aliran dan manfaat irigasi dari masing-masing sungai tersebut.

Pola aliran sungai-sungai yang ada di Kabupaten Madiun tersebut pada umumnya memiliki pola radial, dengan sebagian besar merupakan sungai musiman yaitu sungai yang meresapkan air hujan ke dalam tanah. Sedangkan sungai pola radial merupakan ciri khas sungai yang mengalir di daerah gunung berapi pada batuan alluvial, hal ini sesuai dengan kualifikasi produk sebaran batuan, bahwa jenis batuan adalah alluvial bekas aktivitas gunung berapi.

f. Klimatologi

Keadaan iklim di Kabupaten Madiun ditandai dengan keadaan curah hujan dan intensitas hujan, sedangkan kondisi iklim sendiri

ditandai dengan keadaan dimana suatu wilayah mempunyai keadaan bulan basah dan bulan kering. Berdasarkan Schmidt dan Ferguson, wilayah ini termasuk iklim dengan Tipe C yaitu iklim sedang yang merupakan daerah tidak kering dan tidak basah. Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim pegunungan dengan temperatur berkisar antara 20⁰ - 35⁰ C.

Intensitas hujan merupakan nilai perbandingan antara curah hujan dengan hari hujan baik dalam bulanan maupun tahunan. Berdasarkan jumlah hari hujan di masing-masing kecamatan, rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Maret dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga Oktober.

g. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029, permasalahan penggunaan lahan di Kab. Madiun terdiri dari:

1. Hutan Lindung

Kabupaten Madiun memiliki kawasan hutan lindung yang terdapat di bagian selatan dan sebagian di utara. Permasalahan yang muncul saat ini adalah adanya perubahan alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi lahan budidaya pada beberapa titik. Jika Hal ini dibiarkan, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan ke rona lingkungan semula. Pemulihan kerusakan daerah ini membutuhkan waktu yang agak lama.

2. Hutan Produksi

- a) Sering terjadi penebangan hutan tanpa melakukan kaidah-kaidah seperti melakukan reboisasi terlebih dahulu, maupun tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman;
- b) Penebangan hutan produksi secara liar yang dilakukan oleh pemegang HPH, maupun masyarakat sekitar yang membutuhkan kayu untuk kelangsungan hidup;
- c) Perubahan fungsi lahan dari hutan produksi menjadi lahan budidaya.

3. Kawasan Pertanian

- a) Banyak terjadi alih fungsi lahan sawah atau tegalan menjadi kawasan terbangun, yang mengakibatkan semakin berkurangnya lahan pertanian;
- b) Sering terjadi perubahan fungsi lahan perkebunan menjadi tegalan/ladang kering, dan adanya penebangan tanaman perkebunan sehingga mengakibatkan penurunan tingkat produksi;
- c) Pengembangan kawasan hortikultura yang tidak berwawasan lingkungan, seperti memanfaatkan kawasan rawan longsor.

4. Kawasan Permukiman

- a) Akibat tekanan pembangunan maka sering terjadi pemanfaatan kawasan permukiman yang menggunakan kawasan dengan fungsi lindung terutama yang berada di bagian selatan dan utara dari Kabupaten Madiun;
- b) Rawan terjadi bencana banjir di kawasan permukiman yang berbatasan dengan Kali Madiun yang diakibatkan kerusakan hutan lindung dan kegiatan budidaya yang tidak dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan baik di Kabupaten Madiun maupun kabupaten-kabupaten sekitar;
- c) Banyak terdapat permukiman penduduk yang memanfaatkan sempadan sungai.

5. Kawasan Industri

- a) Kawasan industri yang ada di Kabupaten Madiun masih berupa lahan peruntukan industri, dimana lokasinya bercampur antara kegiatan perdagangan dan jasa, fasilitas umum serta permukiman;
- b) Kabupaten Madiun belum memiliki kawasan industri khusus yang bergabung dengan kawasan pergudangan;
- c) Industri kecil yang berkembang di Kabupaten Madiun adalah industri rumah tangga dan lokasinya hanya ada di beberapa desa dan diusahakan oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang, sedangkan industri kecil dalam bentuk sentra atau Lingkungan Industri Kecil belum nampak di Kabupaten Madiun;

- d) Lokasi industri yang berada di sisi selatan (di ruas jalan yang menghubungkan Madiun-Ponorogo) secara keruangan kurang prospek, mengingat distribusi barang agak terhambat karena harus melewati satu ruas jalan utama dan memasuki Kota Madiun.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029, kawasan strategis yang ditetapkan di Kabupaten Madiun yaitu:

1. Kawasan Strategis Ekonomi
 - a. Perkotaan Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten
 - b. Kawasan Agropolitan, Ekowisata, Agroforestry dan Agrowisata
 - c. Kawasan Industri dan Perdagangan
 - d. Kawasan Perbatasan
2. Kawasan Strategis Sosial Budaya
 - a. Peninggalan Situs Nglambangan
 - b. Makam Kuncen
 - c. Situs Sewulan
3. Kawasan Strategis Pemberdayaan Sumber Daya Alam
 - a. Memberikan batas yang jelas kawasan yang akan dieksplorasi dan/atau dieksploitasi dan ketentuan-ketentuan pengembangan lahan budidaya di sekitar kawasan;
 - b. Memberikan batasan yang jelas kawasan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan terbangun maupun kegiatan budidaya lainnya (radius pengembangan);
 - c. Menetapkan jalur hijau di sekeliling kawasan untuk memproteksi kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar;
4. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup
 - a. Kawasan Lindung
 - b. Kawasan Hutan Produksi
 - c. Kawasan Hutan Rakyat

- d. Kawasan Rawan Bencana
 - e. Kawasan Lindung Geologi
5. Kawasan Strategis Lainnya
- a. Kawasan di sekitar simpang susun dan akses jalan bebas hambatan
 - b. Jalan tembus yang menghubungkan Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Bojonegoro maupun jalan tembus NGADIPONO (Kabupaten Nganjuk - Kabupaten Madiun - Kabupaten Ponorogo).

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Madiun dapat dibedakan menjadi :

1. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya gerakan tanah tersebut, dibedakan menjadi :

a. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah

Daerah yang termasuk dalam zona ini meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare dan Dagangan. Luas zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah mencapai luas 35.853,59 ha.

b. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah

Daerah yang termasuk dalam zona ini adalah seluruh kecamatan kecuali Jiwan, Sawahan, Kebonsari dan Balerejo dimana keempat kecamatan tersebut masuk dalam zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah. Luas zona kerentanan gerakan tanah rendah mencapai luas 47.314,04 ha.

c. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

Daerah yang termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah di Kabupaten Madiun antara lain Kecamatan Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Mejayan, Wonoasri dan Madiun dengan luas penyebaran mencapai 15.642,87 ha.

d. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Daerah yang termasuk dalam zona ini adalah Kecamatan Dagangan dan Kare dengan luas mencapai 2.275,47 ha.

2. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Berdasarkan Proyek Geologi Teknik Tata Lingkungan dan Tata Daerah, Kabupaten Madiun merupakan kabupaten yang masuk dalam zona gempa dengan percepatan antara 0,05-0,15 g (gravitasi) yang setara dengan skala V-VI pada skala MMI, dan merupakan daerah berkekuatan 5-6 skala richter.

3. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi

Gunung Wilis adalah sebuah gunung yang diperkirakan masih aktif yang terletak di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Gunung Wilis memiliki ketinggian 2.552 meter, serta puncaknya berada di perbatasan antara enam kabupaten yaitu Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, dan Trenggalek. Obyek wisata Gunung Wilis yang paling banyak adalah air terjun, namun belum begitu dikembangkan hingga saat ini.

4. Kawasan Rawan Kebakaran

Sebagian besar dari Kabupaten Madiun merupakan daerah hutan dengan luas mencapai kurang lebih 40.631 ha yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri dan Madiun. Kawasan hutan ini sebagian besar merupakan hutan jati. Pada musim kemarau pohon jati pada umumnya akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Pada saat inilah kawasan hutan jati tampak kering dan gersang sehingga dengan terik matahari yang panas maka kawasan ini sangat rawan terhadap kebakaran.

5. Kawasan Rawan Kekeringan

Sebagian dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun tergolong sebagai kawasan rawan kekeringan. Rawan kekeringan di Kabupaten Madiun dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Kawasan rawan kekeringan karena wilayah tersebut memiliki potensi air tanah sangat kecil

b. Kawasan rawan kekeringan terutama untuk pertanian karena berada di tepian hutan dan berada di dataran tinggi kapur seperti Kecamatan Pilankenceng, Saradan, Geger dan Wungu.

6. Kawasan Rawan Banjir

Berdasarkan data dari Dinas Pengairan Kabupaten Madiun, terdapat 2 (dua) kriteria genangan di daerah sekitar Kali Madiun yang sering mengalami banjir. Dua kriteria tersebut adalah:

- a. Genangan banjir akibat hujan lokal.
- b. Genangan banjir akibat luapan Kali Madiun dan Kali Bengawan Solo.

Genangan banjir akibat luapan Kali Madiun dan Kali Bengawan Solo ini sering terjadi di sepanjang Kali Bengawan Solo antara muara Kali Tambakrono hingga mendekati Perkotaan Mejayan.

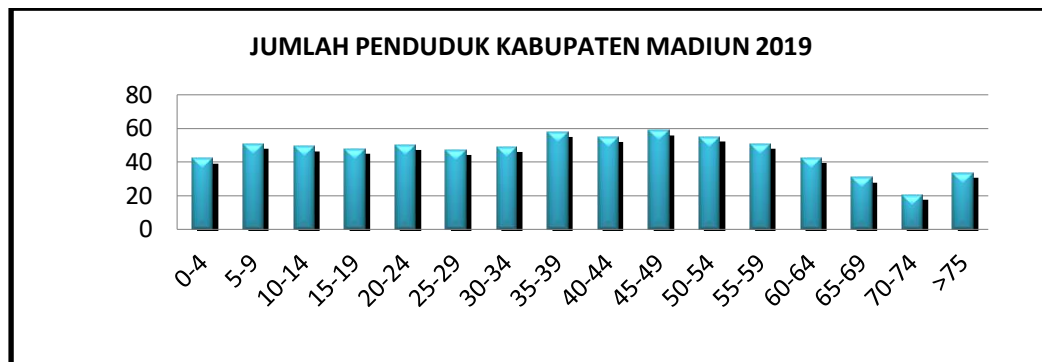
2.1.1.4 Demografi

Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu besar dibanding dengan daerah lain di Jawa Timur. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester II tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Madiun sebesar 742.259 jiwa. Jumlah tersebut mendiami wilayah seluas 1.010,86 Km² sehingga secara rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Madiun adalah 734,29 jiwa per km².

Jumlah penduduk yang besar dapat dilihat sebagai modal dasar pembangunan dan sekaligus juga dapat dilihat sebagai beban pembangunan. Penduduk dianggap sebagai potensi modal dasar pembangunan apabila penduduk tersebut diberdayakan sebagai tenaga kerja yang produktif. Dengan demikian dapat meningkatkan kontribusi perekonomian dan pada gilirannya tingkat pendapatannya makin tinggi, sehingga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Disisi lain penduduk juga dapat menjadi beban bagi pembangunan apabila kualitas pendidikan rendah, struktur umur muda terlalu besar dan distribusi penduduk tidak merata sehingga pelayanan sosial dan tingkat produksi tidak mungkin ditanggung oleh hanya sebagian penduduk yang sudah bekerja produktif. Untuk menghindari hal ini maka diperlukan upaya

pengaturan dan pengembangan kualitas penduduk yang pelaksanaannya diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu antar sektor pemerintah dan masyarakat.

Gambar 2.2
Grafik Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 2019



Sumber: Dispendukcapil 2019

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Madiun tahun 2019 terlihat bahwa Kabupaten Madiun termasuk dalam struktur penduduk dewasa, karena kelompok umur yang berusia 15 - 64 tahun jumlahnya 515.045 jiwa atau 69,94 persen dari total penduduk.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Menurut Kelompok Umur Tahun 2019

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-4	21,704	20,507	42,211
2.	5-9	26,330	24,509	50,839
3.	10-14	25,819	23,634	49,462
4.	15-19	24,424	23,375	47,799
5.	20-24	25,652	24,689	50,341
6.	25-29	24,260	23,018	47,278
7.	30-34	24,654	24,519	49,173
8.	35-39	28,494	29,435	57,929
9.	40-44	26,919	28,022	54,941
10.	45-49	28,662	30,390	59,052
11.	50-54	26,162	29,005	55,167
12.	55-59	24,555	26,408	50,963
13.	60-64	21,364	21,038	42,402
14.	65-69	15,573	15,183	30,756
15.	70-74	9,357	11,145	20,502
16.	>75	15,028	18,416	33,444
Jumlah		368,957	373,302	742,259
Persentase		49,71	50,29	100 %

Sumber : Dispendukcapil 2019

Dengan nilai rasio jenis kelamin sebesar 98,88 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 di Kabupaten Madiun terdapat 99 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan. Ini juga menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Dimana jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada penduduk perempuan.

Tabel 2.5
Penduduk Kabupaten Madiun Menurut jenis Kelamin
Tahun 2019

Rincian	2018
Jumlah Penduduk	742.259
Laki-laki	368.957
Perempuan	373.302
Rasio Jenis kelamin	98,88
Kepadatan/ Km ²	734,29

Sumber : Dispendukcapil 2019

Adapun terkait angka dependency ratio, yaitu perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (penduduk berumur 0 – 14 tahun, ditambah penduduk 65 tahun ke atas) dibandingkan jumlah penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) adalah sebesar 44,12 dimana ini menunjukkan bahwa 100 orang produktif menanggung 44 orang tidak produktif. Jumlah penduduk produktif yang relatif besar yaitu sebesar 515.045 jiwa atau sebesar 69,38 persen. Demografi seperti ini merupakan modal besar bagi Kabupaten Madiun, hal ini juga dapat dimaknai tuntutan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan perluasan kesempatan kerja.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Peningkatan produktifitas, skala usaha, dan nilai tambah barang dan jasa melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna dan ekonomi kreatif di semua sektor merupakan strategi yang sangat efektif untuk

mendorong peningkatan PDRB di semua sektor. Hasil analisis pertumbuhan PDRB, dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2014-2018
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah)
Kabupaten Madiun

No	Kategori	2014		2015		2016		2017		2018**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,281,387.0	32.27	3.368.091,2	31,46	3.457.751,7	30,62	3.497.699,3	29,44	3.418.896,4	27,38
2	Pertambangan dan Energi	109,540.4	1.08	110.832,3	1,04	111.985,0	0,99	121.489,8	1,02	124.515,2	1,00
3	Industri Pengolahan	1,008,777.5	9.92	1.073.146,3	10,02	1.142.572,7	10,12	1.226.189,3	10,32	1.346.346,6	10,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,291.6	0.10	10.448,6	0,10	10.764,0	0,10	11.496,4	0,10	12.583,6	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,454.5	0.17	18.244,8	0,17	19.251,9	0,17	20.284,3	0,17	21.431,8	0,17
6	Konstruksi	1,116,554.4	10.98	1.189.539,7	11,11	1.265.670,2	11,21	1.396.635,7	11,76	1.535.716,0	12,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,602,740.2	15.76	1.707.995,8	15,95	1.827.736,4	16,19	1.962.850,0	16,52	2.129.366,3	17,06
8	Transportasi dan Pergudangan	156,728.8	1.54	169.467,5	1,58	183.154,6	1,62	194.410,6	1,64	211.184,5	1,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	227,335.6	2.24	244.428,6	2,28	262.651,1	2,33	288.979,9	2,43	313.605,3	2,51
10	Informasi dan Komunikasi	767,688.6	7.55	834.418,4	7,79	911.769,0	8,08	963.749,6	8,11	1.040.986,0	8,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	278,034.8	2.73	297.949,1	2,78	321.894,9	2,85	342.134,9	2,88	370.963,1	2,97
12	Real Estate	178,822.7	1.76	189.978,8	1,77	204.569,2	1,81	216.238,7	1,82	232.646,7	1,86
14	Jasa Perusahaan	33,793.4	0.33	36.287,8	0,34	38.657,4	0,34	40.497,2	0,34	43.638,2	0,35
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	596,882.7	5.87	626.082,8	5,85	649.623,5	5,75	668.956,9	5,63	682.624,5	5,47

No	Kategori	2014		2015		2016		2017		2018**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
	inanSosi alWajib										
16	JasaPend idikan	439,8 36.3	4.3 2	466.8 57,5	4,36	500.8 44,8	4,4 4	525.804 ,1	4,43	560.189 ,0	4,4 9
17	JasaKese hatandan Kegiatan Sosial	88,28 7.1	0.8 7	93.66 6,2	0,87	99.16 4,4	0,8 8	104.394 ,9	0,88	112.549 ,2	0,9 0
18	Jasalain nya	255,5 28.6	2.5 1	267.6 79,5	2,50	282.6 96,4	2,5 0	297.525 ,0	2,50	327.765 ,4	2,6 3
	P DRB	10,16 9,684 .3	100	10.70 5.115 ,0	100	11.29 0.757 ,2	100	11.879. 336,6	100, 00	12.485. 007,7	100 ,00

Sumber: Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2019

*)Angka Sementara

Tabel di atas merupakan gambaran PDRB dan kontribusi ekonomi menurut kategori selama tahun 2014 s/d 2018 atas dasar Harga Konstan. Tahun 2010 kategori Pertanian memberikan kontribusi yang paling tinggi yaitu sebesar 27,38 persen. Untuk kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi mencapai 17,06 persen kemudian disusul kategori Konstruksi mencapai 12,30 persen dan sektor Industri Pengolahan mencapai 10,78 persen. Dibanding tahun sebelumnya, sektor Pertanian tetap mengalami kenaikan dari sisi rupiah namun mengalami penurunan secara persentase. Hal ini mengisyaratkan bahwa di Kabupaten Madiun, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Konstruksi serta sektor Industri Pengolahan semakin bertumbuh seiring perkembangan pembangunan Ibukota Kabupaten Madiun di Mejayan.

Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2014-2018
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
Kabupaten Madiun

No	Kategori	2014		2015		2016		2017		2018**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	4,388 ,232. 1	35. 02	4.813 .274, 6	34, 69	5.309 .918, 5	34, 29	5.193 .231, 2	31, 63	5.238 .473, 4	29, 63
2	Pertambangdan Penggalian	134,0 33.4	1.0 7	144.7 14,9	1,0 4	158.2 97,7	1,0 2	168.4 27,8	1,0 3	178.3 52,0	1,0 1
3	IndustriPengo lahan	1,222 ,998. 8	9.7 6	1.357 .606, 0	9,7 8	1.512 .966, 3	9,7 7	1.663 .076, 0	10, 13	1.872 .118, 7	10, 59
4	PengadaanList rikdan Gas	10,22 7.7	0.0 8	11.44 8,6	0,0 8	13.05 6,3	0,0 8	15.25 7,8	0,0 9	17.31 6,6	0,1 0
5	Pengadaan	19,38	0.1	21.10	0,1	23.76	0,1	25.06	0,1	26.66	0,1

	Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.15	0,15	9,95	6,85	7,95					
6	Konstruksi	1,448,646.0	11.56	1.650.480,7	11,90	1.883.956,4	12,17	2.121.269,0	12,92	2.354.269,4	13,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,876,430.0	14.97	2.061.330,1	14,86	2.280.647,4	14,73	2.647.440,3	16,13	2.986.344,2	16,89
8	Transportasi dan Pergudangan	189,148.3	1.51	217.549,4	1,57	253.859,6	1,64	273.538,6	1,67	302.493,7	1,71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	267,682.7	2.14	297.178,4	2,14	332.974,4	2,15	385.858,2	2,35	423.765,2	2,40
10	Informasi dan Komunikasi	782,969.1	6.25	880.901,0	6,35	1.028.110,9	6,64	1.064.849,2	6,49	1.150.789,7	6,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	322,120.0	2.57	361.934,9	2,61	408.986,3	2,64	444.342,8	2,71	494.350,5	2,80
12	Real Estate	199,454.5	1.59	226.419,8	1,63	261.704,4	1,69	272.176,4	1,66	303.331,9	1,72
14	Jasa Perusahaan	41,024.9	0.33	46.133,0	0,33	51.720,8	0,33	55.851,1	0,34	62.689,5	0,35
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	734,900.7	5.86	797.994,8	5,75	863.437,8	5,58	932.518,2	5,68	996.364,6	5,64
16	Jasa Pendidikan	516,054.9	4.12	564.844,8	4,07	627.295,4	4,05	664.239,2	4,05	720.324,5	4,07
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99,675.8	0.80	108.932,8	0,79	120.251,7	0,78	128.472,2	0,78	139.069,5	0,79
18	Jasa lainnya	278,758.0	2.22	312.822,3	2,25	355.248,6	2,29	362.103,5	2,21	412.421,5	2,33
	PDRB	12,531,746.0	100	13.874.666,1	100	15.486.202,3	100	16.417.718,1	100,00	17.679.142,7	100,00

Sumber: Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2019

*) Angka Sangat Sementara

Sedangkan pada tabel 2.5 diatas merupakan gambaran PDRB dan kontribusi ekonomi menurut kategori selama tahun 2014 s/d 2018 atas dasar Harga Berlaku. Tahun 2018 Kategori Pertanian masih tetap merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang paling tinggi yaitu sebesar 29,63 persen. Untuk kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi mencapai 16,89 persen kemudian disusul kategori Konstruksi mencapai 13,32 persen dan sektor Industri Pengolahan mencapai 10,59 persen.

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Kategori	2014		2015		2016		2017		2018**)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,02	32,27	34,69	31,46	34,29	30,62	31,63	29,44	30,32	28,54
2	Pertambangan dan Penggalian	1,07	1,08	1,04	1,04	1,02	0,99	1,03	1,02	0,99	0,98
3	Industri Pengolahan	9,76	9,92	9,78	10,02	9,77	10,12	10,13	10,32	10,27	10,42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,10	0,08	0,10	0,08	0,10	0,09	0,10	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,17	0,15	0,17	0,15	0,17	0,15	0,17	0,15	0,17
6	Konstruksi	11,56	10,98	11,90	11,11	12,17	11,21	12,92	11,76	13,50	11,97
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,97	15,76	14,86	15,95	14,73	16,19	16,13	16,52	16,30	16,77
8	Transportasi dan Pergudangan	1,51	1,54	1,57	1,58	1,64	1,62	1,67	1,64	1,73	1,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,14	2,24	2,14	2,28	2,15	2,33	2,35	2,43	2,41	2,49
10	Informasi dan Komunikasi	6,25	7,55	6,35	7,79	6,64	8,08	6,49	8,11	6,63	8,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,57	2,73	2,61	2,78	2,64	2,85	2,71	2,88	2,76	2,93
12	Real Estate	1,59	1,76	1,63	1,77	1,69	1,81	1,66	1,82	1,75	1,86
14	Jasa Perusahaan	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,35	0,34
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,86	5,87	5,75	5,85	5,58	5,75	5,68	5,63	5,61	5,55
16	Jasa Pendidikan	4,12	4,32	4,07	4,36	4,05	4,44	4,05	4,43	4,11	4,48
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,87	0,79	0,87	0,78	0,88	0,78	0,88	0,79	0,89
18	Jasa lainnya	2,22	2,51	2,25	2,50	2,29	2,50	2,21	2,50	2,25	2,51
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2019

*Angka Sementara

Tabel 2.9
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2017 - 2018
Kabupaten Madiun

No	Kategori	Pertumbuhan 2017		Pertumbuhan 2018**)	
		Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,40	1,27	0,87	-2,25
2	Pertambangan dan Penggalian	7,45	5,35	5,89	2,49
3	Industri Pengolahan	10,83	7,69	12,57	9,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,47	4,10	13,49	9,46
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,77	5,86	6,39	5,66
6	Konstruksi	13,12	10,19	10,98	9,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,15	7,29	12,80	8,48

No	Kategori	Pertumbuhan 2017		Pertumbuhan 2018**)	
		Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%
8	Transportasi dan Pergudangan	12,20	7,64	10,59	8,63
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,33	8,76	9,82	8,52
10	Informasi dan Komunikasi	9,37	7,31	8,07	8,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,36	7,00	11,25	8,43
12	Real Estate	10,12	7,21	11,45	7,59
14	Jasa Perusahaan	9,58	5,76	12,24	7,76
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,09	2,23	6,85	2,04
16	Jasa Pendidikan	8,80	6,04	8,44	6,54
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,90	5,33	8,25	7,81
18	Jasa lainnya	8,01	6,05	13,90	10,16
	PDRB	7,82	5,42	7,68	5,10

Sumber : Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2019

*) Angka Sangat Sementara

2.1.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung naik. Beberapa penyebab inflasi antara lain:

1. Adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi (*Demand Pull Inflation*)
2. Kenaikan biaya produksi (*Cost Push Inflation*)
3. Meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat
4. Inflasi dari luar negeri (*imported inflation*)
5. Inflasi dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat inflasi, yaitu:

1. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran. Permintaan barang dapat ditekan dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat agar berbelanja dalam jumlah yang wajar sesuai kebutuhan. Dianjurkan agar tidak membiasakan berbelanja dalam jumlah yang berlebihan dan menimbun barang untuk persediaan dalam jangka yang relatif lama. Sementara itu, penawaran barang dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan produktifikasi semua sektor.

2. Efisiensi ekonomi untuk menekan biaya produksi dengan cara penyediaan fasilitas infratraktur yang menunjang kegiatan ekonomi
3. Menekan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara menumbuhkan budaya menabung mulai usia dini

Laju inflasi tahun kalender di Kabupaten Madiun pada bulan Desember 2018 berada pada angka 2,71 persen, lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Tahun 2017.

Tabel 2.10
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*)	Rata-rata Pertumbuhan
Inflasi	7,24	2.66	5,83	4,78	2,71	5,14

Sumber : Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2019

*)Angka Sementara proyeksi metode Bappenas

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Data rata-rata lama sekolah merupakan komponen dari penghitungan Indek Pembangunan Manusia (IPM) untuk aspek pendidikan. Dengan demikian untuk meningkatkan IPM Kabupaten Madiun dapat dilakukan dengan cara meningkatkan rata-rata lama sekolah.

Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka Rata-rata Lama Sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di Kabupaten Madiun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Madiun pada tahun 2018 adalah sebesar 7,57 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah (7 tahun atau lebih) di Kabupaten Madiun dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/SLTP. Sehingga untuk mencapai target rata-rata lama bersekolah 9 tahun

masih membutuhkan upaya dan kerja keras lagi dari pemerintah daerah Kabupaten Madiun. Berikut gambaran rata-rata lama sekolah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 di Kabupaten Madiun.

Tabel 2.11
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rata-rata lama sekolah	6,89	6,99	7,00	7,13	7,57

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Madiun, 2019

2.1.2.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APM menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa yang berasal dari Kabupaten Madiun dengan penduduk Kabupaten Madiun pada usia sekolah.

Tabel 2.12
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	94,02	94,47	94,22	94,36	88,74
2	SMP/MTs	76,75	76,24	76,21	73,81	73,10

Sumber :DinasPendidikanKab. Madiun, 2019

Angka Partisipasi Murni SD/MI pada tahun 2018 sebesar 88,74% dari target sebesar 93,25% atau tercapai sebesar 95,16%. APM SD/MI kurang dari 100% berarti bahwa tidak semua anak usia sekolah SD/MI bersekolah tepat waktu sesuai dengan usia sekolahnya. Untuk Angka Partisipasi Murni SMP/MTs pada tahun 2018 sebesar 73,10% dari target 76,12% dengan capaian 96,03%,mengalami penurunan 2,40% jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2017. APM SMP/MTs kurang dari

100% berarti bahwa tidak semua anak usia sekolah SMP/MTs bersekolah tepat waktu sesuai dengan usia sekolahnya.

Belum maksimalnya APM SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Madiun, antara lain terjadi karena selain karena adanya penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di luar Kabupaten Madiun, juga terdapat penduduk usia 7-12 tahun yang sudah sekolah di SMP/MTs atau masih sekolah di TK, atau anak SD yang masih berusia kurang dari 7 tahun. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kecenderungan orang tua untuk menyekolahkan anaknya lebih awal dari usia seharusnya juga relatif besar, pada tahun 2018 terdapat sekitar 7,06 % anak SD/MI yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun.

Untuk meningkatkan APM SD/MI dan SMP/MTs terutama untuk SD dan SMP yang menjadi kewenangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada sekolah agar menyekolahkan anaknya sesuai dengan jenjang usia sekolahnya. Selain juga dalam aplikasi Dapodik sudah terdapat warning untuk siswa baru yang mendaftar di bawah usia seharusnya. Apabila terdapat siswa baru yang mendaftar di bawah usia seharusnya maka harus melampirkan rekomendasi dari psikolog atau dewan guru yang membuktikan bahwa anak tersebut mampu.

2.1.2.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 sampai dengan 15 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Madiun pada Tahun 2014 - 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	103,46	103,45	103,46	103,47	95,48
2	SMP/MTs	96,24	98,67	97,57	97,66	93,56

Sumber :Dinas Pendidikan Kab. Madiun, 2019

Realisasi Angka Partisipasi Kasar SD/MI tahun 2018 adalah 95,48 %. Angka Partisipasi Kasar SD/MI dibawah 100% menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Madiun usia 7-12 tahun yang berjumlah 58.734 orang 95,48% menikmati layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Madiun, sedangkan 4,52% terindikasi terdapat penduduk Kabupaten Madiun yang bersekolah di luar Kabupaten Madiun atau di pondok pesantren. Untuk Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs tahun 2018 adalah 93,56 % tercapai dari target 97,68 %, dengan capaian kinerja sebesar 95,78 %. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs dibawah 100% menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Madiun usia 13-15 tahun tidak seluruhnya bersekolah di Kabupaten Madiun.

Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Madiun, untuk jenjang SMP belum mampu mencapai 100% karena selain masih terdapat anak usia 12-15 tahun yang bersekolah di luar Kabupaten Madiun juga terdapat anak-anak yang lebih memilih untuk bekerja daripada sekolah. Selain itu juga, seiring dengan banyaknya pondok pesantren di Kabupaten Madiun, banyak masyarakat Kabupaten Madiun yang lebih memilih pendidikan di pondok pesantren.

Untuk meningkatkan APK SD/MI dan SMP/MTs terutama untuk SD dan SMP yang menjadi kewenangan , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk meningkatkan mutu baik dari sarana prasarana, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta membangun sistem pendidikan yang lebih baik antara lain dengan menerapkan ekstra keagamaan serta penguatan pembinaan karakter siswa.

2.1.2.2.4 Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Ibu

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang harus terus menerus diupayakan oleh pemerintah. Derajat kesehatan suatu daerah dapat

dilihat dari indikator utama kesehatan antara lain Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR).

Kelangsungan Hidup anak ditunjukkan dengan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Salah satu indikator yang paling menonjol dalam menilai derajat kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB = IMR). Angka Kematian Bayi dihitung dari banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Manfaat dari IMR ini, adalah untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. AKABA adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Akaba kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kematian bayi	93	98	80	59	59
2	Jumlah kelahiran hidup	9.709	9.552	9.177	8.883	9.118
3	AKB per 1.000 LH	9,58	10,26	8,72	6,64	6,47
4	AKHB	0,13	(0,76)	0,81	2,24	2,65

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2019 (AKHB = Jumlah kelahiran hidup/1000- AKB)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator kesehatan yang cukup penting dimana AKI diketahui dari jumlah kematian karena kehamilan, persalinan dan ibu nifas per jumlah kelahiran hidup di wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Angka Kematian Ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan

melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, serta tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetric.

Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistim rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Data tahun 2018 menggambarkan bahwa terjadi perkembangan yang positif atas kesehatan dan keselamatan ibu hamil, bersalin dan nifas di Kabupaten Madiun.

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 LH	82,40	41,88	108,97	157,60	65,80

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2019

2.1.2.2.5 Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan kualitas peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya. Usia Harapan Hidup Kabupaten Madiun yang selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya memberi arti peningkatan terhadap upaya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.16
Usia Harapan Hidup Kabupaten Madiun Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Usia Harapan Hidup	69.76	70.36	70.55	70.77	70,97

Sumber : BPS, 2019

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yaitu suatu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan dari segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Madiun dari tahun 2014-2018 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	IPM Kab. Madiun	68.60	69.39	69,67	70,27	70,88
2	IPM Jawa Timur	68,14	68.95	69,74	70,27	70,77
3	IPM Nasional	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39

Sumber : BPS, 2019

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun juga mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan di Kabupaten Madiun telah fokus terhadap pembangunan manusianya, sehingga dapat meningkatkan mutu penduduk Kabupaten Madiun sebagai subyek pembangunan. Atau dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan penduduk Kabupaten Madiun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.2.2.6 Persentase Balita Gizi Buruk

Balita (usia 0-59 bulan) merupakan kelompok umur yang rentan terkena masalah gizi, padahal mereka adalah aset bangsa untuk kemajuan

di masa datang. Masalah gizi adalah gangguan kesehatan seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pemenuhan kebutuhannya akan zat gizi yang diperoleh dari makanan. Masalah gizi (malnutrition), dibagi dalam dua kelompok yaitu masalah gizi-kurang (under nutrition) dan masalah gizi-lebih (over nutrition), baik berupa masalah gizi-makro ataupun gizi-mikro.

Salah satu arah kebijakan perbaikan gizi sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN adalah peningkatan surveilans gizi, termasuk pemantauan pertumbuhan. Kegiatan surveilans gizi meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian serta diseminasi informasi bagi pemangku kepentingan. Informasi dari surveilans gizi dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan segera maupun untuk perencanaan program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang serta untuk perumusan kebijakan.

Persentase balita gizi buruk Kabupaten Madiun di tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini dapat disebabkan karena adanya pola asuh ibu atau nenek yang keliru terhadap pemberian makanan pada balita dimana belum memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi seimbang, beragam, sesuai kebutuhan, bersih dan aman sehingga akan berakibat secara langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita; Faktor penyakit infeksi yang berpengaruh terhadap daya tahan tubuh balita yang disebabkan karena berat badan lahir rendah (BBLR) pada saat bayi dilahirkan; dan semakin meningkatnya peran serta / kompetensi kader dalam pelacakan kasus gizi buruk sehingga banyak kasus gizi buruk yang ditemukan di masyarakat.

Tabel 2.18
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah balita gizi buruk (jiwa)	134	115	95	69	123
2	Jumlah balita yang ditimbang (jiwa)	43.131	36.656	37.267	36.498	35.906
3	Persentase balita gizi buruk	0,31	0,31	0,25	0,19	0,34

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2019

2.1.2.2.7 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Kemiskinan.

Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur bersama kabupaten Madiun telah mengambil kebijakan dalam menentaskan kemiskinan melalui program dan kegiatan diantaranya : Program Indonesia Pintar, Jaminan Kesehatan Daerah/ Pembiayaan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin, Rastra, Program Keluarga Harapan, Jalinmatra, Anty Poverty Program, fasilitas koperasi, pemberdayaan UMKM, pemberdayaan pokmas tepian hutan, rehab RTLH, Bantuan Stimulan Jamban, Bhakti Sosial Terpadu, Program Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah, Pelayanan KB Gratis, Pemasangan Sambungan Air Rumah Tangga Untuk Masyarakat Miskin, Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Diniyah (BOSDAMADIN), Pelayanan Sunatan Masal dan Pengobatan Masal, Pelayan penguburan mayat tidak dikenal, Pemberdayaan fakir miskin dan Bina Swadaya serta Penanganan dan pembenahan bantuan korban bencana sosial.

Kemiskinan merupakan salah satu bagian dari masalah klasik pembangunan yang belum terpecahkan sampai sekarang karena bersifat kompleks dan membutuhkan penanganan lintas sektoral. Padahal di satu sisi, pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Miskin merupakan suatu kondisi belum terpenuhinya hak - hak dasar kebutuhan primer individu secara manusiawi dan belum mampu mengembangkan kehidupannya secara lebih bermartabat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, dan budaya.

Tabel 2.19
Tabel Indikator Kemiskinan Kab. Madiun Periode 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk Miskin	81.200	84.740	85.970	83.430	77.750
2	Prosentase Penduduk Miskin	12,04	12,54	12,69	12.28	11.42

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	265.310	277.092	294.451	306.679	327.536
4	P1	1,37	1.95	2,08	2.65	1.60
5	P2	0,33	0,46	0,56	0.78	0.34

Sumber : BPS 2019

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Madiun Tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sejumlah 77.750 jiwa dari tahun 2017 sejumlah 83.430.

Indeks kedalaman kemiskinan atau yang dikenal dengan istilah P1 dan indeks Keparahan (P2) di Kabupaten Madiun mengalami penurunan, hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Madiun semakin dangkal. Begitu pula halnya dengan Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) mengalami kenaikan menjadi Rp. 327.536,00 dari tahun sebelumnya tahun 2017 sebesar Rp. 306.679,00.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1 Seni Budaya Daerah

Pelestarian seni dan budaya merupakan tanggungjawab masyarakat dan Pemerintah. Pemerintah harus mampu memfasilitasi serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam upaya melestarikan seni budaya tradisi yang tumbuh, berkembang dan menjadi bagian dari masyarakat. Dimana, secara filosofis sebenarnya kebudayaan adalah identitas utama suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan timbul dengan tujuan membedakan ciri khas suatu kelompok dengan kelompok lain.

Di sisi lain, secara umum, Pemerintah Kabupaten Madiun telah melakukan pelestarian seni dan budaya melalui beberapa kegiatan antara lain pengadaan alat kesenian bagi sekolah, Pengiriman Misi Kesenian dan lomba tingkat Provinsi, lomba kesenian daerah tingkat Kabupaten, Peningkatan SDM bagi Pendidik Seni Budaya serta pelaksanaan kemah

karakter sebagai implementasi pendidikan karakter dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20
Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Capaian Pembangunan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
2	Jumlah Grup kesenian	207	333	384	479	479

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Madiun,2019

Jumlah grup kesenian pada tahun 2018 masih sama dengan tahun 2017 yang berjumlah 479 grup. Grup kesenian disini yang dimaksud adalah kelompok kesenian yang terdaftar dalam Buku Induk Kesenian di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat untuk melestarikan kesenian dan budaya daerah sangat besar.

2.1.2.3.2 Olahraga

Tujuan didirikannya klub Olahraga adalah untuk memasyarakatkan olahraga, pemanduan bakat dan bibit olahraga serta peningkatan prestasi olahraga. Hampir semua cabang olahraga menyandarkan pembinaannya bersumber dari aktivitas hasil klub sebagai landasan awal. Dalam kenyataannya, olahraga membutuhkan wadah sebagai tempat untuk berlatih dan membina atlet.

Tabel 2.21
Perkembangan Olahraga Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Capaian Pembangunan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah klub olahraga.	95	95	95	95	95

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga, 2019

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerataan, peluasan dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah terus berupaya mewujudkan melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APS di Kabupaten Madiun cukup tinggi mendekati angka ideal APS yaitu 100. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Madiun Tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.22
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI					
1.1	Jumlah murid	55.457	55.682	55.855	56.149	56.311
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	53.729	53.553	53.975	54.265	58.374
1.3	APS SD/MI	103,22	103,98	103,48	107,70	95,87
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah murid	29.630	28.446	27.768	27.166	21.547
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	28.992	27.953	27.933	27.817	28.544
2.3	APS SMP/MTs	102,2	101,76	99,41	97,66	75,49

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI pada tahun 2018 sebesar 95,87% dari target sebesar 100% atau tercapai sebesar 95,87%. Capaian APS SD/MI dibawah 100% mengindikasikan bahwa belum semua penduduk Kabupaten Madiun usia 7-12 tahun menikmati layanan pendidikan di Kabupaten Madiun. Untuk Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs pada tahun 2018 sebesar 75,49% dari target 100% dengan capaian 75,49%. Capaian APS SMP/MTs dibawah 100% mengindikasikan bahwa belum semua penduduk Kabupaten Madiun usia 13-15 tahun menikmati layanan pendidikan di Kabupaten Madiun.

Belum maksimalnya APS SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Madiun antara lain disebabkan karena data base Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terbatas pada siswa. belum terintegrasinya data kependudukan dan data pendidikan, sehingga belum bisa mengukur partisipasi sekolah penduduk secara riil. Koordinasi dengan Bappeda dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diharapkan dapat terwujudnya integrasi data kependudukan dan pendidikan.

b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Selama kurun waktu 2014-2018 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs relatif stabil tidak mengalami fluktuasi yang cukup berarti. Tahun 2018 jumlah gedung sekolah untuk jenjang SD/MI berkurang sebanyak 12 gedung. Hal ini disebabkan karena ada lembaga sekolah yang dimerger.

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kabupaten Madiun Tahun 2014-2018 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.23
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	497	497	485	487	475

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	55.827	57.172	53.975	54.265	58.374
1.3	Rasio siswa/ sekolah	1:112	1:111	1:115	1:115	1 : 122
2	SMP/ MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	80	80	81	86	86
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	27.903	29.323	27.933	27.817	28.544
2.3	Rasio siswa/ sekolah	1:349	1:344	1:336	1:316	1 : 331

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Jumlah sekolah jenjang SD/MI menunjukkan banyaknya satuan pendidikan jenjang SD/MI yang ada di Kabupaten Madiun. Pada tahun 2018 terdapat tambahan 1 lembaga MI baru. Sedangkan untuk lembaga SD berkurang 13 lembaga karena adanya regrouping sekolah bagi sekolah yang satu halaman atau jaraknya berdekatan dan siswanya kurang dari 60 siswa. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs masih sama seperti tahun 2017 dimana lembaga SMP sebanyak 48 lembaga dan MTs berjumlah 38 lembaga. Regrouping sekolah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Madiun.

c. Rasio guru/murid

Pada rentang tahun 2014-2018 jumlah guru SD/MI cukup fluktuatif, begitu pula dengan jumlah muridnya. Pada tahun 2018 pada jenjang SD/MI, baik jumlah guru maupun murid mengalami penurunan. Hal ini berpengaruh terhadap rasio siswa terhadap guru yang sebelumnya 1:11 menjadi 1:12. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata 1 orang guru mengajar 12 murid.

Pada jenjang SMP/MTs juga mengalami hal yang sama, terjadi penurunan jumlah guru dan jumlah murid, sehingga rasio guru terhadap murid berubah dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 1 guru untuk 13 murid. Rasio guru/murid dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.24
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	3.917	5.135	5.008	4.983	4.873

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1.2	Jumlah Murid	55.586	55.402	55.840	56.149	56.077
1.3	Rasio siswa per Guru	1:14	1:11	1:11	1:11	1:12
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	2.070	2.154	2.144	2.196	2.120
2.2	Jumlah Murid	27.903	27.580	27.255	27.166	26.706
2.3	Rasio siswa per Guru	1:13	1:13	1:13	1:12	1:13

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Dilihat dari rasio guru dan murid untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs sudah mencukupi kebutuhan. Dimana penghitungan rasio guru juga termasuk dengan Guru Tidak Tetap (GTT). Masih perlu dilakukan pemetaan guru terutama untuk guru tidak tetap untuk mengatasi kekurangan guru di beberapa wilayah.

2.1.3.1.2 Urusan Kesehatan

Bidang Kesehatan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan di Kabupaten Madiun diarahkan melalui upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan kesehatan diartikan sebagai pelayanan kesehatan yang bermutu yang memuaskan pemakai jasa pelayanan serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika pelayanan profesi. Wujud nyata hal tersebut harus berupa pemeliharaan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dengan mengikutsertakan sebesar-besarnya peran aktif segenap anggota masyarakat.

a. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan perpanjangan tangan Puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat, yang menyelenggarakan system pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas manusia, secara empirik telah dapat memeratakan pelayanan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tabel 2.25
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Posyandu	874	875	878	879	880
2	Jumlah Balita	48.789	47.562	46.810	46.102	45.413
3	Rasio (per 1000 balita)	1:56	1:54	1:53	1:52	1:52

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2019

b. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat. Pembangunan fasilitas kesehatan bukan hanya kewajiban pemerintah, namun juga perlu peran serta aktif masyarakat termasuk swasta sebagai mitra pemerintah. Peran pemerintah dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.

Tabel 2.26
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rumah Sakit Umum	2	2	2	2	2
2	Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0	0
3	Rumah Sakit Paru-Paru	1	1	1	1	1
4	Balai Pengobatan Swasta	9	11	11	11	11
5	BKIA Swasta	0	0	0	0	0
6	Posyandu	874	875	878	879	880
7	Gudang Farmasi	1	1	1	1	1
8	Puskesmas Rawat Inap	9	9	11	11	11
9	Puskesmas Non Rawat Inap	17	17	15	15	15
10	Puskesmas Pembantu	58	58	58	58	58
11	Puskesmas Keliling	31	41	36	41	43

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2019

Tenaga kesehatan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan memberikan kontribusi hingga 80% dalam keberhasilan pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan di Indonesia dewasa ini sangat banyak jenisnya. Dalam Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan ini, tenaga kesehatan dibatasi pada 13 (tiga-belas) jenis tenaga, yaitu dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, sanitarian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis.

Tabel 2.27
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dokter Umum	42	40	33	33	38
2	Dokter Gigi	23	24	23	22	23
3	Apoteker	3	4	2	2	2
4	Bidan	289	222	221	258	309
5	Perawat	226	232	179	194	265
6	Asisten Apoteker	31	29	35	30	33
7	Ahli Gizi	32	34	33	32	34
8	Analisis Medis	18	20	24	24	27
9	Sanitarian	38	37	34	27	27
10	Kesmas	37	37	37	38	38
11	Penata Rontgen	0	0	0	0	0
12	Fisioterapi	4	4	4	4	4
13	Perawat gigi	22	23	23	20	20
14	Penata Laboratorium	0	0	0	0	0
15	Penyuluh Kesmas	16	22	24	36	32
16	Entomolog Kesehatan	3	3	3	2	2
17	Epidemiolog Kesehatan	9	8	8	7	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2019

Dilihat dari Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita, Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, tahun 2018 terdapat peningkatan pada beberapa item. Hal ini menggambarkan bahwa upaya pemerintah di bidang kesehatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan kualitas irigasi air dan peningkatan dan pemerataan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, rumah tinggal dan pemukiman

layak huni, drainase, dan kebersihan pasar. Pertumbuhan dan pemerataan sarana dan prasarana ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi perkembangan daerah dan peningkatan daya saing daerah.

Tabel 2.28
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kondisi Baik	343.35	421,78	466,23	492,03	360.050
2	Kondisi Sedang	156.33	132,85	123,20	155,15	126.350
3	Kondisi Rusak	499.56	443,62	408,82	350,27	256.620
4	Jalan Kabupaten	998.25	998,25	998,25	998,25	743.020

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang, 2019

2.1.3.1.4 Urusan Perumahan

Dalam bidang perumahan, indikator kinerja dinilai diantaranya dari indikator rumah tangga pengguna air bersih, indikator rumah tangga pengguna listrik dan indikator rumah layak huni. Indikator-indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah pengguna air bersih, listrik dan sanitasi pada tahun tertentu dibagi jumlah keseluruhan rumah tangga/KK pada tahun tertentu dikali 100%.

Tabel 2.29
Indikator Urusan Perumahan Tahun 2014 - 2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rumah tangga pengguna air bersih yang diatangani oleh PU BMCK (%)	8,92	9,17	9,23	9,54	10,18
2	Rumah layak huni (%)	97,57	97,13	97,74	98,52	99,17

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2019

Pada tahun 2018, untuk rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan menjadi 10,18 persen atau sejumlah 19.619 RT/SR.

2.1.3.1.5 Urusan Penataan Ruang

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun kepada pemilik

bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

a. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Madiun meliputi daerah sekitar sungai, taman, lapangan olahraga dan makam dan jalan. Program ini dilaksanakan melalui pembuatan taman hijau di bantaran sungai. Pembuatan taman hijau bertujuan untuk menambah luasan RTH, pencegahan banjir, penurunan pencemaran udara, peningkatan produktivitas masyarakat dan meningkatkan keindahan lingkungan.

b. Jumlah Bangunan Ber-IMB

Ijin mendirikan bangunan gedung/rumah adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun kepada pemilik bangunan gedung/rumah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat bangunan gedung/rumah sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

2.1.3.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan stakeholders serta meningkatkan kualitas dan manajemen data dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025, perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD.

Tabel 2.30
Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERBUP	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Bappeda Kab Madiun, 2019

2.1.3.1.7 Urusan Perhubungan

Pembangunan di bidang perhubungan dilaksanakan dengan memelihara, meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemerataan prasarana dan sarana perhubungan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan mengurangi kecelakaan.

Tabel 2.31
Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah uji kir angkutan umum (buah)	3.820	4.266	4405	5071	5130
2	PJU Kondisi baik	3.237	3.550	3.863	4.568	4.673
3	Rambu terpasang :					
	a. Rambu-rambu	66,81	71,87	85,05	95,97	100
	b. Warning light	96,08	1115,70	105,88	99,99	100
	c. Marka	94,79	98,85	98,16	98,76	100
	d. Guardrail	35	45	66	82,53	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Madiun, 2019

2.1.3.1.8 Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup saat ini menjadi perhatian khusus terkait dengan diterapkannya konsep pembangunan *green economy* yang berkelanjutan. Berbagai kebijakan pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan yang sangat memerlukan dukungan masyarakat. Masyarakat harus ditumbuhkan kesadarannya untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan di sekitarnya, antara lain : membuang sampah pada tempatnya, meminimalkan sampah, mengolah sampah, menjaga kelestarian hutan, menjaga kebersihan sungai dan saluran air dan menghemat penggunaan sumber daya alam terutama yang tidak dapat diperbaharui. Kinerja pada urusan lingkungan hidup di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.32
Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2014 - 2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Pemantauan Pencemaran status mutu air	32%	38,71%	45,16%	51,61%	58,06%
2	Penegakan hukum lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab Madiun, 2019

2.1.3.1.9 Urusan Pertanahan

Pembangunan di bidang pertanahan bertujuan untuk meningkatnya tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum. Sebagaimana kebijakan Presiden Joko Widodo, kemudahan pelayanan pengurusan sertifikat tanah harus terus ditingkatkan karena masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat dan berpotensi konflik. Sertifikasi tanah sangat penting untuk menarik minat investor, khususnya terkait dengan pembebasan lahan untuk usaha.

2.1.3.1.10 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan Kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan serta meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi penduduk.

Tabel 2.33
Indikator Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	0,89	0,92	0,93	0,94	0,95
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,74	0,81	0,88	0,88	0,95
3	Rasio pasangan berakte nikah	1	1	1	1	1
4	Kepemilikan KTP (%)	90	92	93	94	95
5	Kepemilikan akta kelahiran per-1000 penduduk	704	720	854	882	884

Sumber : Dispendukcapil, 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian bayi yang belum mempunyai akta kelahiran. Mengingat pentingnya akta kelahiran untuk masa depan anak maka perlu adanya kebijakan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan pembuatan akta kelahiran.

2.1.3.1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender melalui pemerataan akses dan tingkat partisipasi aktif serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat .

Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososialkultural yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Keadaan tersebut menghambat keterlibatan perempuan berperan aktif dalam pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan dasar. Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan secara tidak langsung berdampak pada anak. Hal ini mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan juga sangat berdampak pada derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.34
Indikator Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	3,63	4,23	5,89	3,21	7,07
2.	Rasio KDRT	0,012	0,01	0,004	0,019	0,019
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	53,07	50,63	51,53	57,02	51,95

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

2.1.3.1.12 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia

dan sejahtera serta diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas dan kualitas penduduk.

Tabel 2.35
Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif	75,03	74,05	74,75	76,05	77,19
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,311	0,311	0,31	0,28	0,22
3.	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan selama masa reproduksi (Total Fertility Rate/TFR)	2,22	2,22	2,02	2,02	2,19

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Madiun, 2019

Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan cakupan pasangan usia subur sebesar 1,14% menjadi 77,19% dari tahun 2017 sebesar 76,05 %. Yang diikuti pula penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0,06 %. Namun demikian angka TFR mengalami kenaikan sebesar 0,17% dari tahun sebelumnya 2,02 menjadi 2,19 di tahun 2018.

2.1.3.1.13 Urusan Sosial

Jumlah Panti Sosial Asuhan Yatim Piatu di Kabupaten Madiun masih stabil dari tahun 2014 - 2018 yaitu sejumlah 7 Panti. Begitu pula halnya dengan jumlah Panti Lanjut Usia/Werda yaitu sejumlah 2 Panti dan Jumlah Panti Sosial Penyandang Cacat sejumlah 3 Panti.

Pada tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah PMKS yang menerima bantuan. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Madiun dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami perkembangan, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,75 % dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 1,5%. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang meluncurkan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Madiun.

Tabel 2.36
Indikator Urusan Sosial Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panti Sosial Asuhan Yatim Piatu	7	7	7	7	7
2	Panti Lanjut Usia/ Werda	2	2	2	2	2
3	Panti Sosial Penyandang Cacat	3	3	3	3	3
4	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	1.052	304.610	307.477	310.781
5	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0,83	1,51	1,07	0,75	1,5

Sumber : Dinas Sosial, 2019

2.1.3.1.14 Urusan Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2018 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 0,33% menjadi 69,52%.

Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Madiun Tahun 2014-2018 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena Kompetensi yang dimiliki oleh Pencari Kerja Tidak sesuai dengan Kompetensi yang diperlukan oleh Pengguna Tenaga Kerja/Pengusaha.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Madiun Tahun 2014-2018 mengalami perkembangan yang fluktuatif, hal ini disebabkan karena semakin sempitnya Lapangan Pekerjaan dan Lowongan Pekerjaan di Kabupaten Madiun.

Terkait data Perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Perlindungan K3 di Kabupaten Madiun Tahun 2018 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,5 % di tahun 2018.

Tabel 2.37
Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	68,73	66,12	70,20	64,85	69,52
2	Pencari kerja yang ditempatkan	84	81,57	71,78	74,84	66,5
3	Tingkat pengangguran terbuka	3,38	6,59		3,19	3,81

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
4	Perusahaan yang menerapkan K3 (perusahaan)	59,60	59,75	59,95	60,59	*)
5	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	1,14	37,50	1,28	1,02	1,5

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019

2.1.3.1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah koperasi di Kabupaten Madiun bertambah dari tahun 2017 sejumlah 790 unit menjadi 792 unit yang terdiri dari 677 koperasi aktif dan 115 koperasi tidak aktif. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 2 tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Untuk mencapai kinerja pada indikator sasaran persentase koperasi aktif tersebut, beberapa kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi:

- a. Bimbingan Teknis Perkoperasian Bagi Koperasi Baru
- b. Bimbingan Teknis Akuntansi Dasar bagi Koperasi
- c. Bimbingan Teknis Pengawasan bagi Pengawas Koperasi
- d. Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan Koperasi
- e. Bimbingan Teknis Sistem Operasional Prosedur dan Sitem Operasional Manajemen
- f. Pengendalian KSP/USP
- g. Bimbingan Teknis Koperasi bagi Pengurus Koperasi Kabupaten Madiun
- h. Pemberdayaan Usaha Koperasi di Sekitar Kawasan Obyek Wisata
- i. Bimbingan Teknis Manajemen Bagi Koperasi Retail
- j. Pelatihan Pembukuan/Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi Wanita /KLJK / UJKS

Jumlah anggota koperasi mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya 115 koperasi yang tidak aktif yang masih dalam taraf pengusulan untuk dibubarkan.

Tabel 2.38
Perkembangan Koperasi Tahun 2014 - 2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Koperasi	707	728	785	790	792
2	Koperasi aktif	591	612	669	674	677
3	Jumlah Anggota Koperasi	195.185	196.581	198.284	210.579	146.877
4	Jumlah Simpanan Sendiri	156.655.054.000	156.637.928.000	163.457.511.000	181.314.092.000	185.879.345.000
5	Volume usaha	519.579.780.000	53.817.4819.000	541.880.091.000	723.044.647.000	752.571.615.000
6	SHU	20.549.440.000	21.462.476.000	21.896.379.000	23.334.986.000	46.427.472.000

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

2.1.3.1.16 Urusan Penanaman Modal

Tumbuhnya pedagang kecil sangat dipengaruhi oleh pembangunan fasilitas-fasilitas umum maupun perkembangan sektor pariwisata. Saat ini Kabupaten Madiun sedang menggali potensi wisata yang berdampak tumbuhnya pedagang kaki lima (PKL). Disamping itu pembangunan Pusat Pemerintahan di Mejayan, Alun-Alun dan Masjid Agung juga berperan menumbuhkan PKL baru. Perkembangan Kota Mejayan menumbuhkan usaha-usaha baru. Yang akan meningkatkan investasi serta daya serap tenaga kerja. Pada tahun 2018 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan mendukung perkembangan usaha khususnya sektor perdagangan yaitu :

- a. Revitalisasi Pasar Tradisional (DAK)
- b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedagang /PKL
- c. Bimbingan Teknis Perijinan
- d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar (Saradan)
- e. Paving Halaman Pasar Sambirejo
- f. Peningkatan Mutu Pasar Muneng
- g. Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Tabel 2.39
Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2014 - 2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Unit Usaha (unit)					
	Pedagang Besar	124	110	115	120	121
	Menengah	714	629	687	731	851
	Kecil	5.123	5.678	6.223	6.586	7.466
2	Nilai Investasi (Juta)					
	Pedagang Besar	67.909	47.554	48.505	49.475	60.475
	Menengah	134.871	112.539	115.915	119.392	233.240
	Kecil	92.761	95.608	99.328	103.301	207.739
3	Daya serap tenaga kerja (orang)					
	Pedagang Besar	1.053	936	954	973	976
	Menengah	2.925	2.459	2.543	2.619	3.969
	Kecil	10.401	9.800	10.192	10.600	11.706

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

2.1.3.1.17 Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan dilaksanakan untuk mengembangkan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai luhur melalui peran aktif masyarakat dan swasta.

Jumlah kegiatan kesenian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 88,48% dibandingkan dengan realisasi di 2016. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Madiun masih giat dalam penyelenggaraan seni dan budaya.

Tabel 2.40
Perkembangan Seni Budaya Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kegiatan kesenian (kali)	419	306	217	409	1705
2	Jumlah grup kesenian	207	333	384	479	309

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga, 2019

2.1.3.1.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Saat ini Kabupaten Madiun mempunyai 24 organisasi pemuda. Organisasi Pemuda didirikan untuk tujuan:

1. Meningkatkan semangat nasionalisme, kesatuan dan persatuan di kalangan pemuda berlandaskan iman dan taqwa serta berakhlak mulia,
2. Meningkatkan kesadaran pemuda untuk memelihara solidaritas, integritas dan mengembangkan profesionalisme pemuda menuju bangsa yang sejahtera dan bermartabat,
3. Memperkokoh integritas kepribadian pemuda yang berjati diri, berakhlak mulia, mandiri dan bertanggung-jawab terhadap kelestarian nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka mempersiapkan pemimpin masa depan yang tangguh dan berakhlak mulia,
4. Memotivasi dan Terbinanya organisasi pemuda untuk berperan dalam pembangunan serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai -nilai moral.

Guna mencapai tujuan dan sasaran dalam pemberdayaan generasi pemuda diperlukan adanya Peran Pemerintah Kabupaten Madiun melalui pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keberadaan organisasi kepemudaan, menciptakan iklim dan komunikasi yang sehat, kondusif dan efektif bagi tersalurnya aspirasi, apresiasi, partisipasi dan kepentingan generasi muda di tingkat Kabupaten sampai tingkat Kecamatan dan Desa serta memfasilitasi dan mengakomodasi program dan kegiatan pemberdayaan generasi muda dengan penyediaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana serta pendayagunaan berbagai fasilitas kepemudaan yang ada.

Tabel 2.41
Perkembangan Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah organisasi pemuda	22	22	24	24	24

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2019

2.1.3.1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan untuk mewujudkan stabilitas daerah yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban; meningkatkan

etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan; serta meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat.

Tabel 2.42
Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)	2	4	4	4	4
2	Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)	2	4	4	4	4

Sumber : Bakesbangpoldagri Kab. Madiun, 2019

2.1.3.1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi antara DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat; meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah; meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan; meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah; mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah; meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum; serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa.

Tabel 2.43
Indikator Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan
Tahun 2014-2018 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	68,04	30,20	27,72	27,72	57,80
2	Rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	17,41	17,41	17,41	17,41	10,59
3	Persentase tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan)	65,00	65,00	76,36	76,36	76,36

Sumber : Satpol PP Kab. Madiun, 2019

2.1.3.1.21 Urusan Ketahanan Pangan

Pembangunan di bidang ketahanan pangan dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui swasembada beras serta pengembangan pangan alternatif; meningkatkan daya guna sarana dan prasarana irigasi; serta mengoptimalkan sistem dan distribusi sarana produksi pertanian.

Ketersediaan Pangan di Kabupaten Madiun mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, ketersediaan pangan utama mengalami kenaikan sebesar 1.881,44 ton dari tahun 2017 sebesar 313.306,29 ton. Demikian pula halnya dengan Scor pola pangan yang juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Madiun cukup baik.

Tabel 2.44
Perkembangan Ketersediaan Pangan Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan pangan utama (ton)	309.084,06	309.456,38	309.600,00	313.306,29	315.187,73
3	Scor Pola Pangan Harapan	89,20	90,40	90,70	90,70	92,4

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Madiun, 2019

2.1.3.1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.1.3.1.23 Urusan Statistik

Urusan statistik dilaksanakan untuk meningkatkan kuantitas dan akurasi data serta meningkatkan akses informasi ke seluruh stakeholder. Untuk buku PDRB telah diterbitkan oleh BPS Kabupaten Madiun, sehingga Bappeda tidak mengalokasikan anggaran lagi.

Tabel 2.45
Indikator Urusan Statistik Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Buku Madiun Dalam Angka	100	100	100	100	100
2	Jumlah Buku PDRB	50	0	0	0	0

Sumber : Bappeda Kab. Madiun, 2018

2.1.3.1.24 Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip serta meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip.

Tabel 2.46
Pengelolaan Kearsipan Tahun 2013-2017
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengelolaan Arsip secara baku	24	30	35	35	38
2	Peningkatan Sumber Daya Pengelola Kearsipan (orang)	55	74	80	80	80

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2018

2.1.3.1.25 Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan akses data dan informasi bagi instansi dan masyarakat; mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi data di instansi; serta mengembangkan sistem pelayanan pemerintahan dan

pembangunan melalui e-Gov. Di Kabupaten Madiun memiliki satu buah *web site* resmi milik pemerintah yaitu www.madiunkab.go.id.

Tabel 2.47
Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2017
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Web Site milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1

Sumber : Bappeda Kab. Madiun, 2018

2.1.3.1.26 Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan buku / bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna; meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan; meningkatkan pembinaan, kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan; serta meningkatkan budaya baca masyarakat.

Tabel 2.48
Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	12.565	16.412	18.956	28.934	31.001
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	24.849	25.337	26.301	27.407	32.600
3	Kunjungan perpustakaan keliling ke daerah (kali)	275	281	274	284	385
4	Banyaknya anggota (orang)	1.906	3.144	4.188	4.521	6.000
5	Rata-rata peminjam (orang/hari)	20	20	24	25	30

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan yang dilaksanakan akan memberikan dampak yang besar bagi :

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Kehadiran investor sangat dipengaruhi oleh kondisi internal daerah seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya. Penanaman modal memberikan keuntungan bagi semua pihak tidak hanya bagi investor saja tetapi juga bagi perekonomian daerah tersebut, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kabupaten Madiun.

Tabel 2.49
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Investor PMDN	345	408	392	427	417
2	Jumlah Investor PMA	0	0	0	1	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Banyaknya nilai investasi PMDN dan PMA maka menunjukkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

Banyaknya realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Tabel 2.50
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2014-2017
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Persetujuan	164.453.717.000	78.107.209.381	58.908.800.000	376.938.367.000
2	Jumlah Realisasi	164.453.717.000	78.107.209.381	58,908,800,000	376.938.367.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018

Perhitungan jumlah investor PMDN/PMA adalah jumlah persetujuan investasi dan ijin SIUP yang baru diterbitkan sebagai representasi dari jumlah investor yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Madiun. Adapun investor adalah perorangan atau lembaga domestic maupun non domestic yang melakukan penanaman modal dalam bentuk investasi langsung berupa pendirian usaha baru baik berskala mikro, kecil, menengah maupun besar.

Tahun 2017 jumlah investor mengalami kenaikan 9 % namun demikian nilai realisasi investasi naik tajam sebesar 540% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam

pelayanan perizinan / non perizinan, promosi investasi wisata serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang semakin baik.

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Peningkatan jumlah realisasi investasi berbanding lurus dengan rasio Daya Serap Tenaga Kerja yang naik signifikan di tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya sejumlah usaha skala besar dan menengah yang cukup menyerap banyak tenaga kerja. Total tenaga kerja yang terserap tahun 2017 adalah sebanyak 4.012 orang yang tersebar pada 428 unit usaha baru.

Tabel 2.51
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio daya serap tenaga kerja	5,07	3,77	2,79	9,37	6,06
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	345	408	392	428	431

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Pelaksanaan Urusan Pilihan di Kabupaten Madiun meliputi:

2.1.3.2.1 Urusan Pertanian

Urusan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan dan ternak; meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan peternak; serta meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.

Tabel 2.52
Indikator Urusan Pertanian Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha) GKG :	69,65	69,39	69,04	69,06	66,65
	Produktivitas Jagung (kw/ha)	69,33	61,08	66,03	67,35	81,47
	Produktivitas kedele (kw/ha)	17,94	19,01	14,72	18,59	15,00
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap	35,02	34,69	34,29	31,63	

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	PDRB (%)					
3	Stock Beras/ Ketersediaan Beras	330.187,59	309.456,38	535.363,05	498.060,38	
4	Sisa Produksi/ Surplus Beras	239.370,82	240.621,57	268.888,86	244.786,29	

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan, 2019

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB semakin menurun pada setiap tahunnya, tahun 2016 menurun sebesar 0,4 % dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena lahan garapan petani yang semakin kecil seiring bertumbuhnya sektor industri dan perdagangan. Begitu pula dari sisi SDM, tenaga kerja produktif lebih tertarik untuk bekerja dibidang perdagangan dan industri yang dianggap lebih menjanjikan dari pada sektor pertanian. Hal ini merupakan tantangan bagi Kabupaten Madiun untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian.

2.1.3.2.3 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 menjadi kewenangan Pusat dan pemerintah Provinsi. Kewenangan yang dimiliki kabupaten dan Kota adalah yang terkait dengan energi baru dan terbarukan.

2.1.3.2.4 Urusan Pariwisata

Peningkatan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Madiun tidak lepas dari peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata melalui program Pengembangan Destinasi Pariwisata dimana program tersebut telah mencakup promosi wisata, pengembangan sarana prasarana pariwisata, serta berbagai macam event/pameran. Untuk mencapai keberhasilan pengembangan pariwisata, harus dilakukan secara koordinatif dan terpadu antar semua pihak terkait sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral dan menghindari terjadinya konflik antar sektor. Berkembangnya sektor pariwisata sangat stretegis untuk mengembangkan semua sektor.

Tabel 2.53
Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kunjungan wisatawan (orang)	357.912	383.299	402.464	313.839	544.781

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2019

2.1.3.2.5 Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan; meningkatkan peran Balai Benih Ikan; serta meningkatkan produksi komoditas perikanan.

Tabel 2.54
Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	3.078,12	3.110,26	3.178,69	3.444,38	3.467,97
2	Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita)	11,72	14,02	14,5	15,10	16,20
	Cakupan bina kelompok perikanan (%)	40	49,72	36	65	72

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan, 2019

2.1.3.2.6 Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional; meningkatkan perlindungan konsumen; serta mengembangkan manajemen usaha, perdagangan dan pengendalian distribusi.

Tabel 2.55
Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Hb (%)	14,97	14,86	14,73	16,13	16,89

Sumber : Hasil Koordinasi Bappeda dengan BPS Kab Madiun, 2019

2.1.3.2.7 Urusan Industri

Urusan industri dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan iptek dalam usaha perekonomian terutama UMKM dan meningkatkan industri mikro dan kecil melalui penguatan modal dan perluasan jaringan pemasaran.

Tabel 2.56
Indikator Urusan Industri Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB Hb (%)	9,76	9,78	9,77	9,78	9,77
2	Pertumbuhan Industri (%)	5,73	6,38	5,96	6,38	5,96

Sumber : Hasil Koordinasi Bappeda dengan BPS Kab Madiun, 2019

2.1.3.2.8 Urusan Ketrasmigrasian

Pelaksanaan Transmigrasi Umum di Kabupaten Madiun Tahun 2014-2018 mengalami stagnasi dibanding tahun 2017. Hal ini disebabkan karena semakin sempitnya Lahan/Lokasi Transmigrasi Umum dan kebijakan Pemerintah Pusat terfokus pada pengembangan wilayah Transmigrasi yang sudah ada agar lebih mandiri.

Sedangkan Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Kabupaten Madiun Tahun 2014-2018 tidak ada. Hal ini disebabkan Kabupaten Madiun tidak mendapatkan Jatah Pagu Pemberangkatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Tabel 2.57
Indikator Urusan Ketrasmigrasian Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Transmigrasi Umum					
	KK	15	15	15	2	2
	Jiwa	56	94	55	10	7
2	Transmigrasi Swakarsa Mandiri					
	KK	0	0	0	0	0
	Jiwa	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Gambaran umum kondisi daerah terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Tabel 2.58
Indikator Daya Saing Daerah Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Kriminalitas	340	252	260	231	181

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2019

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Angka konsumsi RT perkapita), Nilai Tukar Petani (NTP) dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) .

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Angka konsumsi RT perkapita)

Indikator angka konsumsi RT perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat capaian kecukupan konsumsi rumah tangga perkapita. Semakin besar angka konsumsi RT perkapita berarti semakin besar bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Tabel 2.58
Angka Konsumsi RT perkapita Tahun 2014 s.d 2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*)
1	Total PengeluaranPerkapita/bln	613.002	756.591	754.570	805.295	922.114
2	Jumlah RT	200.198	200.364	200.928	201.139	201.691
3	Rasio (1./2.)	3.0	3,77	3,75	4.00	4.57

Sumber: Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS

*)Angka Sementara

b. Nilai Tukar Petani

Kesejahteraan petani yang diindikasikan melalui Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan perbandingan atau rasio antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib).

Arti Angka NTP, yaitu :

- $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Kegunaan dan Manfaat

- Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
- Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.
- NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
- Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Cakupan Komoditas

- Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija
- Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan
- Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antara daerah
- Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
- Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya

NTP di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan Petani sudah mampu mencukupi kebutuhan faktor produksi pertanian dan konsumsi sehari-hari dari hasil usaha bertani.

Tabel 2.59
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014 - 2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*)
1	NTP / Indeks Yang Diterima Petani (It)	102,29	106,15	108,13	106,25	106,59

Sumber: Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS

*)Angka Sementara

- c. pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Indikator angka konsumsi non pangan perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat capaian kecukupan konsumsi non pangan rumah tangga perkapita. Semakin besar angka konsumsi non pangan perkapita berarti semakin besar bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Tabel 2.60
Persentase Konsumsi RT non-Pangan Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Total Pengeluaran RT non Pangan	302.074	399.043	421.703	422.919	478.249
2	Total Pengeluaran	608,632	756,591	829,647	805.295	922.114
3	Rasio	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2

Sumber: Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS

*)Angka Sementara

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2010-2030 memuat rencana struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten. Rencana struktur ruang memuat rencana sistem perkotaan dan infrasturktur wilayah. Rencana pola ruang memuat rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya.

Kabupaten Madiun merupakan kabupaten dengan hirarki perkotaan berdasar RTRW Provinsi Jawa Timur adalah Pusat Pelayanan Lokal (PKL) yang merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Madiun, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pertanian, perdagangan dan jasa.

Sektor unggulan Kabupaten Madiun adalah sektor pertanian, hal ini terlihat dari sektor utama yang menunjang PDRB adalah pertanian tanaman pangan, sehingga data wilayah produktif adalah wilayah kawasan pertanian, sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan non pertanian.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Kondisi keamanan dan politik di Kabupaten Madiun yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investor.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Madiun. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Madiun.

Gambaran umum kondisi daerah dan aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

a. Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan di Kabupaten Madiun adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Tabel 2.63
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2014-2018
Kabupaten Madiun

No	Tingkat Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah lulusan S1	17.671	17.961	18.769	20.256	21.294
2	Jumlah lulusan S2	1.029	1.071	1.097	1.175	1.220
3	Jumlah lulusan S3	31	28	26	30	31
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	18.731	19.060	19.892	21.461	22.545
5	Jumlah penduduk	720.768	719.277	725.816	731.329	742.259
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	1 : 38	1 : 38	1 : 36	1 : 34	1 : 32

Sumber : Dispendukcapil, 2019

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang

menanggungnya. Selain itu penduduk usia di atas 64 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan penduduk ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Madiun pada tahun 2018 adalah sebesar 44,12, lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 43,07. Hal ini merupakan tantangan berat bagi Kabupaten Madiun untuk tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kondisi angka ketergantungan yang semakin tinggi.

Tabel 2.64
Rasio Ketergantungan Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	140.116	135.504	129.155	138.456	142.512
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	69.738	74.386	78.001	81.689	84.702
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	209.854	209.890	207.156	220.145	227.214
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	510.914	509.387	512.419	511.184	515.045
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	41,07	41,20	40,42	43,07	44,12

Sumber : Dispendukcapil, 2019

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015 merupakan data dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2018. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut katagori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Aspek evaluasi yang dilakukan mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja atau keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2016-2018 Kabupaten Madiun secara rinci, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.65
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2018
Kabupaten Madiun

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
Dindik	1.011.0 10.115	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		9,955,025,493		7,506,138,426		75,40
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	80 %		89.03 %		111	0,00
	2.161.1 60.115	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA		1,475,075,000		1,412,895,000		95,78
	1.011.0 10.116	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN		26,847,996,492		26,354,556,980		98,16
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	93.25 %		94.36 %		101	0,00
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	76.12 %		73.81 %		97	0,00
		Rata-rata lama sekolah	7.29 tahun		7.3 tahun		100	0,00
		Angka Harapan Lama Sekolah	1.362		1.312		96	0,00
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	103.5 %		103.47 %		100	0,00
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	97.68 %		97.66 %		100	0,00
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	100 %		107.7 %		108	0,00
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	100 %		76.56 %		77	0,00
		Rasio Guru : Murid SD	1		11		1,10 0	0,00
		Rasio Guru : Murid SMP	1		12		1,20 0	0,00
		Persentase sekolah kondisi bangunan baik SD/MI	87.11 %		91.74 %		105	0,00
		Persentase sekolah kondisi bangunan baik SMP/MTs	89.36 %		92.96 %		104	0,00
		Angka Kelulusan SD/MI	100 %		100.88 %		101	0,00
		Angka Kelulusan SMP/MTs	100 %		95.46 %		95	0,00
		Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	77.79 %		90.99 %		117	0,00
		Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	95.45 %		96.77 %		101	0,00
	1.011.0 10.118	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL		440,850,000		348,803,300		79,12
		Angka Melek Huruf	89.52 %		91.71 %		102	0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
	1.011.0 10.120	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		11,947,400,000		11,815,861,400		98,90
		Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	94.85 %		95.32 %		100	0,00
	1.011.0 10.122	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN		1,376,086,700		1,244,072,900		90,41
		Persentase Data Pendidikan yang Tersinkronisasi Tepat Waktu	100 %		100 %		100	0,00
	1.011.0 10.123	PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		52,086,384,114		52,028,343,885		99,89
								0,00
Dinkes	1.021.0 20.115	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN		67,940,000		76,933,600		113,24
		Cakupan Ketersediaan Obat Esensial	100 %		100 %		100	0,00
		Cakupan Ketersediaan Obat Generik	100 %		100 %		100	0,00
	1.021.0 20.116	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		29,451,810,307		19,163,344,144		65,07
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	12		12		100	0,00
	1.021.0 20.117	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		215,605,000		209,543,000		97,19
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian	74 %		74.67 %		101	0,00
	1.021.0 20.119	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		2,298,984,000		1,283,198,350		55,82
		Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	65.48 %		49.67 %		76	0,00
	1.021.0 20.120	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT		398,444,000		273,727,350		68,70
		Persentase Balita Gizi Buruk	0.42 %		0.25 %		60	0,00
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %		100 %		100	0,00
	1.021.0 20.121	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT		1,629,730,500		1,056,184,500		64,81
		Cakupan rumah yang memenuhi sanitasi dasar	73.2 %		79.03 %		108	0,00
	1.021.0 20.122	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR		2,580,604,850		1,503,704,274		58,27
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95 %		68.93 %		73	0,00
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	73 %		54.7 %		75	0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		Cakupan Penemuan dan penanganan DBD	100 %		100 %		100	0,00
	1.021.0 20.123	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN		199,975,700		175,329,500		87,68
		Persentase tenaga kesehatan memenuhi standar	100 %		87 %		87	0,00
		Persentase sarana kesehatan memenuhi standar	100 %		94.55 %		95	0,00
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	63.65 %		4.86 %		8	0,00
		Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %		3 %		3	0,00
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	26.6 %		32.77 %		123	0,00
		Persentase penyandang Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		13.05 %		13	0,00
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	90.3 %		47.75 %		53	0,00
		Persentase Pos UKK yang terbentuk di wilayah puskesmas	33 %		50 %		152	0,00
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan keluarga bagi anak SD	85 %		50 %		59	0,00
		Persentase jamaah haji yang diperiksa kebugarannya	92 %		101.22 %		110	0,00
		Cakupan Pelayanan Kesehatan jamaah haji	100 %		114.86 %		115	0,00
		Persentase kesehatan dengan alat kesehatan memenuhi standar	100 %		68.97 %		69	0,00
		Cakupan sarana kesehatan penunjang yang memenuhi standar	0 %		100 %		0	0,00
		Persentase pelayanan kesehatan tradisional memenuhi standar	45 %		47.62 %		106	0,00
		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 %		100 %		100	0,00
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100 %		100 %		100	0,00
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100 %		49.72 %		50	0,00
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100 %		45.74 %		46	0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %		47.91 %		48	0,00
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		38.78 %		39	0,00
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %		0 %		0	0,00
		Rasio dokter per satuan penduduk	026		006		23	0,00
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	031		009		29	0,00
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	80 %		91.15 %		114	0,00
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100 %		91.49 %		91	0,00
		Cakupan Pelayanan Nifas	95 %		91.29 %		96	0,00
	1.021.0 20.124	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN		1,513,285,500		1,447,086,975		95,63
		Angka Usia Harapan Hidup	70.46 tahun		70.75 tahun		100	0,00
	1.021.0 20.125	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKEMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA		16,094,254,882		11,696,821,579		72,68
		Persentase kecukupan sarana dan prasarana di laboratorium kesehatan, puskesmas dan jaringannya dalam kondisi baik	0 %		0 %		0	0,00
		Rasio puskesmas per satuan penduduk	0.038		0.038		100	0,00
		Rasio Poliklinik per satuan penduduk	02		013		65	0,00
		Rasio Pustu per Satuan penduduk	009		009		100	0,00
	1.021.0 20.128	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN		11,040,000,000		11,002,257,000		99,66
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat PBI-D	0 %		0 %		0	0,00
	1.021.0 20.129	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA		84,430,000		0		0,00
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	80 %		63.69 %		80	0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		Rasio Posyandu per Satuan Balita	1.306		1.907		146	0,00
	1.021.0 20.130	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA		21,009,800		18,289,800		87,05
		Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia dan lansia	68 %		3 %		4	0,00
	1.021.0 20.132	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK		834,302,100		433,230,700		51,93
		Persentase pelayanan kesehatan ibu	0 %		68.98 %		0	0,00
		Angka Kematian Ibu (per 1.000 LH)	102		1.576		155	0,00
	1.021.0 20.134	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK		453,056,500		447,340,631		98,74
		Cakupan puskesmas	173.33 %		173.33 %		100	0,00
	1.021.0 20.135	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)		3,686,158,984		3,070,861,150		83,31
		persentase pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP se Kab. Madiun	100 %		0 %		0	0,00
		Jumlah masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Pada FKTP yang mendapat pelayanan kesehatan (Kapitasi)	7890 jiwa		0 jiwa		0	0,00
	1.021.0 20.137	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) PUSKESMAS		30,867,663,345		24,258,880,786		78,59
	1.021.0 20.138	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL		7,264,670,000		6,620,157,699		91,13
								0,00
RSUD Caruban	1.021.0 20.226	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA		32,255,741,725		29,304,735,101		90,85
		Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	100 %		0 %		0	0,00
VII	1.021.0 20.227	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA		2,337,500,000		2,107,637,405		90,17
		Jumlah sarana prasarana Rumah Sakit yang	0		0		0	0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		terpelihara						
VIII	1.021.0 20.233	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT		28,889,357,976		24,525,121,222		84,89
		Tercapainya Standard Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	90 %		88.28 %		98	0,00
IX	1.021.0 20.238	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL		900,000,000		576,004,305		64,00
								0,00
RSUD Dolopo	1.021.0 20.326	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA		19,007,750,576		18,479,204,558		97,22
	1.021.0 20.327	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA		1,213,032,000		1,208,067,310		99,59
	1.021.0 20.328	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN		148,000,000		141,969,960		95,93
	1.021.0 20.333	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT		11,202,229,960		10,817,214,099		96,56
	1.021.0 20.338	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL		1,272,278,053		1,211,090,852		95,19
								0,00
Dinas PUPR	1.031.0 30.107	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN		71,137,089,063		65,167,651,390		91,61
		Persentase Panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik	50.3 %		49.3 %		98	0,00
	1.031.0 30.115	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN		7,323,318,345		6,453,867,000		88,13
		Persentase jembatan kondisi baik	88.56 %		93.97 %		106	0,00
	1.031.0 30.116	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG		4,522,000,000		3,931,039,750		86,93
		Panjang jalan yang memiliki drainase / saluran pembuangan air (m)	0		0		0	0,00
	1.031.0 30.118	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN		15,174,340,000		13,647,860,997		89,94

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		Panjang jalan kab dalam kondisi baik (> 40km/jam)	6.254		6.491		104	0,00
	1.031.0 30.123	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN		1,550,000,000		1,060,158,750		68,40
		Persentase pemenuhan sarana prasarana kebinamargaan	0		0		0	0,00
	1.031.0 30.124	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA		44,890,843,000		43,368,007,690		96,61
		Rasio Jaringan Irigasi	1.331		0		0	0,00
X	1.031.0 30.126	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI,DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA		44,615,000		44,464,900		99,66
XI	1.031.0 30.128	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR		7,641,450,000		7,613,378,400		99,63
		Persentase penanggulangan bencana banjir	5.5 %		0 %		0	0,00
XII	1.031.0 30.130	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN		12,518,651,000		10,905,767,300		87,12
		Presentase peningkatan pembangunan jalan pedesaan	0 %		0 %		0	0,00
		Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih (rumah tangga)	18730 Rumah Tangga		18380 Rumah Tangga		98	0,00
XIII	1.031.0 30.131	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH		26,609,448,000		24,205,376,600		90,97
		Jumlah Gedung pemerintahan	2 unit		2 unit		100	0,00
XIV	1.031.0 30.132	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG		61,500,000		45,292,400		73,65
		Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100 %		100 %		100	0,00
XV	1.031.0 30.137	PROGRAM JASA KONSTRUKSI		281,470,400		74,924,701		26,62
								0,00
Dinas Perkim	2.041.0 40.115	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH		78,100,000		32,178,850		41,20
	1.041.0 40.115	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		1,600,164,140		1,505,452,291		94,08
		Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)	185368 rumah		181440 rumah		98	0,00
	1.041.0 40.117	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS		214,950,000		194,980,044		90,71

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		PERUMAHAN						
		Jumlah wilayah kumuh yang tertangani	0 desa		0 desa		0	0,00
	2.041.0 40.117	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN		205,400,000		141,163,229		68,73
	1.041.0 40.121	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH		7,275,400,000		7,000,785,150		96,23
								0,00
Bakesbang Poldagri	1.051.0 50.115	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN		995,700,000		926,243,000		93,02
	1.051.0 50.116	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL		40,075,000		39,567,500		98,73
	1.051.0 50.117	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		333,900,000		293,715,000		87,96
		Jumlah Kegiatan Ketahanan Kebangsaan	0		0		0	0,00
	1.051.0 50.118	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		156,245,000		138,610,000		88,71
	1.051.0 50.121	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT		1,101,445,000		932,821,588		84,69
		Angka kriminalitas	235		0		0	0,00
		Kegiatan pembinaan politik daerah	4		4		100	0,00
		Jumlah LSM	64 LSM		1 LSM		2	0,00
		Jumlah demo	27 kali		11 kali		41	0,00
								0,00
Satpol PP	1.051.0 50.216	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL		1,143,500,000		498,741,350		43,62
		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	125		0		0	0,00
		Angka Kriminalitas	235		247		105	0,00
	1.041.0 40.219	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN		45,930,000		34,055,000		74,15
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	78 %		14.28 %		18	0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
	1.051.0 50.221	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT		1,098,025,000		445,615,000		40,58
								0,00
Dinsos	1.061.0 60.115	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA		2,011,143,500		1,985,754,960		98,74
		PMKS yg memperoleh bantuan sosial	150 orang		308959 orang		205,973	0,00
	1.061.0 60.116	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		250,450,000		200,541,350		80,07
		Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0.28 %		0.75 %		268	0,00
	1.061.0 60.119	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /PANTI JOMPO		300,000,000		292,934,200		97,64
		Jumlah sarana dan prasarana sosial	13 unit		15 unit		115	0,00
								0,00
BPBD	1.051.0 50.222	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM		996,666,000		844,760,000		84,76
		Jumlah relawan bencana Kabupaten	60 orang		60 orang		100	0,00
		Jumlah desa tangguh bencana yang terlatih	2 desa		2 desa		100	0,00
								0,00
Disnaker	3.082.0 80.115	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI		23,425,000		12,070,000		51,53
	2.012.0 10.116	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA		132,880,000		59,598,050		44,85
		Angka partisipasi angkatan kerja	70.25 %		66.2 %		94	0,00
	2.012.0 10.117	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN		104,990,000		90,950,000		86,63
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	475 perusahaan		0 perusahaan		0	0,00
								0,00
Dinas PPKB	2.082.0 80.115	PROGRAM KELUARGA BERENCANA		7,724,611,700		5,127,102,483		66,37
		Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif	75 %		76.35 %		102	0,00
		Ratio penyuluh KB/ petugas lapangan KB untuk setiap	36.41 %		0 %		0	0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		desa/kelurahan						
		Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa (PKBD)	36.4 orang/desa		0 orang/desa		0	0,00
	2.082.0 80.116	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA		150,000,000		125,050,000		83,37
		Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan selama masa reproduksinya(TFR)	2.05 anak		2.02 anak		99	0,00
		Laju Pertumbuhan Penduduk	0.305		028		92	0,00
		Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun	081		751		927	0,00
	2.022.0 20.117	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN		309,760,000		302,724,825		97,73
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	9.155		9.157		100	0,00
		presentase angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	100 %		100 %		100	0,00
		Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	20 unit		20 unit		100	0,00
	2.022.0 20.119	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN ANAK		421,930,000		344,304,600		81,60
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	100 %		100 %		100	0,00
								0,00
DisKP	2.032.0 30.115	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN		1,645,864,100		1,363,609,886		82,85
		Ketersediaan pangan utama	313306289 ton		314774475 ton		100	0,00
		Skor Pola Pangan harapan (PPH)	924		907		98	0,00
		Ketersediaan Regulasi ketahanan pangan	0		1		0	0,00
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	90 %		100 %		111	0,00
								0,00
DLH	2.052.0 50.115	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH		5,373,705,500		1,740,881,700		32,40

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		Persentase Penanganan Sampah (Persentase Sampah yang Terangkut)	28.92 %		27.23 %		94	0,00
		Rasio Tempat Penampungan Sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	0.05 %		0.047 %		94	0,00
	2.052.0 50.116	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		3,082,156,300		1,676,788,681		54,40
		Persentase Pemantauan Pencemaran Status Mutu Air	58.06 %		51.61 %		89	0,00
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	7.405		7.952		107	0,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	87		8.641		99	0,00
		Indeks Kualitas Air (IKA)	57		56		98	0,00
		Indeks Tutupan Hutan (ITH)	933		932		100	0,00
	1.032.0 30.116	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG		0		0		0,00
	2.052.0 50.117	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM		2,557,075,000		894,095,294		34,97
	1.032.0 30.118	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN		250,000,000		98,429,000		39,37
	1.042.0 40.120	PROGRAM PENGELOLAAN AREA PEMAKAMAN		200,000,000		162,144,500		81,07
		Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk	0.314		0.315		100	0,00
	2.052.0 50.124	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)		4,727,507,550		3,719,915,750		78,69
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Wilayah ber HPL/HGB	914		912		100	0,00
	2.052.0 50.125	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		0		0		0,00
	1.032.0 30.136	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS		200,000,000		199,469,000		99,73
								0,00
Dispend ukcapil	2.062.0 60.115	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		4,415,548,150		4,122,492,700		93,36
		Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP)	92		94		102	0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		Rasio bayi berakta kelahiran (persentase kepemilikan Akta Kelahiran	82		8.821		108	0,00
		Rasio pasangan berakte nikah	1		1		100	0,00
		Kepemilikan akta kelahiran per seribu penduduk	746		882		118	0,00
		Rasio Penduduk yang ber KK	92		85		92	0,00
								0,00
IV	2.072.0 70.115	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN		764,486,000		751,599,950		98,31
		Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total desa	15 %		12.62 %		84	0,00
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	63 kelompok		65.3 kelompok		104	0,00
		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi	12.1 %		9.7 %		80	0,00
V	2.072.0 70.116	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN		470,095,000		450,141,000		95,76
		Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	79 %		78 %		99	0,00
		Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi pengembangan usahanya	63.6 %		41.8 %		66	0,00
VI	2.072.0 70.117	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA		733,575,000		709,417,390		96,71
		Persentase Desa yang Berpartisipasi Aktif dalam Kegiatan Pembangunan Desa	71 %		69.2 %		97	0,00
		Persentase PKK aktif	100 %		100 %		100	0,00
VII	2.072.0 70.118	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA		266,300,000		254,592,000		95,60
		Jumlah aparatur desa yang mendapat pembinaan	441 orang		792 orang		180	0,00
VIII	4.012.0 10.119	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA		468,150,000		454,155,850		97,01
		Persentase desa yang telah melaksanakan tata kelola pemerintahan desa yang baik	75 %		100 %		133	0,00
								0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
Dishub	2.092.0 90.116	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ		199,500,000		196,900,000		98,70
		Sarana Fasilitas LLAJ yang Berfungsi Baik	0		0		0	0,00
V	3.052.0 50.117	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN		14,819,879,300		14,342,373,222		96,78
VI	2.092.0 90.117	POGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN		1,111,120,000		955,128,680		85,96
		Jumlah uji kir angkutan umum	4327 unit		5071 unit		117	0,00
VII	2.092.0 90.119	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS		856,350,000		699,749,000		81,71
		Persentase pemasangan rambu-rambu	100 %		96 %		96	0,00
		Persentase pemasangan warning light	100 %		100 %		100	0,00
		Persentase pemasangan marka	98.83 %		99 %		100	0,00
		Persentase pemasangan guardrail	100 %		83 %		83	0,00
		Persentase Jumlah halte yang tersedia	75 %		2 %		3	0,00
VIII	2.092.0 90.120	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR		638,000,000		594,527,500		93,19
		Persentase kendaraan yang layak jalan	114.4 %		116 %		101	0,00
		Panjang median jalan dalam kondisi baik	10200 meter		9000 meter		88	0,00
								0,00
Diskominfo	2.102.1 00.115	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA		3,783,767,300		3,548,202,943		93,77
		Jumlah PD yang telah memiliki jaringan internet	52 Perangkat Daerah		52 Perangkat Daerah		100	0,00
	2.142.1 40.115	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH		207,855,000		203,507,800		97,91
		Tersedianya Buku Kabupaten Madiun Dalam Angka, Buku PDRB Kabupaten dan Dokumen Statistik Daerah yang tersusun	0		0		0	0,00
	2.102.1 00.117	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI		358,590,000		242,499,000		67,63
		Pelaksanaan desiminasi informasi kepada masyarakat melalui	6 kali		12 kali		200	0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		media masa radio						
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM Tingkat Kecamatan	100 %		0 %		0	0,00
		Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif	53		47		89	0,00
		Pelaksanaan desiminasi informasi kepada masyarakat melalui media media interpersonal / sarasehan	12 kali		0 kali		0	0,00
	2.102.100.118	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA		1,317,400,000		1,337,294,250		101,51
		Jumlah Pertemuan dengan Media Massa	3 kali		6 kali		200	0,00
								0,00
Dinas Perdagkop UM	3.062.060.115	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		795,728,500		716,836,342		90,09
		Jumlah kasus peredaran barang ilegal dan tidak memenuhi standar	0		0		0	0,00
VI	2.112.110.115	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUKSIF		136,300,000		64,573,500		47,38
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	93.43 %		0 %		0	0,00
VII	3.072.070.116	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH		461,395,000		432,627,300		93,77
		Cakupan bina kelompok pengrajin	21 %		19 %		90	0,00
VIII	2.112.110.118	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI		906,649,500		727,244,900		80,21
		Jumlah koperasi	730 unit		0 unit		0	0,00
IX	3.062.060.118	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		7,285,591,500		6,395,289,064		87,78
		Revitalisasi pasar desa	0		0		0	0,00
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	31 %		32.7 %		105	0,00
X	3.062.060.119	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN		100,000,000		96,413,300		96,41
		Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina	450 orang		447 orang		99	0,00
XI	2.112.110.119	PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL		1,230,000,000		1,092,673,597		88,84
XII	3.062.060.120	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PASAR		967,850,000		872,897,504		90,19
								0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
DPMPPTSP	2.122.1 20.115	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI		245,000,000		242,944,220		99,16
		Jumlah investor (PMDN/PMA)	420 unit		428 unit		102	0,00
	3.052.0 50.115	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN		94,000,000		92,000,000		97,87
		Persentase pengawalan panas bumi	0 %		0 %		0	0,00
		Jumlah pemetaan potensi pertambangan mineral dan panas bumi (lokasi)	0 lokasi		0 lokasi		0	0,00
		Persentase Pertambangan tanpa ijin	10 %		0 %		0	0,00
	2.122.1 20.116	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI		498,802,000		437,954,700		87,80
		Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	792442066 00Rupiah		736986093 381Rupiah		930	0,00
	3.052.0 50.117	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN		20,000,000		20,000,000		100,00
								0,00
Disparpora	3.022.0 20.115	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA		1,696,640,000		1,689,543,400		99,58
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	0.04 %		0.04 %		100	0,00
	3.022.0 20.116	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA		3,503,320,000		3,423,253,200		97,71
		Jumlah Kunjungan wisata	390713 orang		318313 orang		81	0,00
	2.132.1 30.116	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN		644,320,000		616,131,000		95,63
		Jumlah Aktivitas dan Pengembangan Kepemudaan	8		7		88	0,00
		Jumlah Organisasi Olah raga	18		16		89	0,00
	3.022.0 20.117	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN		669,300,000		668,020,000		99,81
		Jumlah pelaku usaha pariwisata	112		66		59	0,00
	2.132.1 30.119	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH RAGA		44,000,000		38,040,000		86,45
	2.132.1 30.120	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA		913,990,000		821,334,000		89,86

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		Jumlah pembinaan pemuda dan olah raga	0 orang		250000 orang		0	0,00
	2.132.1 30.121	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA		50,000,000		48,400,000		96,80
								0,00
Dinas Perpus	2.182.1 80.115	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN		195,000,000		173,456,675		88,95
		Pengelolaan arsip secara baku	25 %		35 %		140	0,00
	2.172.1 70.115	PROGRAM PENGEMBANGAN MINAT BUDAYA BACA		1,114,656,550		1,031,730,649		92,56
	2.182.1 80.116	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH		218,046,000		216,810,000		99,43
	2.172.1 70.116	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN		177,565,500		152,220,975		85,73
		Jumlah SDM pengelola perpustakaan yang mengikuti Bimtek	0		0		0	0,00
								0,00
Diperta	3.033.0 30.115	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI		890,649,000		845,943,450		94,98
		Cakupan bina kelompok pertanian	89.53 %		85.56 %		96	0,00
		Nilai Tukar Petani	11.253		0		0	0,00
VI	3.033.0 30.116	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEB UNAN		241,930,000		191,737,500		79,25
		Ketersediaan dan cadangan bahan pangan beras	0 Ton		0 Ton		0	0,00
VII	3.033.0 30.117	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEB UNAN		1,135,520,800		1,121,428,290		98,76
		Penggunaan pupuk organik	0		0		0	0,00
VIII	3.033.0 30.118	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEB UNAN		2,480,145,000		2,330,191,375		93,95
		Produksi pertanian tanaman pangan utama (padi)	541942 ton		541250.844 ton		100	0,00
		Produksi pertanian tanaman pangan utama (jagung)	58537.8 ton		59126.565 ton		101	0,00
		Produksi pertanian tanaman pangan utama (kedelai)	0 ton		0 ton		0	0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		Produksi Tanaman Hortikultura (mangga)	38335 pohon		37684.24 pohon		98	0,00
		Produksi komoditas perkebunan Utama Tebu gula rakyat (kristal gula)	45206.7 ton		19225 ton		43	0,00
		Produksi komoditas perkebunan Utama Kakao (biji kering)	1144.8 ton		848.9 ton		74	0,00
		Produksi komoditas perkebunan Utama Cengkeh (bunga kering)	362 ton		360.73 ton		100	0,00
		Produksi komoditas perkebunan Utama Porang	1144		8.489		74	0,00
		Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama (Padi)	69.13 Kw/Ha		69.06 Kw/Ha		100	0,00
		Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama (Jagung)	67.35 Kw/Ha		67.35 Kw/Ha		100	0,00
		Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama (Kedelai)	18.58 Kw/Ha		18.59 Kw/Ha		100	0,00
		Produktivitas Tanaman Hortikultura (Durian)	1.33 Kw/Pohon		1.32 Kw/Pohon		99	0,00
		Produktivitas Tanaman Hortikultura (Mangga)	0.42 Kw/Ha		0.44 Kw/Ha		105	0,00
		Luas Areal Tanaman Komoditas Perkebunan (Tebu Rakyat)	11834 Ha		2746.56 Ha		23	0,00
		Luas Areal Tanaman Komoditas Perkebunan (Kakao)	6831 Ha		4307 Ha		63	0,00
		Luas Areal Tanaman Komoditas Perkebunan (Cengkeh)	1751 Ha		1786 Ha		102	0,00
IX	3.033.0 30.119	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN		639,884,250		606,423,800		94,77
		Jumlah Penyuluh Ahli	0 orang		0 orang		0	0,00
X	3.033.0 30.120	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK		181,650,000		181,650,000		100,00
		Penyakit Ternak yang Tertangani	11825 ekor		11415 ekor		97	0,00
XI	3.013.0 10.120	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN		950,973,000		892,554,000		93,86
		Jumlah produksi perikanan budidaya	5558.37 ton		3444.38 ton		62	0,00
		Cakupan bina kelompok perikanan	88		65		74	0,00
XII	3.033.0 30.121	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN		509,640,000		506,438,500		99,37
		Populasi produksi komoditas peternakan utama (Sapi Potong)	62404 ekor		62099 ekor		100	0,00
		Populasi produksi komoditas peternakan utama (Sapi Perah)	197 ekor		205 ekor		104	0,00
		Populasi produksi komoditas peternakan	80930 ekor		76445 ekor		94	0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		utama (Kambing)						
		Populasi produksi komoditas peternakan utama (Domba)	23191 ekor		22667 ekor		98	0,00
		Populasi produksi komoditas peternakan utama (Ayam Buras)	1690820 ekor		1634883 ekor		97	0,00
		Populasi produksi komoditas peternakan utama (Ayam Petelur)	203313 ekor		297308 ekor		146	0,00
		Populasi produksi komoditas peternakan utama (Ayam Pedaging)	310534 ekor		307688 ekor		99	0,00
		Populasi produksi komoditas peternakan utama (Itik)	43662 ekor		42267 ekor		97	0,00
XIII	3.013.0 10.121	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP		134,025,000		128,305,000		95,73
XIV	1.063.0 60.122	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL		170,000,000		167,284,094		98,40
XV	3.033.0 30.122	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN		424,820,000		314,342,500		73,99
XVI	3.013.0 10.123	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN		85,500,000		80,679,250		94,36
		Tingkat konsumsi ikan masyarakat	16.16 kg/kapita		15.1 kg/kapita		93	0,00
XVII	3.033.0 30.123	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN		187,990,000		187,990,000		100,00
XVIII	3.033.0 30.124	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU		250,000,000		246,042,650		98,42
XIX	3.033.0 30.126	INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT OF IRIGATAITON PROGRAM (IPDMIP)		75,000,000		55,025,000		73,37
XX	1.033.0 30.130	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN		6,832,002,250		6,739,382,000		98,64
								0,00
Bag Adm Pemerintah ahan	4.014.0 10.316	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH		15,000,000		6,562,500		43,75
VI	4.014.0 10.327	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU		551,804,480		492,689,500		89,29
VII	4.014.0 10.328	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNGJAWA BAN KEUANGAN		369,361,250		305,086,340		82,60

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		DAN KINERJA DAERAH						
		Peringkat nasional laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	24		17		71	0,00
								0,00
Bag Hukum	4.014.0 10.306	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		20,850,000		19,916,000		95,52
	4.024.0 20.320	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH		188,000,000		68,300,000		36,33
	4.024.0 20.322	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN		20,000,000		16,227,000		81,14
	4.014.0 10.323	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI		153,150,000		140,450,000		91,71
		Persentase Produk Hukum Daerah yang Dipublikasikan melalui JDIIH	80 %		0 %		0	0,00
		Jumlah lembaran Daerah dan Berita Daerah yang Dicitak	240 buah		0 buah		0	0,00
	4.014.0 10.326	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		1,023,000,000		948,771,104		92,74
		Jumlah produk hukum yang diterbitkan	40 buah		67 buah		168	0,00
								0,00
Bag Adm Pemanfaatan	4.044.0 40.317	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH		93,215,000		69,312,500		74,36
								0,00
Bag Perlengkapan	2.044.0 40.316	PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH		162,990,500		109,800,520		67,37
								0,00
Bag Kesra	1.064.0 60.323	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN KEAGAMAAN		3,347,825,000		3,012,724,900		89,99
								0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
Bag Umum	4.014.0 10.316	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH		1,264,686,000		1,157,442,888		91,52
		Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200 kali		0 kali		0	0,00
		Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan Wakil Kepala Daerah	190 kali		0 kali		0	0,00
								0,00
Bag Perekonomian	3.024.0 20.315	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA		194,212,000		194,081,500		99,93
	2.124.1 20.315	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI		18,725,000		15,625,000		83,44
	3.064.0 60.315	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		698,325,000		680,676,050		97,47
	2.054.0 50.316	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		50,900,000		47,536,000		93,39
	3.034.0 30.318	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN		3,140,000		3,139,900		100,00
								0,00
Bappeda	4.074.0 70.121	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1,286,848,000		1,151,317,401		89,47
		Presentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	40 %		100%		250	0,00
		Jumlah inovasi daerah	1 buah		3 buah		300	0,00
VI	4.034.0 30.121	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		4,629,094,000		3,555,337,532		76,80
		Tersedianya Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	0 dokumen		0 dokumen		0	0,00
		Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	0 dokumen		0 dokumen		0	0,00
		Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	2 dokumen		2 dokumen		100	0,00
		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi yang tersedia	5 dokumen		5 dokumen		100	0,00
		Persentase usulan desa yang terakomodir dalam musrenbang kecamatan	60 %		100%		167	0,00

SKPD	Kode Rek	Program Kegiatan/Indikator	Trgt Anggaran & Kinerja s/d 2018		Real Anggaran & Kinerja s/d 2018		Capaian Angg & Kin s/d 2018 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)
		Dokumen LKPJ tepat waktu	0 dokumen		0 dokumen		0	0,00
VII	4.034.0 30.122	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI		1,241,500,000		1,062,006,890		85,54
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	0 dokumen		10 dokumen		0	0,00
VIII	4.034.0 30.123	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA		893,850,000		548,154,174		61,33
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya	7 dok		12 dok		171	0,00

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2020 tidak terlepas dari Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Madiun yang merupakan kristalisasi dari isu Strategis yang terjadi di setiap urusan serta berbagai dinamika yang terjadi baik ditingkat internal maupun eksternal. Adapun Isu strategis yang diangkat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;
- b. Tingginya kesadaran/kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan;
- c. Masih terdapat bantuan untuk masyarakat miskin atau rentan miskin tidak tepat sasaran;
- d. Tingginya angkatan kerja yang belum punya keahlian;
- e. Masih kurangnya daya dukung sarpras wilayah permukiman;
- f. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh;
- g. Masih kurangnya daya dukung sarpras keselamatan jalan;
- h. Pengembangan potensi wisata Lereng Gunung Wilis belum Optimal;
- i. Pangsa pasar komoditas perdagangan dan perindustrian masih terbatas dalam wilayah Kabupaten Madiun;
- j. Rendahnya pendapatan Petani;
- k. Pengelolaan persampahan masih belum optimal;
- l. Masih kurangnya kemampuan penanganan bencana;

- m. Belum optimalnya pencegahan, penanganan konflik dan pasca konflik;
- n. Minimnya fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- o. Minimnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor;

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen RKPD Tahun 2020 yang disusun berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 dimana memuat Visi Misi Bupati terpilih 2018 – 2023, serta merujuk pada issue strategis Kabupaten Madiun yang disinkronkan dengan prioritas Pusat, prioritas Provinsi Jawa Timur maka penekanan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat, melalui :
 - a. Peningkatan Mutu Pendidikan SD, SMP Penurunan angka Stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi;
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Gerakan Masyarakat hidup sehat (GERMAS);
 - c. Verifikasi dan validasi data melalui optimalisasi peran SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu), PKH (Program Keluarga Harapan), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan);
 - d. Peningkatan kompetensi tenaga kerja.
2. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, melalui :
 - a. Peningkatan jalan dan jembatan;
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
 - c. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;
 - d. Peningkatan Sarana Keselamatan Jalan.
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, melalui :
 - a. Pengembangan pariwisata Lereng Gunung Wilis;
 - b. Peningkatan Intensitas promosi produk Usaha Mikro.
4. Terjaminnya Ketersediaan Pangan dan Kelestarian Lingkungan Hidup, melalui :
 - a. Peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian;
 - b. Pembudayaan 3R (Reduse, Reuse, Recycle) di masyarakat
5. Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan ASN, melalui :
 - a. Pembentukan Desa tangguh bencana, Tim Jitu Pasma (Pengkajian Penghitungan Pasca Bencana);

- b. Peningkatan Kewaspadaan daerah dengan optimalisasi pengamanan terpadu Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan dan masyarakat;
- c. Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 2.66
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kekurangan Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) meliputi Guru, Pengawas dan Penilik. 2. Belum adanya Pemerataan Guru antar sekolah maupun antar wilayah, khususnya GTT. 3. Perlunya standarisasi dan kesetaraan kualitas sekolah antar wilayah kecamatan 4. Perlunya peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan Kepribadian Berkelanjutan (PKB) 5. Perlunya pengembangan pembinaan karakter siswa, salah satunya dengan menambah ekstrakurikuler Baca Tulis Al Quran pada sekolah negeri. 6. Belum optimalnya fasilitasi dan apresiasi untuk siswa-siswa yang berprestasi
2	Urusan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal 2. Rasio dokter /tenaga medis & Paramedis masih kurang 3. Cakupan pelayanan rujukan maskin rendah 4. Belum semua puskesmas terakreditasi 5. Pemanfaatan alkes belum optimal 6. Kondisi/bangunan fisik puskesmas dan jaringannya masih ada yang tidak memenuhi syarat
3a	Urusan Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio jalan dalam kondisi rusak yang belum tertangani masih cukup banyak. 2. Masih banyak jembatan rusak yang belum tertangani akibat belum terinventarisir atau belum masuk dalam database (Dok SK Bupati). 3. Terbatasnya tenaga pekarya (jalan dan Irigasi) atau operator alat berat serta laborat, karena tidak adanya penambahan pegawai 4. Perlu penambahan alat berat sebagai penunjang pembangunan infrastruktur (Alat berat yang ada sudah terlalu tua dan memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi)

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		5. Revitalisasi kota mejayan sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan masyarakat
		6. Perlunya penanganan / pemeliharaan drainase jalan terutama wilayah perkotaan.
3b	Urusan Penataan Ruang	1. Perlunya penyusunan RDTRK di kawasan jalur Tol Trans Jawa yang selaras dengan rencana pengembangan kawasan.
		2. Belum ada pemetaan secara definitif kawasan LP2B di Kabupaten Madiun
		3. Belum adanya penyusunan RDTRK yang terintegrasi untuk pengembangan Kawasan Pariwisata
		4. Belum seluruh kawasan strategis daerah memiliki RDTRK, sesuai kebijakan Perda RTRW Kab. Madiun No 9 tahun 2011
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh.
		2. Rendahnya daya dukung sarpras wilayah permukiman
		3. Belum terlembaganya sistim penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
		4. Belum tersedianya database kawasan perumahan dan permukiman
		5. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman
		6. Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan perumahan dan pemukiman.
5	Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang dijiwai oleh nilai keagamaan dan budaya lokal perlu dikembangkan lebih optimal.
6	Urusan Sosial/ Kesejahteraan Masyarakat	1. Perlunya peningkatan ketrampilan / lapangan kerja bagi fakir miskin (PMKS).
		2. Penanggulangan kemiskinan (PMKS) berbasis masyarakat masih relatif rendah.
		3. Perlunya penambahan kendaraan operasional pengiriman bantuan untuk pasca bencana.
		4. Kab. Madiun belum memiliki sarana pelayanan dan panti rehabilitasi sosial tingkat kabupate bagi PMKS.
		5. Kab. Madiun belum memiliki Kelembagan Sosial Persatuan Disabilitas tingkat kabupaten.

II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Tenaga Kerja	1. Perlunya optimalisasi pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan.
		2. Peningkatan layanan Perlindungan CTKI/TKI didaerah kantong-kantong TKI belum terkoordinasi dengan baik.
		3. Pengangguran Terbuka di Kabupaten Madiun

II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
		mengalami kenaikan tahun 2013-2016
		4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Madiun mengalami penurunan pada tahun 2013-2016
		5. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) belum memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan hasil kerja mereka.
		6. Pemenuhan pelayanan sistem informasi ketenagakerjaan daerah.
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih dibawah Provinsi Jatim dan nasional.
		2. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan.
		3. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak
		4. Belum maksimalnya pemenuhan hal anak dan implementasi kabupaten layak anak.
3	Urusan Pangan	1. Implementasi program dan kesadaran masyarakat tentang KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) masih kurang maksimal.
		2. Ketersediaan bahan pangan (Sayur, buah dan ikan) belum mencukupi kebutuhan konsumsi / masih mendatangkan dari luar daerah.
		3. Belum terpenuhinya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
		4. Belum terkontrolnya peredaran komoditas bahan pangan utama dari / ke Kab. Madiun.
		5. Program Kelompok Lumbung Pangan masih banyak yang belum aktif.
		6. Belum optimalnya ketersediaan diversifikasi olahan pangan lokal (di kawasan pariwisata)
		7. Pola konsumsi beras sebagai konsumsi utama masyarakat masih cukup tinggi.
		8. Belum berkembangnya Teknologi Tepat Guna secara terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya.
3	Urusan Pertanahan	1. Belum tersedianya data secara menyeluruh mengenai kepemilikan tanah bersertifikat oleh masyarakat
		2. Masih adanya konflik pertanahan antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah daerah.
		3. Masih belum tertibnya pengadministrasian pertanahan
5	Urusan Lingkungan Hidup	1. Masih terdapat sampah sebesar 83% di masyarakat yang belum tertangani ke TPA yang berpotensi menimbulkan pencemaran tanah, air dan udara.
		2. Pembuangan limbah industri dan limbah domestik sebagian masih dibuang ke sungai yang berdampak pada pencemaran sumber air
		3. Perlunya pengawasan terhadap asap cerobong pabrik, asap kendaraan bermotor dan aktivitas pertambangan yang dapat mencemari kualitas udara.
		4. Perlu adanya regulasi tentang penggunaan lahan baik untuk perumahan, gudang dan bangunan pabrik.
6	Urusan Pengendalian Kependudukan dan KB	1. Lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program KKBPK.

II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
		2. Masih tingginya pasangan usia subur yang belum ber KB
		3. Masih rendahnya peserta KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
		4. Kurangnya kepedulian PUS dan remaja terhadap kesehatan reproduksi
		5. Tingginya perkawinan dengan usia Istri < 20 thn
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	1. Perlunya pembinaan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 di tingkat desa
		2. Kompetensi SDM penyelenggara pemerintahan desa masih relatif rendah.
		3. Pengelolaan keuangan dan sistem yang mendukung pengelolaan keuangan masih belum optimal
		4. Hubungan kerja antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya.
		5. Regulasi yang menindaklanjuti pasca program PNPM MPd belum dapat ditindaklanjuti secara optimal. Belum adanya petunjuk teknis operasional yang secara spesifik dan mendetail terkait proses integrasi lembaga ekonomi ke dalam wadah BUMDesa.
		6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diharapkan sebagai sumber kekuatan ekonomi desa belum sepenuhnya mampu berjalan secara optimal.
		7. <i>Bimtek pengelolaan HIPPAM dari 84 Pokmas belum terpenuhi secara keseluruhan.</i>
		8. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi desa (SDA dan TTG)
		9. Pengembangan potensi atau produk unggulan desa (prokudes) belum maksimal
		10. Belum optimalnya database terpadu penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi di perdesaan.
		11. Validitas isian data dan pemanfaatan profil desa dan kelurahan belum berjalan secara optimal.
8	Urusan Perhubungan	1. Pembangunan PUSPEM baru di Mejayan sehingga membutuhkan perencanaan Sarpras transportasi yang baik
		2. Pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Madiun masih perlu didukung oleh Sarpras Lalu lintas yang memadai
		3. Tingginya angka laka lantas ditingkat pelajar yang membutuhkan penanganan kebijakan LLAJ yang tepat dan afirmatif
		4. Sarana Prasarana Lalu Lintas yang belum tersedia maksimal, karena wilayah pelayanan yang relatif luas.
9	Urusan Komunikasi & Informatika	1. Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		2. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi masih belum maksimal
		3. Kelembagaan komunikasi dan informatika belum maksimal
		4. Masih terbatasnya sarana internet untuk diakses oleh masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan.

II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
		5. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah masih belum optimal
10	Urusan Koperasi	1. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi
		2. Masih lemahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga menyulitkan pengembangan usaha
		3. Keterbatasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan Usaha KUMKM.
11	Urusan Penanaman Modal	1. Investasi belum maksimal karena belum ada OPD teknis yang menangani urusan penanaman modal, mengingat KPPT hanya fokus terhadap pelayanan perizinan dan tidak penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan iklim investasi.
		2. Capaian realisasi investasi masih belum memenuhi target RPJMD (Investor yang mengajukan SIUP).
		3. Potensi dan peluang pengembangan investasi belum dikemas dengan menarik dan belum diinformasikan secara luas kepada calon investor
		4. Regulasi teknis terkait penanaman modal belum disusun sebagai pedoman bagi calon investor untuk berinvestasi di Kab. Madiun
		5. Kurangnya kesadaran investor untuk memenuhi kewajiban dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		6. Sebagian investor masih belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya (LKPM) sehingga menghambat pengawasan.
		7. Belum maksimalnya pelaksanaan PTSP di Kab. Madiun.
12	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1. Relatif kecilnya kelompok atau grup kepemudaan. 2. Relatif rendahnya even dan prestasi kepemudanaan dan olah raga daerah.
13	Urusan Statistik	1. Tupoksi pengelola data statistik sektoral belum terwadahi pada struktur kelembagaan OPD (setiap bidang/seksi)
		2. Konsistensi data statistik sektoral belum maksimal
		3. Publikasi data statistik sektoral melalui media komunikasi / multi media belum optimal
14	Urusan Persandian	1. Kualitas dan kapasitas SDM Persandian belum memadai
		2. Sarana dan prasarana persandian masih perlu ditingkatkan.
		3. Kesadaran mengenai keamanan informasi belum berkembang secara optimal di lingkungan ASN Kab Madiun.
15	Urusan Kebudayaan	1. Relatif terbatasnya jumlah dan kualitas sanggar seni di kab. Madiun.
		2. Kurangnya Sarana Prasarana dan SDM Pembina kegiatan Seni dan budaya.
		3. Banyaknya benda cagar budaya yang berada di kabupaten yang belum dikelola dengan optimal.
		4. Masih relatif rendahnya partisipasi masyarakat terhadap even-even seni dan budaya daerah
		5. Penerapan nilai-nilai dan seni budaya yang terus mengalami penurunan akibat adanya globalisasi.
16	Urusan Perpustakaan	n.a.

II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
17	Urusan Kearsipan	n.a.

II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
II	URUSAN PILIHAN	
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	1. Perlunya peningkatan kontribusi perikanan (darat) bagi perekonomian daerah.
2	Urusan Pariwisata	1. Pengembangan pariwisata belum terintegrasi dengan dengan sektor lain seperti Industri kreatif dan sektor lainnya. 2. Kurangnya daya dukung infrastruktur menuju destinasi wisata. 3. Relatif rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Madiun. 4. Strategi promosi pariwisata Kab Madiun perlu ditingkatkan.
3	Urusan Pertanian	1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian. 2. Terbatasnya akses petani terhadap saprodi dan permodalan 3. Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian 4. Pentingnya penyuluhan kepada petani dalam menghadapi anomali iklim dan ancaman hama serta penyakit tanaman. 5. Terjadinya penurunan daya dukung lahan dan sumberdaya air 6. Belum adanya pengawasan secara intensif terhadap keluar masuknya ternak. 7. Perlunya penyuluhan dalam mengatasi ancaman penyakit ternak yang dapat mengganggu produktivitas 8. Belum tercapainya swasembada daging sapi secara berkelanjutan. 9. Belum maksimalnya luas lahan perikanan produktif 10. Belum tercapainya swasembada ikan secara berkelanjutan. 11. Kurang optimalnya penerapan inovasi teknologi dan penyerapan informasi oleh petani 12. Kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh 13. Rendahnya posisi tawar petani di pasar input dan output.
4	Urusan Kehutanan	1. Belum optimalnya pengelolaan hutan yang terintegrasi dengan sektor lain yang terkait.
5	Urusan energi dan Sumber Daya Mineral	1. Perlunya penataan kegiatan usaha pertambangan mineral batuan bukan logam (Galian C) yang terkait pajak dan prosedur pertambangan. 2. Pengembangan Energi Baru Terbarukan belum berjalan secara optimal. 3. Energi kelistrikan di Bidang ESDM masih tahap rintisan, sehingga selalu koordinasi dengan ESDM Prov Jatim terkait pengembangan energi kelistrikan.

6	Urusan Perdagangan	1. Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta Belum Optimalnya Pengawasan Barang/Jasa
		2. Kurangnya sarana usaha dan modal usaha bagi pedagang kecil sektor informal dan perdagangan kaki lima
		3. Kurang optimalnya perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri
7	Urusan Perindustrian	1. Pendukung daya saing industri di kab Madiun masih perlu ditingkatkan.
		2. Diperlukan peningkatan SDM, ketrampilan dan penguasaan teknologi khususnya yang mendukung Industri Kecil
8	Urusan Transmigrasi	1. Adanya penurunan Pagu Alokasi kegiatan perpindahan dan penempatan Transmigrasi di Kabupaten Madiun

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2017 dan Tahun 2018

Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun mencapai 5,10%, atau mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,42%. Perlambatan ini terjadi karena sektor pertanian mengalami penurunan produksi sehingga pertumbuhan sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 2,25%. Mengingat nilai kontribusi dari sektor pertanian yang mencapai 29,63% maka penurunan produksi tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Madiun. Disisi lain dengan percepatan pembangunan di Kabupaten Madiun dapat mendorong percepatan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Madiun yang diakibatkan oleh sektor pertanian dapat ditekan dengan percepatan pertumbuhan yang terjadi pada sektor industri dan perdagangan, sehingga dapat memberikan dampak percepatan kinerja pada perekonomian di Kabupaten Madiun.

Tabel 3.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun 2017 s.d 2018

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	
			2017	2018*)
1	PDRB (ADH Berlaku)	Rp.Juta	16.417.718,1	17.679.142,7
2	PDRB (ADH Konstan)	Rp.Juta	11.879.336,6	12.485.007,7
3	Inflasi	(%)	4,78	2,71
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	5,42	5,10
5	Pendapatan Perkapita	Rp.Ribu	24.148	25.945

Sumber Data : Bappeda Kab.Madiun (hasil koordinasi dengan BPS)

PDRB ADHB Kabupaten Madiun menunjukkan total output perekonomian secara nominal sebelum dikoreksi oleh faktor harga atau tingkat

inflasi ditahun yang sama. Pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp. 17.679.142.739.000, dan mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.16.417.718.132.000,-. Sedangkan PDRB ADHK yang menunjukkan total nilai output perekonomian secara riil. Pada tahun 2017 memiliki capaian sebesar Rp.11.879.336.609.000,- dan meningkat menjadi Rp.12.485.007.714.000,- di tahun 2018.

Nilai PDRB ADHK menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten Madiun seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Pada tahun 2018 PDRB ADHK mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.12.485.007,714,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 11.879.336,609,- kenaikan ini menggambarkan secara riil tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan. Selain itu untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per individu penduduk di Kabupaten Madiun dapat ditunjukkan oleh PDRB Perkapita dengan nilai sebesar Rp.24.148.000,- di tahun 2017 menjadi Rp. 25.945.000,- di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 ditopang oleh kinerja sektor industri dan perdagangan mengingat sektor pertanian yang masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Madiun pada tahun 2018 mengalami penurunan produksi, selain itu dalam perkembangannya sektor pertanian kontribusinya semakin menurun karena adanya alih fungsi lahan dan menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian.

Sektor pertanian selama ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Madiun, namun adanya alih fungsi lahan pertanian secara terus menerus menyebabkan sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi PDRB. Masalah tersebut sangat penting dan perlu menjadi perhatian khusus karena sebagian besar penduduk di Kabupaten Madiun hidup di sektor pertanian. Selain itu rendahnya kesejahteraan petani juga menjadi penyebab rendahnya minat para generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Sehingga dalam jangka panjang akan berpotensi menimbulkan masalah di sektor pertanian, sehingga memerlukan perhatian yang khusus. Secara umum, peningkatan produktifitas, skala usaha, dan nilai tambah barang dan jasa melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna dan ekonomi kreatif merupakan strategi yang sangat efektif untuk mendorong peningkatan PDRB di semua sektor, khususnya sektor pertanian yang diharapkan akan bergulir ke sektor industri dan perdagangan.

3.1.2. Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2019 dan 2020

Mengacu kepada data dan informasi di bawah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada tahun 2019 diperkirakan mencapai kisaran 5,37 %. Perkembangan sektor perdagangan dan industri diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal, seiring dengan kecamatan Mejayan sudah menjadi pusat pemerintahan, tentunya akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kenaikan sektor industri maupun perdagangan. Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Madiun sebaiknya lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur seperti perbaikan akses jalan serta pengembangan industri pengolahan yang berbasis bahan baku pertanian sehingga mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.2

Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2019 & 2020

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	
			2019**)	2020***)
1	PDRB (ADH Berlaku)	Rp.Juta	19.172.704,5	20.741.946,2
2	PDRB (ADH Konstan)	Rp.Juta	13.154.919,0	13.848.940,0
3	Inflasi (IHK)	(%)	3,85	4,27
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	5,37	5,28
5	Pendapatan Perkapita	Rp.Ribu	28.084	30.333

***) = Angka proyeksi

Sumber Data : hasil koordinasi Bappeda Kab.Madiun dengan BPS

Sentimen dari faktor eksternal maupun internal sebagai dampak perpindahan pusat pemerintahan menjadi pemicu berkembangnya sektor konstruksi, real estate serta jasa. Sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diperkirakan bisa mencapai level 5,37 persen, mengingat peranan sektor ekonomi yang dominan seperti perdagangan, konstruksi, industri serta jasa akan mampu meningkatkan elastisitas penciptaan lapangan pekerjaan, indikasi ini dapat dilihat dari banyaknya angkatan kerja pada kelompok usia 20 sampai dengan 34 tahun yang terserap pada lapangan kerja pada sektor

tersebut. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Madiun perlu menarik investasi dari luar untuk mengembangkan sektor penghasil barang (*tradables*) yang tertinggal dalam proses percepatan pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir, mengingat pertumbuhan sektor tersebut sangat cepat sehingga dapat menjadi daya ungkit menunjang peningkatan PAD.

Percepatan pembangunan di Kecamatan Mejayan dapat menggalakan aktivitas perekonomian yang mengakibatkan ekspansi bisnis di wilayah ini jadi berkembang, aktivitas investor pun diperkirakan akan terus meningkat dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada tahun 2020 bisa ditargetkan berada pada kisaran 5,28%. Melalui pertumbuhan tersebut total output perekonomian Kabupaten Madiun di tahun 2020 diperkirakan mencapai sekitar 20 triliun rupiah. Peningkatan pembangunan ekonomi seharusnya sejalan dengan optimalisasi penyerapan anggaran pemerintah daerah untuk kepentingan kemakmuran masyarakat seperti pembangunan infrastruktur. Namun bila kita lihat struktur belanja daerah Kabupaten Madiun yang masih didominasi oleh belanja pegawai dan barang jasa serta proporsi belanja modal masih relatif kecil, hal ini yang menjadi hambatan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada perspektif jangka menengah perekonomian Kabupaten Madiun tetap membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam dekade mendatang, mengingat beberapa hal. Pertama, peranan sektor ekonomi yang dominan (pertanian) belum bisa meningkatkan elastisitas penciptaan lapangan pekerjaan, fenomena ini dapat diindikasikan dengan kurangnya minat angkatan kerja pada kelompok usia 20 sampai dengan 34 tahun yang mau bekerja pada sektor pertanian, sehingga masih tingginya kelompok usia tersebut yang merantau keluar Kabupaten Madiun. Kedua, tingkat kemiskinan di Kabupaten Madiun yang masih harus diturunkan, karena sebagian besar keluarga di Kabupaten Madiun masih hidup sedikit di atas garis kemiskinan. Dinamika perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh intervensi pemerintah melalui instrumen moneter maupun instrumen distribusi dana perimbangan dan regulasi fiskal.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pergantian Pemerintah dari orde baru kepada orde reformasi menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya dan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai demokrasi dan peran serta masyarakat. Secara konkrit pengaturan ini dilakukan dengan telah diterbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Sebagai sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah yang bisa dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berlakunya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah. Untuk itu, pengaturan alokasi sumber daya daerah yang dapat memberi kepuasan bagi masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja serta perwujudan layanan publik yang efisien, menjadi sangat penting.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Pemerintah Kabupaten Madiun sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah melalui kegiatan:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Optimalisasi pengelolaan asset dan penyesuaian tarif ;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah ;
- d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan PD Penghasil ;
- e. Melaksanakan musrenbang pendapatan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan ;
- f. Mengoptimalkan kinerja Perusahaan Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- g. Melaksanakan kegiatan pendataan objek PAD yang dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga dapat diperoleh data objek PAD yang akurat yang dapat dipergunakan untuk penggalan potensi baru ;
- h. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban petugas pemungut tingkat Desa dan Kelurahan;
- i. Melaksanakan rekonsiliasi dan monitoring PBB ke 15 (lima belas) Kecamatan secara rutin, serta melaksanakan penagihan tunggakan PBB kepada Wajib Pajak
- j. Pemutakhiran data dan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan kondisi terakhir (*update*) serta dilakukannya validasi Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3.2.1.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD Kabupaten Madiun terdiri dari Hasil Pajak

Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 diarahkan pada :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui perluasan obyek pajak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang;
2. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola dan koordinasi antar dinas terkait;
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
4. Mengevaluasi Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah untuk peningkatan sumber pendapatan daerah ;
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah;
6. Melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
2. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan Potensi Daerah.
Dengan Program/Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan/kerjasama antar Kabupaten/Kota dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Tabel 3.3

Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019	Target Tahun 2020
I	PENDAPATAN	1.727.312.699.928,91	1.771,921,560,790.00	1.788.177.228.001,00	1.948.221.158.179,00	1.977.415.308.755,38
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	163.635.265.620,91	179,046,529,130.00	185.513.458.691,00	200.523.787.701,00	218.551.609.018,38
a	Hasil Pajak Daerah	42.824.119.770,59	45,427,426,700.00	51.243.461.000,00	63.726.717.900,00	63.726.717.900,00
b	Hasil Retribusi Daerah	23.967.526.083,00	32,115,255,000.00	32.531.528.200,00	10.371.641.200,00	9.894.775.590,00
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.775.854.348,11	5,340,045,420.00	5.791.034.441,00	5.769.330.336,00	6.627.146.065,38
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	92.067.765.419,21	96,163,802,010.00	95.947.435.050,00	120.656.098.265,00	138.302.969.463,00
2	DANA PERIMBANGAN	1.286.874.686.970,00	1,267,743,088,000.00	1.276.829.781.650,00	1.372.582.729.000,00	1.368.842.642.313,00
a	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	61.283.188.512,00	68,311,437,000.00	78.658.491.650,00	121.351.389.000,00	121.351.389.000,00
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	893.565.762.000,00	893,565,762,000.00	877.868.685.000,00	904.957.172.000,00	904.957.172.000,00
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	332.025.736.458,00	305,865,889,000.00	320.302.605.000,00	346.274.168.000,00	342.534.081.313,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	276.802.747.338,00	325,131,943,660.00	325.833.987.660,00	375.114.641.478,00	390.021.057.424,00
a	Dana Hibah	15.498.000.000,00	3,500,000,000.00	57.215.400.000,00	59.751.720.415,00	68.044.629.415,00
b	Dana Darurat	0,00	0,00			
c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	166.637.279.000,00	209,413,881,000.00	103.432.422.660,00	208.501.962.000,00	208.501.962.000,00
d	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	89.588.628.338,00	106,832,422,660.00	160.881.185.000,00	102.681.979.063,00	108.875.857.009,00
e	Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00			
f	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.078.840.000,00	5,385,640,000.00	4.304.980.000,00	4.178.980.000,00	4.598.609.000,00

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja Kabupaten Madiun pada prinsipnya digunakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Madiun dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Total rencana belanja daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1,995,304,569,210.38 dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1,219,368,368,050.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 775,936,201,160.38. Kebijakan belanja daerah sampai dengan 2020 didominasi oleh Belanja Tidak Langsung sekitar 61,11 % dari total belanja daerah, sedangkan untuk Belanja Langsung akan menyerap kurang lebih 38,89 %.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

a. Belanja Tidak Langsung;

Belanja Tidak langsung tahun anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp. 1,221,368,368,050.00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 765.617.433.919,00;
- 2) Belanja Subsidi dialokasikan sebesar Rp. 515.000.000,00;
- 3) Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 28.822.613.931,00;
- 4) Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 8.235.000.000,00;
- 5) Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan

Pemerintahan Desa, dialokasikan sebesar Rp 5.863.694.360,00;

- 6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa, dialokasikan sebesar Rp. 407.314.625.840,00;
- 7) Belanja Tidak Terduga, dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000.000,00;

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp. 773.936.201.160,38 dialokasikan untuk membiayai belanja seluruh Perangkat Daerah.

Tabel 3.4
Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
II	BELANJA	1.834.089.868.119,89	1,797,882,802,232.00	1.812.000.389.361,00	1.961.813.561.235,00	1.995.304.569.210,38
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.089.091.493.652,00	1,099,155,155,112.00	1.103.581.398.755,00	1.188.415.365.050,00	1.221.368.368.050,00
a	Belanja Pegawai	822.748.928.632,00	765,758,013,137.00	748.240.102.555,00	765.617.433.919,00	765.617.433.919,00
b	Belanja Bunga	0,00	-	-	-	-
c	Belanja Subsidi	473.435.500,00	485,000,000.00	515.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00
d	Belanja Hibah	24.771.505.000,00	37,587,212,200.00	66.106.274.360,00	28.822.613.931,00	28.822.613.931,00
e	Belanja Bantuan Sosial	5.580.000.000,00	1,815,000,000.00	3.958.500.000,00	8.235.000.000,00	8.235.000.000,00
f	Belanja Bagi Hasil kepada Prop / Kab / Kota dan PemDes	3.476.552.300,00	4,381,600,940.00	4.927.282.000,00	5.863.694.360,00	5.863.694.360,00
g	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop / Kab / Kota dan PemDes	232.041.072.220,00	287,128,328,835.00	277.834.239.840,00	376.361.622.840,00	407.314.625.840,00
h	Belanja Tidak Terduga	0,00	2,000,000,000.00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2	BELANJA LANGSUNG	744.998.374.467,89	698,727,647,120.00	708.418.990.606,00	773.398.196.185,00	773.936.201.160,38
a	Belanja Pegawai	24.043.309.450,00	17,063,525,000.00	26.381.870.100,00	21.696.639.002,00	21.696.639.002,00
b	Belanja Barang & Jasa	277.146.792.127,96	320,883,968,931.00	384.877.267.704,00	416.484.105.020,00	417.022.109.995,38
c	Belanja Modal	443.808.272.889,93	360,780,153,189.00	297.159.852.802,00	335.217.452.163,00	335.217.452.163,00

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 membawa pro dan kontra terhadap pelaksanaan pembiayaan atas beberapa kewenangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah.

Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pembebanan belanja pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban DAU sehingga banyak daerah yang justru mengalami kekurangan dana. Walaupun akhirnya pemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yang mengalami defisit, namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah yang di diharapkan dari sumber-sumber lain, seperti : masyarakat, swasta serta pemerintah pusat (APBN).

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau

pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial ;

- 2) Apabila APBD defisit, maka ditutupi dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah ;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Adapun strategi Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2020 diarahkan :

a. Dari Sisi Sumber Penerimaan Daerah

Sumber penerimaan daerah Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
2. Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
3. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, dan provinsi;
4. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber *Corporate Social Responsibility* (CSR);
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD;
6. Optimalisasi lembaga keuangan mikro seperti: pengembangan model-model pembiayaan tanggung renteng ;
7. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat;

b. Dari Sisi Pengeluaran Daerah

Sumber pengeluaran daerah Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah
- 2) Peningkatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun kepada BUMD untuk memenuhi kebutuhan modal minimal BUMD sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja BUMD sebagai sumber peningkatan PAD. Pemenuhan modal minimal BUMD juga harus disertai dengan peningkatan kinerja BUMD yang didukung oleh peraturan daerah yang baik dan pengelolaan BUMD oleh SDM yang profesional.

Contoh: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat. Pada peraturan tersebut ditentukan jumlah modal minimal BPR, bagi BPR yang belum memenuhi ketentuan modal minimal tidak dapat menyetor laba ke pemerintah daerah selaku pemegang saham.

3.3.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Adapun Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, dialokasikan sebesar Rp. 23.100.000.000,00 diarahkan pada : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Rp 25.000.000.000,00 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp 100.000.000,00 dan tidak ada Penerimaan Dana Cadangan.

3.3.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020, dialokasikan sebesar Rp. 7.210.739.545,00 diarahkan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sebesar Rp. 7.210.739.545,00

Secara umum maka kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada R-APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	254.040.047.943,34	30,461,241,442.00		20.592.403.056,00	25.100.000.000,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya				20.492.403.056,00	25.000.000.000,00
	Pencairan Dana Cadangan				0	0
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				0	0
	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir				100.000.000,00	100.000.000,00
	Penerimaan Dana Cadangan				0	0
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.798.000.000,00	4,500,000,000.00		7.000.000.000,00	7.210.739.545,00
	Pembentukan Dana Cadangan				0	0
	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah				0	0
	Pembayaran Pokok Utang				0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	227.242.047.943,34	25,961,241,442.00		13.592.403.056,00	17.889.260.455,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Madiun pada Tahun 2020 secara periodik dan normatif merupakan prioritas pembangunan pada tahun kedua RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Madiun tahun 2020 selain berpijak pada beberapa ketentuan di atas, juga mengacu pada data permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis serta disinkronkan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Madiun tahun 2020 relevan dengan tujuan pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan Perangkat Daerah (PD) yang paling tinggi kontribusinya terhadap pencapaian target sasaran pembangunan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari Visi dan misi Kepala Daerah yang dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalnya. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Sebagai upaya untuk menjamin aspek keberlanjutan perencanaan daerah, maka RKPD Kabupaten Madiun tahun 2020 mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2018 - 2023. Tujuan dan sasaran merupakan penterjemahan dari Visi dan Misi Kepala Daerah, agar setiap program dan kegiatan yang dirumuskan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Secara detil, alur pemikitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA
DAN BERAKHLAK”**

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka motto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah, AYO APIK BARENG. Yang merupakan seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Dengan memperhatikan seluruh aspek, potensi dan dinamika di Kabupaten Madiun dan sebagai penjabaran dari Visi, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Madiun 2018 - 2023 sebagai berikut :

- Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK	
MISI 1	Mewujudkan Rasa Aman Bagi Seluruh Masyarakat Dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun	
Tujuan 1 Menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan ASN	Sasaran 1.1. Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Strategi 1.1.1. Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik
		Strategi 1.1.2. Peningkatan kriteria desa tangguh bencana
		Strategi 1.1.3. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Strategi 1.1.4. Peningkatan pemahaman dan penerapan SPIP oleh OPD
MISI 2	Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik	
Tujuan 2 Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good government) untuk meningkatkan pelayanan publik	Sasaran 2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Strategi 2.1.1. Optimalisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
		Strategi 2.1.2. Meningkatkan integrasi perencanaan dan penganggaran

		Strategi 2.1.3. Optimalisasi implementasi SAKIP
		Strategi 2.1.4. Meningkatnya tata kelola barang milik daerah sesuai ketentuan
		Strategi 2.1.5. Meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
	Sasaran 2.2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Strategi 2.2.1. Meningkatkan kualitas penataan ASN sesuai dengan kualifikasi
		Strategi 2.2.2. Meningkatkan kompetensi ASN
	Sasaran 2.3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Strategi 2.3.1. Peningkatan mutu pelayanan terpadu satu pintu
		Strategi 2.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
		Strategi 2.3.3. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan
MISI 3	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agroindustri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan	
Tujuan 3 - Mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan - Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sasaran 3.1. Meningkatnya perekonomian masyarakat	Strategi 3.1.1. Meningkatkan usaha industri kecil dan menengah
		Strategi 3.1.2. Meningkatkan produksi tanaman pangan
		Strategi 3.1.3. Meningkatkan produksi tanaman perkebunan
		Strategi 3.1.4. Meningkatkan destinasi dan industri pariwisata
		Strategi 3.1.5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha pedagang formal
		Strategi 3.1.6. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro
		Strategi 3.1.7. Meningkatkan investasi daerah
		Sasaran 3.2. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian
	Strategi 3.2.2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan lingkungan kondisi baik	
	Strategi 3.2.3. Meningkatkan kualitas sarana infrastruktur irigasi	
	Strategi 3.2.4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan perlengkapan keselamatan jalan	
	Sasaran 3.3. Terkendalnya inflasi	Strategi 3.3.1. Meningkatkan pengendalian tingkat

	daerah	inflasi daerah Strategi 3.3.2. Melaksanakan operasi pasar sesuai kebutuhan
	Sasaran 3.4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Strategi 3.4.1. Melestarikan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan
MISI 4	Meningkatkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan	
Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat	Sasaran 4.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Strategi 4.1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan SD
		Strategi 4.1.2. Meningkatkan kualitas pendidikan SMP
		Strategi 4.1.3. Meningkatkan kualitas pendidikan kejar paket A/B/C
	Sasaran 4.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Strategi 4.2.1. Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat
		Strategi 4.2.2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
	Sasaran 4.3. Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Strategi 4.3.1. Meningkatkan penanganan pemberdayaan fakir miskin dan orang tidak mampu
		Strategi 4.3.2. Peningkatan jaminan perlindungan sosial
		Strategi 4.3.3. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
		Strategi 4.3.4. Peningkatan akses dan pelayanan KB
		Strategi 4.3.5. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berkompentensi
Strategi 4.3.6. Meningkatkan penempatan dan perluasan tenaga kerja		
Strategi 4.3.7. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa/kelurahan		
MISI 5	Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia dengan Meningkatkan Kehidupan Beragama, Menguatkan Budaya dan Mengedepankan Kearifan Lokal	
Tujuan 5 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Sasaran 5.1. Meningkatnya nilai - nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat	Strategi 5.1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter keagamaan
		Strategi 5.1.2. Meningkatkan fungsi lembaga keagamaan
	Sasaran 5.2. Meningkatnya Pelestarian Budaya	Strategi 5.2.1. Meningkatkan pengembangan kebudayaan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan nasional perlu memperhatikan pencapaian visi dan misi pemerintah pusat; Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan memperhatikan pengembangan sektor/bidang unggulan/kompetitif nasional serta memahami isu strategis dunia internasional maupun domestik. Rancangan prioritas pembangunan nasional tahun 2020 yang telah disampaikan Pemerintah dalam penyelenggaraan musrenbang nasional penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 memiliki tema *“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”*.

Program prioritas pembangunan nasional muncul untuk mendorong pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan tema RKP Nasional Tahun 2020 *“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”* maka lima Prioritas Nasional adalah:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Konektivitas dan Pemerataan
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Kinerja pembangunan ekonomi di provinsi Jawa Timur berasal dari capaian kinerja pembangunan ekonomi kabupaten/kota provinsi Jawa Timur secara agregat. Pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki tugas memadukan antara kebijakan pemerintah nasional dengan kebijakan kabupaten/kota yang bersumber dari harapan atau aspirasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 di provinsi Jawa Timur untuk mempercepat program-program yang tersusun dalam RPJPD dan RPJMD Jawa Timur. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 yaitu *“Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya Saing”*. Ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan
2. Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta Manajemen Kebencanaan

3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan kerja
4. Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Madiun

Dalam penyusunan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat Nasional maupun Provinsi, dengan keterkaitan/hubungan sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Hubungan RKP dengan Prioritas Pembangunan
Tahun 2020

	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN MADIUN
Tema	Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berdaya Saing	Standarisasi Pelayanan Dasar
Prioritas	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat
	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan	Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta Managemen Kebencanaan	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar
	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
	Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Terjaminnya Ketersediaan Pangan dan Kelestarian Lingkungan Hidup
	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan ASN

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023, maka RKPD Kabupaten Madiun tahun 2020 mengambil tema yaitu “Standarisasi Pelayanan Dasar”. Dengan isu dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Madiun, sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Madiun Tahun 2020

BIDANG	ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN
		I	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat
PENDIDIKAN	Tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan		Peningkatan Mutu Pendidikan SD, SMP
KESEHATAN	Tingginya kesadaran/kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan		Penurunan angka Stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Gerakan Masyarakat hidup sehat (GERMAS)
SOSIAL	Masih terdapat bantuan untuk masyarakat miskin atau rentan miskin tidak tepat sasaran		Verifikasi dan validasi data melalui optimalisasi peran SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu), PKH (Program Keluarga Harapan), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
KETENAGAKERJAAN	Tingginya angkatan kerja yang belum punya keahlian		Peningkatan kompetensi tenaga kerja
		II	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar
PEKERJAAN UMUM	Masih kurangnya daya dukung sarpras wilayah permukiman		Peningkatan jalan dan jembatan
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi
PERUMAHAN PERMUKIMAN	Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh.		Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
PERHUBUNGAN	Masih kurangnya daya dukung sarpras keselamatan jalan		Peningkatan Sarana Keselamatan Jalan
		III	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
PARIWISATA	Pengembangan potensi wisata Lereng Gunung Wilis belum Optimal		Pengembangan pariwisata Lereng Gunung Wilis

BIDANG	ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pangsa pasar komoditas perdagangan dan perindustrian masih terbatas dalam wilayah Kabupaten Madiun		Peningkatan Intensitas promosi produk Usaha Mikro
		IV	Terjaminnya Ketersediaan Pangan dan Kelestarian Lingkungan Hidup
PERTANIAN	Rendahnya pendapatan Petani		Peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian
LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan persampahan masih belum optimal		Pembudayaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di masyarakat
		V	Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan ASN
KEBENCANAAN	Masih kurangnya kemampuan penanganan bencana		Pembentukan Desa tangguh bencana, Tim Jitu Pasma (Pengkajian Penghitungan Pasca Bencana)
KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Belum optimalnya pencegahan, penanganan konflik dan pasca konflik		Peningkatan Kewaspadaan daerah dengan optimalisasi pengamanan terpadu Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan dan masyarakat
	Minimnya fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat		Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat
PEMERINTAHAN	Minimnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor		Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD).

Program prioritas yang direncanakan pembiayaannya pada tahun 2019 disusun berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 Kabupaten Madiun merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Madiun yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun Anggaran 2018 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Adapun Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 1.1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				169.461.929.341,00				71.395.600.634,28
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1.1	Pendidikan				168.149.429.341,00				70.043.725.634,28
1.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP PD		80.01	2.724.913.150,00			80.02	3.287.358.037,00
		Persentase Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD		75.00				80.00	
1.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	1.907.743.900,00	Dana Alokasi Umum		10.00	2.317.673.710,00
		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Belum Ada	11.00				11.00	
		Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Belum Ada	100.00				100.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	jumlah dokumen pemerintahan yang disusun sesuai dengan peraturan	Wilayah Kabupaten Madiun	24.00	817.169.250,00	Dana Alokasi Umum		24.00	969.684.327,00
1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD		45.34	2.128.236.041,00			47.51	1.607.507.800,00
		APS PAUD		44.26				46.42	
1.1.15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)	jumlah sekolah TK negeri yang mendapatkan layanan BOP PAUD	Kosong	5.00	0,00	DAK Non Fisik		5.00	378.000.000,00
1.1.15.91	Peningkatan Mutu PAUD	persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Wilayah Kabupaten Madiun	55.00	608.260.000,00	Dana Insentif Daerah		55.00	823.507.800,00
1.1.15.93	Peningkatan Mutu Kelembagaan PAUD	persentase lembaga PAUD yang sarprasnya memenuhi standar	Wilayah Kabupaten Madiun	85.03	1.519.976.041,00	DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah		85.03	406.000.000,00
1.1.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan Paket A/B/C		100.00	1.000.000.000,00			100.00	1.020.000.000,00
1.1.18.25	Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	jumlah lulusan paket A/B/C	Wilayah Kabupaten Madiun	300.00	900.000.000,00	Bantuan Provinsi (Banprov), Dana Alokasi Umum		300.00	920.000.000,00
1.1.18.30	BOP Madin (Banprop)	jumlah lembaga Madin yang terfasilitasi dalam pengelolaan dana BPDGS	Wilayah Kabupaten Madiun	222.00	100.000.000,00	Bantuan Provinsi (Banprov)		222.00	100.000.000,00
1.1.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV		96.92	19.683.210.000,00			97.72	24.696.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.20.61	Peningkatan Mutu Pendidik SD	jumlah pendidik SD yang bersertifikasi	Wilayah Kabupaten Madiun	2098.00	7.401.053.750,00	Bantuan Provinsi (B anprov),D ana Alokasi U mum,Dana Insentif Daerah		2098.00	11.294.000.000,00
1.1.20.62	Peningkatan Mutu Pendidik SMP	Jumlah pendidik SMP yang bersertifikasi	Wilayah Kabupaten Madiun	1023.00	853.002.500,00	Bantuan Provinsi (B anprov),D ana Alokasi U mum,Dana Insentif Daerah		1023.00	2.061.000.000,00
1.1.20.63	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD dan Tenaga Administrasi	jumlah pendidik PAUD dan tenaga administrasi yang meningkat kompetensinya	Wilayah Kabupaten Madiun	200.00	11.429.153.750,00	Dana Alokasi U mum,Dana Insentif Daerah		200.00	11.341.200.000,00
		jumlah Pendidik PAUD yang bersertifikasi	Belum Ada	444.00				444.00	
1.1.23	Program Bantuan Operasional Sekolah	Persentase sekolah yang dapat beroperasi dengan baik		100.00	51.068.600.000,00			100.00	228.223.001,29
1.1.23.296	Bantuan Operasional Sekolah SDN WONOREJO 02	Operasional sekolah yang terpenuhi	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	34.097.600.000,00	Bantuan Operasional Sekolah		12.00	139.163.904,00
1.1.23.433	Bantuan Operasional Sekolah SMPN 3 KARE	Operasional sekolah yang terpenuhi	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	16.971.000.000,00	Bantuan Operasional Sekolah		12.00	89.059.097,29
1.1.24	Program Pendidikan SD	APM SD/MI		89.25	50.517.798.400,00			89.50	12.362.363.232,00
		APS SD/MI		100.00				100.00	
		Persentase lembaga SD yang terakreditasi A		6.91				8.15	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Angka Kelulusan SD/MI		100.00				100.00	
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs		96.81				96.83	
		APK SD/MI		100.00				100.00	
1.1.24.189	Peningkatan Mutu Kurikulum dan Penilaian SD	jumlah rumusan kebijakan tentang kurikulum yang ditindaklanjuti	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	886.152.250,00	Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah		2.00	809.736.817,50
1.1.24.191	Peningkatan Mutu Peserta Didik SD	jumlah peserta didik yang berprestasi di tingkat Kabupaten	Wilayah Kabupaten Madiun	31.00	416.142.150,00	Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah		31.00	222.626.414,50
1.1.24.192	Peningkatan Mutu Kelembagaan SD	persentase kondisi bangunan SD baik	Wilayah Kabupaten Madiun	89.00	49.215.504.000,00	DAK Fisik, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah		89.00	11.330.000.000,00
1.1.25	Program Pendidikan SMP	APM SMP/MTs		73.60	37.843.671.750,00			73.70	22.955.523.563,99
		APS SMP/MTs		100.00				100.00	
		Persentase lembaga SMP yang terakreditasi minimal A		60.42				66.67	
		Angka Kelulusan SMP		100.00				100.00	
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		93.23				93.64	
		APK SMP/MTs		100.00				100.00	
1.1.25.190	Peningkatan Mutu Kurikulum dan Penilaian SMP (DID)	Persentase lembaga SMP yang terakreditasi	Wilayah Kabupaten Madiun	54.39	0,00			54.39	150.118.380,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.25.192	Peningkatan Mutu Kurikulum dan Penilaian Pendidikan SMP	Persentase lembaga SMP yang terakreditasi	Wilayah Kabupaten Madiun	54.39	295.358.850,00	Dana Alokasi Umum		54.39	304.219.615,50
1.1.25.193	Peningkatan Mutu Peserta Didik SMP	jumlah peserta didik SMP yang berprestasi tingkat provinsi	Wilayah Kabupaten Madiun	70.00	851.242.900,00	Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah		70.00	763.480.187,00
1.1.25.194	Peningkatan Mutu Kelembagaan SMP	persentase kondisi bangunan SMP baik	Wilayah Kabupaten Madiun	85.00	36.697.070.000,00	DAK Fisik, Dana Alokasi Umum		85.00	19.596.280.471,49
1.1.25.195	Peningkatan Mutu Kelembagaan SMP (DID)	persentase kondisi bangunan SMP baik	Kosong	85.00	0,00			85.00	2.141.424.910,00
1.1.26	Program Penguatan Karakter Keagamaan	Rasio tenaga pendidik karakter keagamaan dengan jumlah kelas		3.00	3.183.000.000,00			3.00	3.886.550.000,00
1.1.26.1	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SD	Rasio tenaga pendidik karakter keagamaan dengan jumlah kelas jenjang SD	Wilayah Kabupaten Madiun	3.00	2.508.000.000,00	Dana Alokasi Umum		3.00	2.861.550.000,00
1.1.26.2	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SMP	Rasio tenaga pendidik karakter keagamaan dengan jumlah kelas jenjang SMP	Wilayah Kabupaten Madiun	3.00	675.000.000,00	Dana Alokasi Umum		3.00	1.025.000.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.16	Kebudayaan				1.312.500.000,00			1.351.875.000,00	
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase benda situs cagar budaya yang dikembangkan		3.86	1.312.500.000,00			5.31	1.351.875.000,00
		Persentase budaya daerah yang dikembangkan		42.99				64.49	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.15.43	Pelestarian Kesenian Daerah	Persentase kesenian daerah yang berprestasi	Wilayah Kabupaten Madiun	55.00	462.500.000,00	Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah		55.00	476.375.000,00
2.16.15.44	Pelestarian Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi	jumlah cagar budaya dan tradisi daerah yang dikembangkan	Wilayah Kabupaten Madiun	11.00	425.000.000,00	Dana Insentif Daerah		11.00	437.750.000,00
2.16.15.45	Pengembangan Kelembagaan Budaya	jumlah lembaga seni budaya yang meningkat mutunya	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	425.000.000,00	Dana Insentif Daerah		5.00	437.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 1.2.1 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				100.661.265.644,00				106.526.450.472,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1.2	Kesehatan				100.661.265.644,00				106.526.450.472,00
1.2.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN Terhadap pelayanan sekretariat Dinas Kesehatan (skor)		80.00	1.603.255.750,00			80.00	3.658.041.882,00
		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan		80.00				80.00	
1.2.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Desa Jiwan	100.00	1.527.280.750,00	Dana Alokasi Umum		100.00	3.648.041.882,00
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	Belum Ada	30.00				30.00	
		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Belum Ada	12.00				12.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah tenaga Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) pada RSUD	Belum Ada	8.00				8.00	
1.2.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Desa Jiwan	9.00	75.975.000,00	Dana Alokasi Umum		9.00	10.000.000,00
1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting		20.30	5.261.911.880,00			20.20	7.818.988.300,00
1.2.16.54	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Persentase persalinan bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan pelayanan kesehatan yang dibiayai jampersal	Desa Jiwan	100.00	1.675.000.000,00	DAK Non Fisik		100.00	1.875.000.000,00
1.2.16.82	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Desa yang melaksanakan Program STBM	Desa Jiwan	97.00	260.400.000,00	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok		97.00	260.400.000,00
		Cakupan TPM yang Memenuhi Syarat	Belum Ada	33.00				33.00	
		Cakupan Fasyankes yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Sesuai Peraturan	Belum Ada	65.00				65.00	
		Cakupan TUU yang Memenuhi Syarat	Belum Ada	79.00					
		Cakupan kecamatan yang melaksanakan program kab/kota sehat	Belum Ada	100.00				100.00	
		Cakupan keluarga yang memiliki akses air minum berkualitas	Belum Ada	93.80				93.80	
		Cakupan Keluarga yang menggunakan Jamban Sehat	Belum Ada	100.00				100.00	
		Cakupan desa yang melaksanakan program kab/kota sehat	Belum Ada	50.00				50.00	
		Cakupan Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan	Belum Ada	40.00				40.00	
		Presentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Belum Ada	75.00					
		Cakupan Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat	Belum Ada	77.00					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Cakupan Rumah Tangga yang Mengelola Limbah Padat	Belum Ada	70.00					
1.2.16.86	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Cakupan Anak Sekolah (SD Kelas 4-6 yang berusia 10-12 Tahun) yang dilakukan Pengukuran Kebugaran Jasmani	Desa Jiwan	30.00	51.000.000,00	Dana Alokasi Umum		30.00	68.233.000,00
		Cakupan Calon Jemaah Haji yang Diperiksa Kebugarannya	Belum Ada	100.00				100.00	
		Cakupan Puskesmas yang Terbentuk Pos UKK	Belum Ada	75.00				75.00	
1.2.16.87	Penyediaan Obat Gizi (DAK Penugasan 2019)	Prosentase obat gizi yang tersedia	Desa Jiwan	100.00	253.807.880,00	Dana Alokasi Khusus		0.00	100.000.000,00
1.2.16.96	Pengembangan Taman Posyandu (Banprop)	Cakupan Taman Posyandu Optimal	Desa Jiwan	62.00	55.000.000,00	Bantuan Provinsi (Banprov)		62.00	70.000.000,00
1.2.16.97	Pendampingan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) - (Banprop)	Jumlah poskestren yang dilakukan pendampingan	Desa Jiwan	10.00	121.029.000,00	Bantuan Provinsi (Banprov)		20.00	1.498.053.808,00
1.2.16.98	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Desa Jiwan	100.00	462.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	712.164.065,00
		Persentase anak usia pendidikan lanjutan pertama (kelas 7) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Belum Ada	100.00				100.00	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Belum Ada	100.00				100.00	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Belum Ada	100.00				100.00	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Belum Ada	100.00				100.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Belum Ada	92.00				92.00	
		Persentase anak usia pendidikan dasar (kelas 1) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Belum Ada	100.00				100.00	
		Persentase pelayanan kesehatan remaja sesuai standar	Belum Ada	65.00				65.00	
		Persentase anak usia pendidikan lanjut tingkat atas (kelas 9) yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Belum Ada	100.00				100.00	
1.2.16.99	Peningkatan Pelayanan dan Intervensi Gizi Masyarakat	Cakupan Keluarga berperilaku Sadar Gizi (kadarzi)	Desa Jiwan	90.10	215.000.000,00	Dana Alokasi Umum		90.10	827.417.832,00
		Cakupan Balita ditimbang di Posyandu (D/S)	Belum Ada	79.50				80.10	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Belum Ada	100.00				68.50	
		Cakupan Balita Naik berat badan di Posyandu (N/D)	Belum Ada	73.50				74.50	
		Cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif	Belum Ada	68.50				68.50	
		Cakupan kecamatan bebas rawan gizi	Belum Ada	82.00				82.00	
1.2.16.101	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Ber PHBS	Desa Jiwan	50.00	234.600.000,00	Dana Alokasi Umum, Pajakk Rokok		50.00	1.307.719.595,00
		Cakupan Desa Siaga Aktif	Belum Ada	100.00				100.00	
		Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri	Belum Ada	74.94				74.94	
1.2.16.104	Peralatan dan Pencehahan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total ber Basis Masyarakat	Jumlah Sanitarian KIT yang disediakan	Desa Jiwan	5.00	1.934.075.000,00	DAK Fisik		5.00	1.100.000.000,00
1.2.22	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase pelayanan penderita penyakit menular dan tidak menular sesuai standar		100.00	2.715.338.015,00			100.00	809.087.315,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase masyarakat yang puas terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		100.00					
1.2.22.12	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Desa Jiwan	100.00	265.000.000,00	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok		100.00	85.000.000,00
		Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Belum Ada	100.00				7.00	
		Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	Belum Ada	20.00				7.00	
		Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Belum Ada	100.00				3.00	
		Cakupan penduduk usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan	Belum Ada	100.00				21.10	
		Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Belum Ada	100.00					
1.2.22.16	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Persentase penderita pnemonia balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Desa Jiwan	100.00	709.281.000,00	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok		100.00	110.000.000,00
		Angka keberhasilan pengobatan kasus TBC (Succes Rate)	Belum Ada	95.00				95.00	
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	Belum Ada	100.00				100.00	
		Persentase penderita diare yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Belum Ada	100.00				100.00	
		Persentase penderita TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar	Belum Ada	100.00				100.00	
		Persentase penderita HIV mendapatkan pengobatan sesuai standar	Belum Ada	100.00				100.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase penderita kusta mendapatkan pelayanan sesuai standar	Belum Ada	100.00				100.00	
		Angka kesakitan Demam Berdarah per 100.000 penduduk	Belum Ada	48.00					
		Persentase Angka Bebas Jentik	Belum Ada	95.00					
		Persentase pelayanan Penderita Malaria sesuai standar	Belum Ada	100.00					
		Persentase kasus DBD yang ditindak lanjuti sesuai kriteria	Belum Ada	100.00					
1.2.22.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK Penugasan)	Persentase bahan pemeriksaan HIV yang tersedia	Desa Jiwan	100.00	44.090.315,00	Dana Alokasi Khusus		100.00	44.090.315,00
1.2.22.18	Peningkatan Imunisasi , Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Persentase kelengkapan pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	Desa Jiwan	90.00	151.400.000,00	Dana Alokasi Umum, Pajakk Rokok		90.00	200.000.000,00
		Persentase ketepatan pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	Belum Ada	80.00				80.00	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji	Belum Ada	100.00				100.00	
		Penemuan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Non Polio	Belum Ada	3.00				3.00	
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Belum Ada	95.00				95.00	
		Cakupan Imunisasi lanjutan BADUTA	Belum Ada	80.00					
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi < 24 jam	Belum Ada	100.00					
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Belum Ada	93.50					
1.2.22.22	Barang Medis Habis pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah Catridge TCM	Desa Jiwan	1.00	1.545.566.700,00	Dana Alokasi Khusus		1.00	369.997.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah bahan medis habis pakai HIV dan Sifilis	Belum Ada	1.00				1.00	
1.2.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah pembangunan gedung puskesmas dan puskesmas pembantu		13.00	14.004.762.400,00			16.00	13.315.104.745,00
1.2.25.24	Pemenuhan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya (DAK Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar)	Persentase pemenuhan sarana, prasarana & peralatan puskesmas yang diadakan	Desa Jiwan	100.00	2.199.662.400,00	Dana Alokasi Khusus			3.571.999.000,00
1.2.25.26	Pemenuhan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar)	Persentase kegiatan DAK berjalan dengan lancar	Desa Jiwan	100.00	205.100.000,00	Dana Alokasi Umum			240.020.000,00
1.2.25.34	Pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun	Desa Jiwan	10.00	11.600.000.000,00	Dana Alokasi Umum		10.00	9.503.085.745,00
		Jumlah puskesmas yang dibangun	Belum Ada	1.00				1.00	
1.2.38	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi		60.00	17.563.844.000,00			70.00	17.294.769.598,00
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		79.00				81.00	
1.2.38.1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (PBI-D)	Desa Jiwan	50000.00	13.853.600.000,00	Pajak Rokok		50000.00	13.853.600.000,00
1.2.38.8	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase pembinaan ke penyehat tradisional	Desa Jiwan	60.00	90.000.000,00	Dana Alokasi Umum		60.00	110.000.000,00
		Persentase penyehat tradisional yg memiliki STPT	Belum Ada	45.00				45.00	
		Persentase puskesmas yg melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	Belum Ada	80.00				80.00	
		Persentase terbentuknya kelompok Asuhan Mandiri (ASMAN)	Belum Ada	15.00				15.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.38.11	Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS	Desa Jiwan	26.00	249.750.000,00	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok		26.00	125.000.000,00
		Persentase puskesmas yang terakreditasi	Belum Ada	100.00				100.00	
		Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan	Belum Ada	90.00				90.00	
		Persentase FKTP memenuhi standar kredensialing/rekredensialing	Belum Ada	94.00					
1.2.38.16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ponkesdes	Persentase perawat ponkesdes memberikan pelayanan kesehatan	Desa Jiwan	100.00	1.247.544.000,00	Bantuan Provinsi (Banprov), Dana Alokasi Umum		100.00	696.000.000,00
1.2.38.17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus	Persentase anak yang mendapat pelayanan Khitanan Massal	Desa Jiwan	100.00	460.200.000,00	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok		100.00	850.419.598,00
		Persentase ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan	Belum Ada	100.00				100.00	
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal	Belum Ada	92.00				92.00	
		Persentase pelayanan kesehatan rujukan	Belum Ada	18.00				18.00	
		Persentase penanggulangan bencana	Belum Ada	87.00				87.00	
		Persentase RS yang terakreditasi	Belum Ada	100.00				100.00	
		Cakupan desa yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Belum Ada	31.00					
1.2.38.24	Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Standart (Banprop)	Jumlah dokter kontrak Banprop yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap	Desa Jiwan	100.00	63.000.000,00	Bantuan Provinsi (Banprov)		100.00	60.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.38.71	Akreditasi Puskesmas	Persentase puskesmas terakreditasi	Desa Jiwan	100.00	1.599.750.000,00	DAK Non Fisik		100.00	1.599.750.000,00
1.2.39	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat		100.00	2.791.114.036,00			100.00	4.358.340.322,00
		Persentase sarana kesehatan yang memenuhi komitmen		100.00				100.00	
		Prosentase sumber daya manusia kesehatan tertentu yang memenuhi standar kompetensi		100.00				100.00	
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan		100.00				100.00	
1.2.39.4	Distribusi Obat dan E-Logistik	Cakupan penggunaan Aplikasi E-Logistik obat di GFK sesuai ketentuan	Desa Jiwan	100.00	157.043.000,00	DAK Non Fisik		100.00	157.043.000,00
		Jumlah pelaksanaan Distribusi Obat pada puskesmas berjalan lancar	Belum Ada	26.00				26.00	
1.2.39.5	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana peningkatan mutu, pengelolaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan yang terpenuhi	Desa Jiwan	100.00	74.995.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	80.000.000,00
1.2.39.8	Pengelolaan dan Pengawasan Alat Kesehatan	Prosentase pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standart	Desa Jiwan	100.00	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	110.000.000,00
1.2.39.19	Pengadaan Obat, Perbekalan Farmasi dan Sarana Kefarmasian (DAK Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian)	Persentase puskesmas dengan ketersediaan Obat dan dan Perbekalan Kesehatan sesuai standart	Desa Jiwan	100.00	2.077.346.036,00	DAK Fisik		100.00	2.925.829.000,00
1.2.39.21	Penunjang DAK Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian	Persentase Kegiatan DAK berjalan dengan lancar	Desa Jiwan	100.00	60.831.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	58.375.000,00
1.2.39.24	Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (pajak Rokok)	Persentase produk alkes dan PKRT dengan kualitas sesuai standar kesehatan	Desa Jiwan	65.00	75.000.000,00	Pajak Rokok		65.00	450.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan alat kesehatan memenuhi standar kesehatan	Belum Ada	65.00				65.00	
		Persentase RS ketersediaan alat kesehatan memenuhi standar alat kesehatan	Belum Ada	33.00				33.00	
1.2.39.28	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Obat dan Makanan (Pajak Rokok)	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standart	Desa Jiwan	66.00	130.000.000,00	Pajak Rokok		66.00	200.000.000,00
		Persentase Sarana Kefarmasian (IFK, Apotek, RS dan Klinik) yang melaporkan penggunaan obat golongan Narkotika dan Psikotropika melalui aplikasi SIPNAP	Belum Ada	96.00				96.00	
		Jumlah Desa yang telah disosialisasi GEMA CERMAT	Belum Ada	18.00				18.00	
		Persentase Penggunaan obat Rasional di Puskesmas	Belum Ada	84.00				84.00	
		Persentase Produsen Industri Rumah Tangga Pangan memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Belum Ada	100.00				100.00	
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standart	Belum Ada	75.00				75.00	
1.2.39.30	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sarana Kesehatan	Persentase sarana kesehatan dan penunjang yang memiliki rekomendasi/pemenuhan komitmen ijin operasional	Desa Jiwan	100.00	197.899.000,00	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok		100.00	377.093.322,00
		Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	Belum Ada	573.00				573.00	
		Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki surat ijin praktek / surat ijin kerja	Belum Ada	840.00				840.00	
		Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki dokumen pemetaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dan perencanaan kebutuhan	Belum Ada	80.00				80.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Belum Ada	75.00					
1.2.42	Program Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Prosentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas		100.00	19.081.000.000,00			100.00	19.851.866.157,00
1.2.42.27	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kebonsari (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kebonsari (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Singgahan	100.00	661.850.000,00	DAK Non Fisik		100.00	661.850.000,00
1.2.42.28	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Gantrung (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gantrung (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Sidorejo	100.00	675.752.500,00	DAK Non Fisik		100.00	675.752.500,00
1.2.42.29	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Geger (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Geger (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Purworejo	100.00	704.012.750,00	DAK Non Fisik		100.00	704.012.750,00
1.2.42.30	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kaibon (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kaibon (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Kaibon	100.00	652.222.750,00	DAK Non Fisik		100.00	652.222.750,00
1.2.42.31	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Bangunsari (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bangunsari (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Dolopo	100.00	704.662.500,00	DAK Non Fisik		100.00	704.662.500,00
1.2.42.32	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Mlilir (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Mlilir (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Kecamatan DOLOPO	100.00	535.362.750,00	DAK Non Fisik		100.00	535.362.750,00
1.2.42.33	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Dagangan (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Dagangan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Dagangan	100.00	723.361.000,00	DAK Non Fisik		100.00	723.361.000,00
1.2.42.34	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Jetis (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jetis (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Jetis	100.00	728.257.750,00	DAK Non Fisik		100.00	728.257.750,00
1.2.42.35	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Wungu (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wungu (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Kecamatan WUNGU	100.00	584.407.750,00	DAK Non Fisik		100.00	584.407.750,00
1.2.42.36	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Mojopurno (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Mojopurno (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Mojopurno	100.00	563.412.500,00	DAK Non Fisik		100.00	563.412.500,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.42.37	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kare (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kare (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Kecamatan KARE	100.00	721.401.750,00	DAK Non Fisik		100.00	721.401.750,00
1.2.42.38	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Gemarang (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gemarang (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Gemarang	100.00	723.462.750,00	DAK Non Fisik		100.00	723.462.750,00
1.2.42.39	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Saradan (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Saradan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Sugihwaras	100.00	728.122.750,00	DAK Non Fisik		100.00	728.122.750,00
1.2.42.40	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Sumbersari (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sumbersari (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Sumbersari	100.00	701.197.250,00	DAK Non Fisik		100.00	701.197.250,00
1.2.42.41	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Pilangkenceng (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pilangkenceng (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Kenongorejo	100.00	690.582.750,00	DAK Non Fisik		100.00	690.582.750,00
1.2.42.42	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Krebet (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Krebet (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Krebet	100.00	629.067.750,00	DAK Non Fisik		100.00	629.067.750,00
1.2.42.43	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Mejayan (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Mejayan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Mejayan	100.00	708.942.750,00	DAK Non Fisik		100.00	708.942.750,00
1.2.42.44	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Klecorejo (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klecorejo (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Klecorejo	100.00	530.802.500,00	DAK Non Fisik		100.00	530.802.500,00
1.2.42.45	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Wonoasri (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wonoasri (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Wonoasri	100.00	707.022.750,00	DAK Non Fisik		100.00	707.022.750,00
1.2.42.46	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Balerejo (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Balerejo (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Balerejo	100.00	754.739.250,00	DAK Non Fisik		100.00	754.739.250,00
1.2.42.47	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Simo (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Simo (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Simo	100.00	564.092.500,00	DAK Non Fisik		100.00	564.092.500,00
1.2.42.48	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Madiun (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Madiun (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Tiron	100.00	532.552.250,00	DAK Non Fisik		100.00	532.552.250,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.42.49	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Dimong (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Dimong (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Dimong	100.00	532.482.750,00	DAK Non Fisik		100.00	532.482.750,00
1.2.42.50	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Sawahan (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sawahan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Kajang	100.00	623.487.000,00	DAK Non Fisik		100.00	623.487.000,00
1.2.42.51	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Jiwan (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jiwan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Jiwan	100.00	614.272.750,00	DAK Non Fisik		100.00	614.272.750,00
1.2.42.52	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Klagen Serut (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klagen Serut (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Klagenserut	100.00	581.462.250,00	DAK Non Fisik		100.00	581.462.250,00
1.2.42.53	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (DAK NON Fisik)	Persentase Kegiatan Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Berjalan Lancar	Desa Jiwan	100.00	890.000.000,00	DAK Non Fisik		100.00	890.000.000,00
1.2.42.54	Bantuan Operasional Kegiatan UKM Kabupaten	Persentase Kegiatan BOK UKM Kabupaten (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	Desa Jiwan	100.00	1.314.006.000,00	DAK Non Fisik		100.00	2.084.872.157,00
1.2.43	Program Penyelenggaraan BLUD Puskesmas	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD		100.00	32.434.889.563,00			100.00	33.681.674.278,00
1.2.43.1	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kebonsari	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Kebonsari	Desa Singgahan	100.00	820.899.056,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	845.456.027,00
1.2.43.2	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Gantrung	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Gantrung	Desa Sidorejo	100.00	1.087.050.000,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.111.320.000,00
1.2.43.3	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Geger	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Geger	Desa Purworejo	100.00	1.180.000.000,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.190.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.43.4	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kaibon	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Kaibon	Desa Kaibon	100.00	1.010.955.918,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.041.284.595,00
1.2.43.5	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Bangunsari	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Bangunsari	Desa Dolopo	100.00	1.062.281.040,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.083.526.661,00
1.2.43.6	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Dagangan	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Dagangan	Desa Dagangan	100.00	1.404.055.808,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.502.339.715,00
1.2.43.7	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Wungu	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Wungu	Kecamatan WUNGU	100.00	1.047.900.000,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.049.400.000,00
1.2.43.8	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Mojopurno	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Mojopurno	Desa Mojopurno	100.00	1.124.422.500,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.146.910.950,00
1.2.43.9	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kare	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Kare	Kecamatan KARE	100.00	1.970.790.728,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	2.069.330.264,00
1.2.43.10	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Gemarang	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Gemarang	Desa Gemarang	100.00	2.505.413.998,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	2.580.576.418,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.43.11	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Saradan	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Saradan	Desa Sugihwaras	100.00	2.055.653.600,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	2.261.218.960,00
1.2.43.12	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Sumbersari	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Sumbersari	Desa Sumbersari	100.00	1.787.173.000,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.912.275.000,00
1.2.43.13	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Pilangkenceng	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Pilangkenceng	Desa Kenongorejo	100.00	1.604.542.755,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.652.679.038,00
1.2.43.14	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kreet	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Kreet	Desa Kreet	100.00	1.312.259.000,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.362.259.000,00
1.2.43.15	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Mejayan	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Mejayan	Desa Mejayan	100.00	1.155.000.000,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.212.000.000,00
1.2.43.16	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Klecorejo	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Klecorejo	Desa Klecorejo	100.00	1.145.338.800,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.180.957.976,00
1.2.43.17	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Wonoasri	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Wonoasri	Desa Wonoasri	100.00	1.245.788.930,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.332.994.156,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.43.18	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Balerejo	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Balerejo	Desa Balerejo	100.00	2.500.919.799,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	2.575.947.393,00
1.2.43.19	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Simo	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Simo	Desa Simo	100.00	888.080.748,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	899.780.748,00
1.2.43.20	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Jiwan	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Jiwan	Desa Jiwan	100.00	1.219.645.000,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.230.645.000,00
1.2.43.21	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Mlilir	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Mlilir	Kecamatan DOLOPO	100.00	495.196.500,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	497.196.500,00
1.2.43.22	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Jetis	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Jetis	Desa Jetis	100.00	1.084.932.000,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	1.084.932.000,00
1.2.43.23	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Madiun	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Madiun	Desa Tiron	100.00	566.115.645,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	617.021.960,00
1.2.43.24	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Dimong	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Dimong	Desa Dimong	100.00	525.211.283,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	530.463.394,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.43.25	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Sawahan	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Sawahan	Desa Kajang	100.00	800.528.400,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	873.684.600,00
1.2.43.26	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Klagenserut	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD Klagenserut	Desa Klagenserut	100.00	834.735.055,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	837.473.923,00
1.2.48	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Persentase puskesmas yang memberikan pelayanan JKN sesuai standar		100.00	5.205.150.000,00			100.00	5.738.577.875,00
1.2.48.59	Pelatihan Tenaga Kesehatan dan atau Tenaga Administrasi pada Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Cukai)	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih sesuai kompetensinya	Desa Jiwan	270.00	737.150.000,00	DBHCHT		270.00	812.707.875,00
1.2.48.61	Pelayanan Kesehatan Promotif/ Preventif/ Rehabilitatif (Cukai)	Persentase kegiatan kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan	Desa Jiwan	45.00	450.000.000,00	DBHCHT		45.00	1.239.540.750,00
1.2.48.63	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (CUKAI)	Persentase alat kesehatan yang diadakan	Desa Jiwan	60.00	4.018.000.000,00	DBHCHT		60.00	3.686.329.250,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 1.2.2 RSUD Caruban

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				121.524.316.079,00				71.271.369.430,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1.2	Kesehatan				121.524.316.079,00				71.271.369.430,00
1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana, prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit yang layak fungsi		100.00	39.018.871.579,00			0.00	1.000.000.000,00
1.2.26.82	Pembangunan Gedung Pelayanan Rumah Sakit	Terbangunnya gedung pelayanan rumah sakit	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	37.000.000.000,00	Dana Insentif Daerah		1.00	500.000.000,00
1.2.33	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar		92.00	66.000.000.000,00			94.00	59.751.600.000,00
		Persentase Capaian SPM bidang Pelayanan sesuai Standar		80.00				82.00	
		Persentase Capaian SPM bidang Peneunjang sesuai Standar		80.00				82.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Capaian SPMBagian tata usaha sesuai Standar		60.00				70.00	
1.2.33.22	Operasional Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase operasional pelayanan dan pendukung pelayananan yang terpenuhi	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	66.000.000.000,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	59.751.600.000,00
1.2.47	Program pelayanan kesehatan Rujukan (DAK)	Prosentase sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit yang layak fungsi		100.00	14.399.905.000,00			0.00	10.000.000.000,00
1.2.47.30	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Penunjang Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan penunjang RS yang tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	2.434.886.000,00	DAK Fisik		1.00	5.000.000.000,00
1.2.47.31	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan pelayanan RS yang tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	10.115.019.000,00	DAK Fisik		10.00	3.000.000.000,00
1.2.47.32	Pengadaan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah prasarana RS yang tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	1.850.000.000,00	DAK Fisik		1.00	2.000.000.000,00
1.2.48	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Prosentase sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit yang layak fungsi		100.00	2.105.539.500,00			0.00	519.769.430,00
1.2.48.63	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (CUKAI)	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	2.105.539.500,00	DBHCHT		1.00	519.769.430,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 1.2.2 RSUD Caruban

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				121.524.316.079,00				71.271.369.430,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1.2	Kesehatan				121.524.316.079,00				71.271.369.430,00
1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana, prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit yang layak fungsi		100.00	39.018.871.579,00			0.00	1.000.000.000,00
1.2.26.82	Pembangunan Gedung Pelayanan Rumah Sakit	Terbangunnya gedung pelayanan rumah sakit	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	37.000.000.000,00	Dana Insentif Daerah		1.00	500.000.000,00
1.2.33	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar		92.00	66.000.000.000,00			94.00	59.751.600.000,00
		Persentase Capaian SPM bidang Pelayanan sesuai Standar		80.00				82.00	
		Persentase Capaian SPM bidang Peneunjang sesuai Standar		80.00				82.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Capaian SPMBagian tata usaha sesuai Standar		60.00				70.00	
1.2.33.22	Operasional Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase operasional pelayanan dan pendukung pelayananan yang terpenuhi	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	66.000.000.000,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	59.751.600.000,00
1.2.47	Program pelayanan kesehatan Rujukan (DAK)	Prosentase sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit yang layak fungsi		100.00	14.399.905.000,00			0.00	10.000.000.000,00
1.2.47.30	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Penunjang Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan penunjang RS yang tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	2.434.886.000,00	DAK Fisik		1.00	5.000.000.000,00
1.2.47.31	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan pelayanan RS yang tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	10.115.019.000,00	DAK Fisik		10.00	3.000.000.000,00
1.2.47.32	Pengadaan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah prasarana RS yang tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	1.850.000.000,00	DAK Fisik		1.00	2.000.000.000,00
1.2.48	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Prosentase sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit yang layak fungsi		100.00	2.105.539.500,00			0.00	519.769.430,00
1.2.48.63	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (CUKAI)	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	2.105.539.500,00	DBHCHT		1.00	519.769.430,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 1.2.3 RSUD Dolopo

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				51.086.872.000,00				46.203.206.339,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1.2	Kesehatan				51.086.872.000,00				46.203.206.339,00
1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Prosesntase SPM bidang penunjang tercapai		90.63	17.300.000.000,00			93.75	1.000.000.000,00
1.2.26.1	Pembangunan Rumah Sakit	jumlah gedung yang diadakan	Desa Dolopo	2.00	17.300.000.000,00	Dana Alokasi Umum		2.00	1.000.000.000,00
1.2.33	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Prosentase Cost Recovery Rate		65.00	24.200.000.000,00			70.00	23.603.206.339,00
1.2.33.7	Operasional dan Pengembangan Rumah Sakit	Prosentase Operasional pelayanan dan pendukung pelayanan yang terpenuhi	Desa Dolopo	100.00	24.200.000.000,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	23.603.206.339,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.47	Program pelayanan kesehatan Rujukan (DAK)	gedung dan alat kesehatan yang diadakan		35.00	9.586.872.000,00			45.00	21.600.000.000,00
1.2.47.64	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)	GEdung dan alah kesehatan yang diadakan	Desa Dolopo	3.00	9.586.872.000,00	DAK Fisik		3.00	21.600.000.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 1.2.3 RSUD Dolopo

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				51.086.872.000,00				46.203.206.339,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1.2	Kesehatan				51.086.872.000,00				46.203.206.339,00
1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Prosesntase SPM bidang penunjang tercapai		90.63	17.300.000.000,00			93.75	1.000.000.000,00
1.2.26.1	Pembangunan Rumah Sakit	jumlah gedung yang diadakan	Desa Dolopo	2.00	17.300.000.000,00	Dana Alokasi Umum		2.00	1.000.000.000,00
1.2.33	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Prosentase Cost Recovery Rate		65.00	24.200.000.000,00			70.00	23.603.206.339,00
1.2.33.7	Operasional dan Pengembangan Rumah Sakit	Prosentase Operasional pelayanan dan pendukung pelayanan yang terpenuhi	Desa Dolopo	100.00	24.200.000.000,00	Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)		100.00	23.603.206.339,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.47	Program pelayanan kesehatan Rujukan (DAK)	gedung dan alat kesehatan yang diadakan		35.00	9.586.872.000,00			45.00	21.600.000.000,00
1.2.47.64	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)	GEdung dan alah kesehatan yang diadakan	Desa Dolopo	3.00	9.586.872.000,00	DAK Fisik		3.00	21.600.000.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 1.5.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				2.546.644.839,00				2.195.106.181,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				2.546.644.839,00				2.195.106.181,00
1.5.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)		80.00	490.178.023,00			85.00	548.350.029,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81.00				82.00	
1.5.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	Wilayah Kabupaten Madiun	8.00	470.178.023,00	Dana Alokasi Umum		8.00	527.350.029,00
		jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Belum Ada	14.00				14.00	
		persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantir yang layak fungsi	Belum Ada	100.00				100.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	jumlah dokumen pemerintahan (perencanaan, pelaporan dan evaluasi) yang tersusun	Wilayah Kabupaten Madiun	15.00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum		15.00	21.000.000,00
1.5.28	Program Penanggulangan Bencana	persentase informasi/laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti		100.00	2.056.466.816,00			100.00	1.646.756.152,00
1.5.28.1	Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Wilayah Kabupaten Madiun	7.00	917.292.116,00	Dana Alokasi Umum		7.00	900.756.152,00
		jumlah SDM yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	Belum Ada	70.00				70.00	
		jumlah sekolah/madrasah yang dilatih penanggulangan bencana	Belum Ada	3.00				3.00	
1.5.28.2	Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana	jumlah logistik yang diadakan	Wilayah Kabupaten Madiun	500.00	824.264.700,00	Dana Alokasi Umum		500.00	396.000.000,00
1.5.28.3	Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	jumlah SDM yang terlatih jitupasna	Wilayah Kabupaten Madiun	50.00	314.910.000,00	Dana Alokasi Umum		50.00	350.000.000,00
		persentase pemulihan rumah yang rusak akibat dampak bencana	Belum Ada	100.00				100.00	

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 2.1.1 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				4.611.426.176,00				5.424.899.956,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.1	Tenaga Kerja				4.551.923.476,00				5.364.206.521,00
2.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah		80.00	1.095.972.037,00			85.00	762.081.781,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		83.00				85.00	
2.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	970.247.037,00	Dana Alokasi Umum		12.00	562.081.781,00
		Jumlah ASN yang mengikuti BinteK, Kursus, dan Pelatihan	Belum Ada	30.00				30.00	
		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang Layak Fungsi	Belum Ada	100.00				100.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	Wilayah Kabupaten Madiun	13.00	125.725.000,00	Dana Alokasi Umum		13.00	200.000.000,00
2.1.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Bekerja		73.00	819.007.525,00			75.00	1.206.160.778,00
2.1.15.11	Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Berbasis Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan yang Bersertifikasi	Wilayah Kabupaten Madiun	80.00	750.000.000,00	Dana Alokasi Umum		128.00	1.078.160.778,00
2.1.15.23	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi	Wilayah Kabupaten Madiun	60.00	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum		60.00	36.000.000,00
2.1.15.24	Pelatihan dan Pemantauan Peningkatan Produktivitas Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pemantauan Produktivitas Kerja	Wilayah Kabupaten Madiun	150.00	34.007.525,00	Dana Alokasi Umum		180.00	92.000.000,00
2.1.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan		68.00	1.197.373.797,00			69.00	1.417.602.443,00
2.1.16.10	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	Wilayah Kabupaten Madiun	120.00	331.238.547,00	Dana Alokasi Umum		160.00	533.000.009,00
2.1.16.11	Pelatihan Pengelolaan Edukasi Reminten bagi Keluarga TKI	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Keluarga TKI yang Mandiri	Wilayah Kabupaten Madiun	1100.00	333.763.250,00	Dana Alokasi Umum		1000.00	344.602.443,00
2.1.16.22	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang dilayani Bimbingan Jabatan	Wilayah Kabupaten Madiun	2500.00	532.372.000,00	Dana Alokasi Umum		2500.00	539.999.991,00
2.1.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja per Tahun		80.00	439.570.117,00			85.00	448.361.519,00
2.1.17.15	Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	Wilayah Kabupaten Madiun	20.00	312.570.117,00	Dana Alokasi Umum		20.00	315.361.519,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.17.16	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Jumlah Syarat Kerja dan PP/PKB yang disusun	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum		30.00	58.000.000,00
2.1.17.18	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten	Jumlah Rumusan Kebijakan/Rekomendasi terkait UMK	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	72.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	75.000.000,00
2.1.21	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Tenaga Kerja (Cukai)	Persentase Peserta Pelatihan yang Mandiri		65.00	1.000.000.000,00			70.00	1.530.000.000,00
2.1.21.1	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan Kerja yang Bersertifikat	Wilayah Kabupaten Madiun	128.00	1.000.000.000,00	DBHCHT		156.00	1.530.000.000,00
3	Urusan Pilihan								
3.8	Transmigrasi				59.502.700,00				60.693.435,00
3.8.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase Transmigran yang Berhasil		100.00	59.502.700,00			100.00	60.693.435,00
3.8.15.9	Pengarahan, Kerjasama, dan Fasilitasi Pemandahan Transmigran	Jumlah Transmigran Siap Berangkat	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	59.502.700,00	Dana Alokasi Umum		2.00	60.693.435,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 2.8.1 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				10.412.212.904,00				9.771.337.063,28
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				632.836.031,00				485.661.138,93
2.2.20	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam ekonomi		51.70	212.836.031,00			51.73	217.092.751,11
2.2.20.1	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam bidang ekonomi	Wilayah Kabupaten Madiun	51.70	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum		51.70	100.000.000,00
2.2.20.2	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	-Jumlah lembaga berbasis gender yang aktif	Wilayah Kabupaten Madiun	67.00	112.836.031,00	Dana Alokasi Umum		67.00	117.092.751,11
2.2.21	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak		0.04	420.000.000,00			0.04	268.568.387,82

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.21.3	Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah dokumen data gender dan anak	Wilayah Kabupaten Madiun	4.00	100.510.000,00	Dana Alokasi Umum		4.00	90.000.000,00
2.2.21.12	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak	Jumlah pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	96.510.000,00	Dana Alokasi Umum		12.00	83.568.387,82
2.2.21.13	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Forum Anak dan lembaga layanan anak yang terfasilitasi	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	222.980.000,00	Dana Alokasi Umum		2.00	95.000.000,00
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				9.779.376.873,00				9.285.675.924,35
2.8.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	-Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah (skor)		75.00	928.000.000,00			80.00	544.860.877,88
		Nilai SAKIP OPD		80.00				80.05	
2.8.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	-Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Wilayah Kabupaten Madiun	14.00	920.000.000,00	Dana Alokasi Umum		14.00	536.860.877,88
		-Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	Belum Ada	10.00				10.00	
		-Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Belum Ada	100.00				100.00	
2.8.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Wilayah Kabupaten Madiun	19.00	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum		19.00	8.000.000,00
2.8.15	Program Keluarga Berencana	Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif		76.00	6.448.779.538,00			76.95	6.577.755.129,00
2.8.15.3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah promosi hak reproduksi individu yang dilakukan	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum		12.00	65.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Kelompok KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP	Wilayah Kabupaten Madiun	61.00	171.920.038,00	Dana Alokasi Umum		61.00	165.000.000,00
2.8.15.8	Pelayanan KB	Jumlah peserta KB baru	Wilayah Kabupaten Madiun	23220.00	287.500.000,00	Dana Alokasi Umum		23220.00	247.500.000,00
2.8.15.16	Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Wilayah Kabupaten Madiun	15.00	4.201.365.000,00	DAK Non Fisik		15.00	4.621.500.000,00
2.8.15.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (DAK Fisik)	Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program Kependudukan dan KB	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	1.666.317.000,00	DAK Fisik		4.00	1.411.255.100,00
2.8.15.26	Standarisasi kapasitas tenaga kesehatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)	Jumlah tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi/mendapat sertifikat CTU	Wilayah Kabupaten Madiun	20.00	76.677.500,00	Dana Alokasi Umum		20.00	67.500.029,00
2.8.25	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur yang tidak ber KB karena unmet need		9.87	2.010.297.335,00			9.67	1.864.974.606,95
2.8.25.9	Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	Jumlah kader IMP yang mandiri	Wilayah Kabupaten Madiun	643.00	1.679.800.000,00	Dana Alokasi Umum		643.00	1.694.936.090,00
2.8.25.10	Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	-Jumlah publikasi program melalui media elektronik dan non elektronik	Wilayah Kabupaten Madiun	3.00	117.397.335,00	Dana Alokasi Umum		3.00	65.000.000,00
2.8.25.22	Peningkatan Kapasitas Pengendalian Penduduk	-Jumlah dokumen dan data informasi kependudukan	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	112.000.000,00	Dana Alokasi Umum		2.00	46.038.516,00
2.8.25.23	Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Madiun	-Jumlah kampung KB yang mandiri	Wilayah Kabupaten Madiun	31.00	101.100.000,00	Dana Alokasi Umum		31.00	59.000.000,95
2.8.26	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 tahun		7.25	392.300.000,00			7.10	298.085.310,52

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.8.26.12	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang aktif	Wilayah Kabupaten Madiun	200.00	113.300.000,00	Dana Alokasi Umum		200.00	93.085.312,52
2.8.26.13	Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Kader Tri Bina dan kelompok PIK Remaja yang aktif	Wilayah Kabupaten Madiun	1440.00	279.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1440.00	204.999.998,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 2.3.1 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				1.420.508.061,00				1.589.783.835,15
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.3	Pangan				1.420.508.061,00				1.589.783.835,15
2.3.8	Program Pelayanan Kesekretariatan				728.851.011,00				612.737.236,00
2.3.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	648.888.861,00	Dana Alokasi Umum		100.00	585.000.000,00
2.3.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Wilayah Kabupaten Madiun	6.00	79.962.150,00	Dana Alokasi Umum		6.00	27.737.236,00
2.3.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		81.00	229.157.050,00			81.50	492.971.211,39

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3.15.1	Penanganan daerah rawan pangan	Jumlah dokumen rawan pangan yang dimanfaatkan	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	68.902.500,00	Pajak Rokok		2.00	190.000.000,00
2.3.15.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok (Pajak Rokok)	Jumlah dokumen terkait harga pangan yang dimanfaatkan	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	47.590.000,00	Pajak Rokok		1.00	58.000.000,00
2.3.15.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan pemerintah	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	86.254.550,00	Pajak Rokok		5.00	213.971.211,39
2.3.15.47	Analisis Ketersediaan Pangan	Jumlah dokumen pangan daerah yang dimanfaatkan	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	26.410.000,00	Pajak Rokok		2.00	31.000.000,00
2.3.16	Program Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		76.00	262.500.000,00			77.00	334.757.284,76
2.3.16.3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah dokumen terkait konsumsi pangan yang dimanfaatkan	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	65.000.000,00	Pajak Rokok		1.00	67.500.000,00
2.3.16.4	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah Kegiatan Promosi	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	112.500.000,00	Pajak Rokok		2.00	92.257.284,76
2.3.16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah Masyarakat yang dilatih dan dibina	Wilayah Kabupaten Madiun	250.00	50.000.000,00	Pajak Rokok		250.00	70.000.000,00
2.3.16.43	Pengembangan Olahan Pangan Lokal	Jumlah Masyarakat (Kelompok Olahan Pangan, KWT dan PKK) yang dilatih dan dibina	Wilayah Kabupaten Madiun	15.00	35.000.000,00	Pajak Rokok		15.00	105.000.000,00
2.3.17	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Pangan (CUKAI)	Produk unggulan olahan pangan lokal		2.00	200.000.000,00			2.00	149.318.103,00
2.3.17.2	Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat Melalui Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal (Cukai)	Jumlah masyarakat (Kelompok Olahan Pangan, KWT, dan PKK) yang dilatih dan dibina	Wilayah Kabupaten Madiun	80.00	200.000.000,00	DBHCHT		80.00	149.318.103,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 2.5.1 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				10.956.462.945,00				8.627.845.392,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.5	Lingkungan Hidup				10.956.462.945,00				8.627.845.392,00
2.5.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.00	1.626.398.370,00			85.00	1.377.011.195,00
2.5.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	1.473.898.370,00	Dana Alokasi Umum		100.00	1.225.417.445,00
2.5.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Wilayah Kabupaten Madiun	14.00	152.500.000,00	Dana Alokasi Umum		14.00	151.593.750,00
2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan		36.36	983.599.190,00			40.90	719.309.729,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.16.24	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup (Pajak Rokok)	Persentase sarana prasarana pengendalian lingkungan hidup yang tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	125.000.000,00	Pajak Rokok		100.00	110.000.000,00
2.5.16.25	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah pembnaan sekolah Adiwiyata di Kab. Madiun	Wilayah Kabupaten Madiun	93.00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum		93.00	380.704.729,00
		Jumlah peserta pelatihan Biopori	Belum Ada	93.00				93.00	
		Jumlah peserta pemilihan putra putri lingkungan hidup Kab. Madiun	Belum Ada	50.00				50.00	
2.5.16.27	Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium yang disediakan	Wilayah Kabupaten Madiun	6.00	50.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		6.00	178.605.000,00
		Persentase sarana prasarana laboratorium yang tersedia	Belum Ada	50.00				50.00	
2.5.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola		22.10	5.525.965.385,00			22.50	3.294.513.218,00
2.5.24.15	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibangun	Wilayah Kabupaten Madiun	3.00	4.500.000.000,00	Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah		3.00	2.579.450.179,00
2.5.24.31	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah fasilitas taman yang terpelihara	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	985.965.385,00	Dana Alokasi Umum		12.00	672.516.009,00
2.5.24.33	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman dan monumen	Jumlah lokasi pemakaman dan monumen yang terpelihara	Wilayah Kabupaten Madiun	4.00	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum		4.00	42.547.030,00
2.5.25	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah dan Limbah Domestik	Persentase sampah yang tertangani		45.00	2.100.500.000,00			50.00	2.291.185.143,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.25.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	kendaraan dinas/operasional persampahan yang terpelihara	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	1.320.500.000,00	Dana Alokasi Umum		12.00	801.931.742,00
2.5.25.40	Fasilitasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Penanganan fisik lokasi titik pantau yang ditangani	Wilayah Kabupaten Madiun	60.00	130.000.000,00	Dana Alokasi Umum		60.00	54.573.750,00
		Jumlah dokumen laporan penilaian Adipura	Belum Ada	3.00				3.00	
2.5.25.43	Operasional dan Pemeliharaan Persampahan	Jumlah operasional TPA Kaliabu	Wilayah Kabupaten Madiun	4.00	450.000.000,00	Dana Alokasi Khusus		4.00	334.679.641,00
		Jumlah peralatan kerja kebersihan yang diadakan	Belum Ada	1.00				1.00	
2.5.25.44	Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	Persentase Trotoar yang Terpelihara	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	1.100.000.010,00
		Persentase drainase yang terpelihara	Belum Ada	100.00				100.00	
2.5.26	Program Perlindungan Fungsi, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Sumber daya Hayati dan Adaptasi serta Mitigasi Perubahan Iklim	Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air		43.40	720.000.000,00			48.50	945.826.107,00
2.5.26.6	Pengendalian Pencemaran dan Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup (DAK)	Jumlah IPAL yang terbangun	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	100.000.000,00	DAK Fisik		10.00	805.608.878,00
2.5.26.7	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Luas areal penghijauan	Wilayah Kabupaten Madiun	30.00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum		30.00	64.236.898,00
		Jumlah koordinasi dan FGD lintas sektoral yang terlaksana	Belum Ada	12.00				12.00	
		Jumlah lokasi rencana pembangunan embung	Belum Ada	1.00				1.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.26.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah satwa yang dipelihara dan dikembangkan	Wilayah Kabupaten Madiun	31.00	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum		31.00	75.980.331,00
2.5.26.47	Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup	-	Wilayah Kabupaten Madiun	2000.00	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum		0.00	0,00
2.5.26.48	Bina Lingkungan	-	Wilayah Kabupaten Madiun	4.00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum		0.00	0,00
2.5.26.49	Gerakan Penghijauan	-	Wilayah Kabupaten Madiun	2000.00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum		0.00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 2.6.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				4.036.839.646,00				7.339.868.577,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.6	Administrasi Kependudukan dan Cakil				4.036.839.646,00				7.339.868.577,00
2.6.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah		85.00	1.024.294.646,00			90.00	1.336.510.442,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.00				80.00	
2.6.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Wilayah Kabupaten Madiun	16.00	937.294.646,00	Dana Alokasi Umum		16.00	1.211.510.442,00
		Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Belum Ada	89.00				89.00	
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus, dan pelatihan	Belum Ada	7.00				7.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.6.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	-Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Wilayah Kabupaten Madiun	6.00	87.000.000,00	Dana Alokasi Umum		6.00	125.000.000,00
		Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Belum Ada	16.00				16.00	
2.6.16	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	- Persentase penduduk yang sudah memiliki kartu identitas		83.50	1.270.550.000,00			87.00	2.770.522.904,00
2.6.16.6	Pengadaan Tinta Cetak e-KTP (DAK)	- Tinta cetak eKTP yang tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	300.000.000,00	DAK Non Fisik		1.00	408.800.000,00
2.6.16.7	Pemeliharaan Peralatan SIAK (DAK)	- peralatan siak yang terpelihara	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	150.000.000,00	DAK Non Fisik		1.00	200.000.000,00
2.6.16.8	Pengadaan Blangko Kartu Keluarga (DAK)	- Blangko KK yang tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	234.050.000,00	DAK Non Fisik		1.00	450.184.000,00
2.6.16.9	Penerbitan Kartu Identitas Anak	- Kartu Identitas Anak yang tercetak	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	316.500.000,00	Dana Alokasi Umum		12.00	1.121.705.893,00
2.6.16.23	Pengadaan Tinta Komputer SIAK	- Tinta Komputer SIAK yang tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	229.626.679,00
2.6.16.45	Pemeliharaan Peralatan KTP Elektronik	- Peralatan KTP EI yang terpelihara	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum		12.00	360.206.332,00
2.6.17	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	-Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil		98.50	354.000.000,00			98.80	710.000.000,00
2.6.17.3	Pengadaan Blangko dan Formulir Akta Catatan Sipil (DAK)	- JUMLAH BLANGKO AKTA-AKTA PENCATATAN SIPIL YANG TERSEDIA	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	100.000.000,00	DAK Non Fisik		1.00	210.000.000,00
2.6.17.4	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	- Pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang terlaksana	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	254.000.000,00	DAK Non Fisik		12.00	500.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.6.18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Persentase database kependudukan yang valid dan update		94.50	785.000.000,00			94.80	2.083.952.427,00
2.6.18.2	Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)	- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan yang dilaksanakan	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	298.500.000,00	DAK Non Fisik		12.00	387.199.500,00
2.6.18.3	Penyusunan Buku Agregat dan Profil Kependudukan (DAK)	- Jumlah Buku Agregat Kependudukan yang tercetak	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	86.500.000,00	DAK Non Fisik		1.00	129.145.000,00
2.6.18.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	- Rapat koordinasi yang terfasilitasi	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	150.000.000,00	DAK Non Fisik		12.00	150.000.000,00
2.6.18.17	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	- Data kependudukan yang valid dan update	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	250.000.000,00	Dana Alokasi Umum		12.00	1.417.607.927,00
2.6.19	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	- Presentase pemanfaatan data kependudukan		63.50	602.995.000,00			64.00	438.882.804,00
2.6.19.2	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	- Jumlah Dokumen IKM yang tersusun	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	192.495.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	203.282.804,00
2.6.19.3	Pendampingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Dokumen sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang tersusun	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	52.500.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	40.000.000,00
2.6.19.4	Penataan Arsip Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	- Arsip dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tertata	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	358.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	195.600.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 2.7.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				3.549.173.040,00				4.073.835.198,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				3.549.173.040,00				4.073.835.198,00
2.7.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)		80.00	1.360.545.668,00			85.00	1.095.347.624,00
		Nilai SAKIP PD		80.00				81.00	
2.7.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek, Kursus dan Pelatihan	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	1.335.545.668,00	Dana Alokasi Umum		12.00	1.060.347.625,00
		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	Belum Ada	13.00				13.00	
		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang layak fungsi	Belum Ada	100.00				100.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.7.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Wilayah Kabupaten Madiun	19.00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum		19.00	34.999.999,00
2.7.21	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan	Persentase BUMDes yang Aktif		24.00	354.659.000,00			33.00	389.493.770,00
		Persentase Lembaga Ekonomi yang Aktif		44.00				57.00	
2.7.21.6	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pasar Desa yang Aktif	Wilayah Kabupaten Madiun	30.00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum		30.00	197.555.700,00
		Jumlah BUMDes yang Aktif	Belum Ada	48.00				48.00	
		Jumlah Desa yang mendapat nominasi Desa Mawa Cara Award	Belum Ada	5.00				5.00	
		Jumlah UPK Gerdu Taskin UPKu PPKM yang Aktif	Belum Ada	18.00				18.00	
		Jumlah Lembaga UED yang Aktif	Belum Ada	24.00				24.00	
2.7.21.15	Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Banprov	Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dari Provinsi Jatim	Wilayah Kabupaten Madiun	7.00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum		7.00	33.299.999,00
2.7.21.25	Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Kabupaten	Jumlah Desa yang mendapat pendampingan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dari Pemkab Madiun	Wilayah Kabupaten Madiun	6.00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum		6.00	28.000.000,00
2.7.21.26	Pemberdayaan teknologi tepat guna dan sumber daya alam	Jumlah Desa yang menghasilkan produk replikasi pasca bursa inovasi Desa	Wilayah Kabupaten Madiun	30.00	39.659.000,00	Dana Alokasi Umum		30.00	80.300.000,00
		Jumlah Lembaga HIPAM yang Aktif	Belum Ada	43.00				43.00	
		Jumlah Lembaga Tepian Hutan yang Aktif	Belum Ada	45.00				45.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.7.21.27	Pengembangan kawasan perdesan dan kerjasama antar desa	Jumlah Desa yang memiliki potensi membentuk kawasan pedesaan untuk pengembangan ekonomi	Wilayah Kabupaten Madiun	3.00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum		3.00	50.338.071,00
		Jumlah Kecamatan yang dibina Pasca PNPB-MPd	Belum Ada	14.00				14.00	
		Jumlah BUMDes Bersama yang terbentuk	Belum Ada	1.00				1.00	
2.7.22	Program Peningkatan Pembangunan dan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Baik		53.00	1.405.087.372,00			71.00	1.725.800.871,00
		Persentase Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif		47.00				55.00	
2.7.22.1	Pendampingan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas untuk pemutakhiran epdeskel	Wilayah Kabupaten Madiun	37.00	458.587.372,00	Dana Alokasi Umum		37.00	549.762.900,00
		Jumlah Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan tepat waktu	Belum Ada	15.00				15.00	
		Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang yang mendapatkan Juara Perlombaan Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten	Belum Ada	5.00				5.00	
		Jumlah Desa/Kelurahan yang telah updating profil Desa/Kelurahan	Belum Ada	148.00				148.00	
		Jumlah KPM yang tersertifikasi	Belum Ada	15.00				15.00	
2.7.22.2	Pemberdayaan dan penataan lembaga masyarakat Desa/ Kelurahan	Jumlah SD yang difasilitasi PMT-AS	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	677.500.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	836.088.000,00
		Jumlah Lembaga Posyandu yang aktif	Belum Ada	435.00				435.00	
		Jumlah LPKMD/K yang aktif	Belum Ada	78.00				78.00	
		Jumlah pengurus LPKMD/K yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya dalam penguatan tugas dan fungsinya	Belum Ada	82.00				82.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah PKK aktif dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	Belum Ada	115.00				115.00	
		Jumlah RT/RW yang aktif	Belum Ada	2790.00				2790.00	
2.7.22.3	Pendukung pemberdayaan sosial budaya masyarakat	Jumlah Desa yang mendapatkan Program TMMD	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	269.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	339.949.971,00
		Jumlah Desa/Kelurahan Juara Penilaian Gotong Royong Terbaik	Belum Ada	5.00				5.00	
		Jumlah dokumen pengukuran keswadayaan masyarakat	Belum Ada	1.00				1.00	
		Jumlah peserta workshop pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	Belum Ada	150.00				150.00	
2.7.23	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase BPD yang berfungsi dengan baik		38.00	428.881.000,00			53.00	863.192.933,00
		Persentase Desa dengan Kapasitas Pemerintah Desa Yang Baik		53.00				63.00	
2.7.23.19	Pengembangan kapasitas pemerintahan dan aparatur desa	Jumlah Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa yang disusun	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	70.752.000,00	Dana Alokasi Umum		5.00	430.000.000,00
		Jumlah Desa yang telah melaksanakan updating data base Pemerintahan Desa	Belum Ada	198.00				198.00	
		Jumlah Kecamatan dan Pemerintahan Desa yang mengikuti kompetensi	Belum Ada	213.00				213.00	
2.7.23.20	Pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa dengan pengelolaan anggaran Desa yang baik	Wilayah Kabupaten Madiun	198.00	299.434.000,00	Dana Alokasi Umum		198.00	369.999.934,00
		Jumlah Regulasi Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Belum Ada	3.00				3.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.7.23.21	Pembinaan pengelolaan administrasi dan aset desa	Jumlah Desa yang melakukan updating data aset Desa	Wilayah Kabupaten Madiun	198.00	31.235.000,00	Dana Alokasi Umum		198.00	43.193.000,00
		Jumlah Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi Desa	Belum Ada	105.00				105.00	
2.7.23.22	Pengembangan kapasitas lembaga desa	Jumlah BPD yang mengikuti peningkatan kompetensi	Wilayah Kabupaten Madiun	198.00	27.460.000,00	Dana Alokasi Umum		198.00	19.999.999,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020****dan Prakiraan Maju Tahun 2021****KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 2.9.1 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				26.412.678.245,00				34.731.649.707,02
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.9	Perhubungan				26.412.678.245,00				34.731.649.707,02
2.9.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.00	1.502.083.488,00			0.00	1.164.798.524,00
2.9.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang terpelihara	Kosong	100.00	1.477.083.488,00	Dana Alokasi Umum		100.00	1.129.798.524,00
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang tersedia	Belum Ada	1.00				100.00	
		Jumlah administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	Belum Ada	100.00				100.00	
		Jumlah Bimbingan Teknis Bidang Perhubungan	Belum Ada	1.00				100.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah Dokumen Evaluasi (Hasil Pelaksanaan program/Kegiatan) yang tersusun	Kosong	2.00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	35.000.000,00
		Jumlah Dokumen Pelaporan (LAKIP, LPPD, Capaian Kinerja, LKPJ, Laporan Tahunan) yang tersusun	Belum Ada	5.00				100.00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKA-RKA Perubahan, DPA-DPA Perubahan, Renstra, Renja-Renja Perubahan) yang tersusun	Belum Ada	8.00				100.00	
2.9.22	Program Manajemen Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah		83.00	1.341.500.000,00				1.416.034.244,00
2.9.22.13	Pemantauan, pengaturan, pengawalan, penegakan disiplin lalu lintas	Jumlah Pemantauan dan Pengendalian Lalu Lintas yang dilaksanakan	Kosong	260.00	400.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		83.00	449.930.908,00
		Jumlah Pengatur, pengawalan, Penegakan Disiplin Lalu Lintas yang diadakan	Belum Ada	260.00				83.00	
2.9.22.14	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Andalalin dan Event Khusus	Jumlah Penyelenggaraan Car Free Day	Kosong	10.00	306.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah		83.00	330.103.336,00
		Jumlah Peserta Inovasi Pelopor Keselamatan Berjalan yang diadakan	Belum Ada	25.00				83.00	
		Jumlah Dokumen Andalalin yang diadakan	Belum Ada	10.00				83.00	
		Jumlah Rekayasa Lalu Lintas Event Khusus yang dilaksanakan	Belum Ada	12.00				83.00	
		Jumlah Dokumen Data Base Kelengkapan Jalan (GIS)	Belum Ada	1.00				83.00	
		Jumlah Kegiatan Forum Lalu Lintas yang ditindak lanjuti	Belum Ada	4.00				83.00	
		Jumlah Penilaian Wahana Tata Nugraha yang dilaksanakan	Belum Ada	1.00				83.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.22.15	Penanganan, pengaturan dan pengawasan titik parkir	Jumlah Tenaga Parkir yang dibina	Kosong	100.00	635.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		83.00	636.000.000,00
2.9.24	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, kelaikan kendaraan, sarana prasarana multimoda dan perkotaan	Persentase kendaraan laik jalan		90.00	2.074.803.500,00			90.00	3.116.781.766,02
2.9.24.1	Penyelenggaraan Manajemen Angkutan dan Keselamatan Jalan, Perkotaan, Sungai dan Danau	Jumlah Angkutan Pelajar yang tersedia	Kosong	1.00	1.586.000.000,00	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah		90.00	2.412.201.806,02
		Jumlah Shelter Bus yang dibangun	Belum Ada	2.00				90.00	
		Jumlah Bus Balik Gratis yang tersedia	Belum Ada	8.00				90.00	
		Jumlah Data Keselamatan Jalan, Perkotaan, Sungai dan Danau yang dilaksanakan	Belum Ada	1.00				90.00	
		Jumlah Halte Bus yang terbangun	Belum Ada	2.00				90.00	
		Jumlah Halte Bus yang terpelihara	Belum Ada	5.00				90.00	
		Jumlah Abdiyasa Teladan yang dilaksanakan	Belum Ada	3.00				90.00	
		Jumlah Multimoda Angkutan Jalan, Sungai, dan Danau yang dioperasikan dan yang disediakan	Belum Ada	1.00				90.00	
2.9.24.2	Penyediaan, Pemeliharaan Alat dan Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikalibrasi	Kosong	12.00	488.803.500,00	Pendapatan Asli Daerah		90.00	704.579.960,00
		Jumlah alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang tersedia	Belum Ada	1.00				90.00	
		Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara (Gedung)	Belum Ada	1.00				90.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan	Belum Ada	1.00				90.00	
2.9.25	Program Sarana Perlengkapan dan Keselamatan Jalan	Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan		65.00	21.494.291.257,00			80.00	29.034.035.173,00
2.9.25.1	Penyediaan sarana dan pemeliharaan sarana keselamatan lalu lintas	Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terpelihara	Kosong	65.00	757.542.995,00	Pajak Rokok		65.00	3.838.542.015,00
		Pengadaan Rambu Lalu Lintas dan Perlintasan Sebidang	Belum Ada	34.00				65.00	
		Jumlah Alat Penunjang Keselamatan Jalan yang Dioperasionalkan dan Dipelihara	Belum Ada	10.00				65.00	
		Jumlah Rambu Lalu Lintas Diperlintasan Kereta Api	Belum Ada	34.00				65.00	
		Jumlah Rambu Lalu Lintas Tidak Bersuar yang diadakan	Belum Ada	65.00				65.00	
		Jumlah Sosialisasi Keselamatan Jalan	Belum Ada	15.00				65.00	
		Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dipasang	Belum Ada	65.00				65.00	
2.9.25.2	Pembangunan, Pengendalian daya, Pemeliharaan alat penerangan jalan (JAP) dan Penyediaan jasa APJ	Jumlah Pengadaan Mobil Crane yang diadakan	Kosong	1.00	20.736.748.262,00	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah		65.00	25.195.493.158,00
		Jumlah Alat Penerangan Jalan (APJ) yang terpelihara	Belum Ada	110.00				65.00	
		Jumlah Tagihan Alat Penerangan Jalan (APJ)	Belum Ada	12.00				65.00	
		Jumlah Jaringan, Tiang dan Lampu Alat Penerangan Jalan (APJ) yang terpasang (titik).	Belum Ada	300.00				65.00	

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 2.10.1 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				5.028.881.334,00				5.354.396.684,46
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.10	Komunikasi dan Informatika				4.578.881.434,00				4.770.844.404,13
2.10.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)		85.00	830.739.113,50			90.00	856.232.936,13
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		82.00				82.00	
2.10.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (SKOR)	Wilayah Kabupaten Madiun	85.00	800.739.113,50	Dana Alokasi Umum		85.00	806.232.936,13
2.10.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kosong	82.00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum		82.00	50.000.000,00
2.10.19	Program Tata Kelola E-Government dan Infrastruktur Jaringan TI dan Komunikasi	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik		19.00	2.800.000.000,00			31.00	2.318.399.664,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.19.3	Penguatan Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Desa/Kelurahan yg dilatih dalam pemanfaatan TIK	Wilayah Kabupaten Madiun	206.00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum		206.00	640.937.061,00
		Jumlah OPD yang dilatih dalam pemanfaatan TIK	Belum Ada	55.00				55.00	
		Jumlah Kebijakan yg mendukung tata kelola e-Gov	Belum Ada	1.00				1.00	
		Jumlah aplikasi e-Gov yang dikembangkan	Belum Ada	82.00				82.00	
2.10.19.4	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Sarana prasarana Teknologi Informasi	Jumlah Jaringan Internet dan Sarpras TI yang terpasang dan terpelihara	Wilayah Kabupaten Madiun	55.00	2.600.000.000,00	Dana Insentif Daerah, DAU Infrastruktur		55.00	1.677.462.603,00
2.10.20	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media massa		325.00	948.142.320,50			350.00	1.596.211.804,00
2.10.20.1	Penyelenggaraan Kemitraan Komunikasi Publik	Jumlah Wartawan yang ikut desiminasi informasi pemerintah daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	514.264.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	1.132.148.600,00
		Jumlah Informasi Pemerintah Daerah yg dipublikasi Advertorial pada media massa	Belum Ada	150.00				150.00	
2.10.20.3	Penyelenggaraan LPPL Radio Puroboyo FM	Jumlah Dialog Interaktif,	Wilayah Kabupaten Madiun	24.00	87.000.000,00	Dana Alokasi Umum		24.00	130.680.000,00
		Jumlah Tenaga Pengelola LPPL Puroboyo FM	Belum Ada	9.00				9.00	
		Jumlah Dokumen LPPL Radio Puroboyo FM,	Belum Ada	1.00				1.00	
2.10.20.4	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah KIM yang dibina	Wilayah Kabupaten Madiun	30.00	192.618.170,50	Dana Alokasi Umum		30.00	112.883.204,00
		Jumlah dokumen PPID Utama yg tersusun	Belum Ada	1.00				1.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah dokumen PPID Pembantu yg tersusun	Belum Ada	10.00				10.00	
2.10.20.6	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah informasi melalui media luar ruang	Wilayah Kabupaten Madiun	50.00	154.260.150,00	Dana Alokasi Umum		50.00	220.500.000,00
		Jumlah cetak kalender	Belum Ada	1850.00				1850.00	
2.14	Statistik				300.000.000,00				332.780.106,58
2.14.15	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Tersedia dan Valid		80.00	300.000.000,00			85.00	332.780.106,58
2.14.15.17	Pengembangan Pusat Data Statistik Sektoral	Jumlah Peserta Pelatihan (55 orang)	Wilayah Kabupaten Madiun	55.00	104.489.750,00	Dana Alokasi Umum		55.00	115.634.026,79
2.14.15.18	Kompilasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	38.596.300,00	Dana Alokasi Umum		55.00	36.610.026,00
2.14.15.20	Penyusunan Data Statistik Kewilayahan	Jumlah Dokumen Data Statistik Kewilayahan	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	104.804.150,00	Dana Alokasi Umum		5.00	122.520.026,79
2.14.15.22	Forum Pengelolaan dan Pemanfaatan data Statistik Sektoral	Jumlah OPD/Instansi Penyedia Data	Wilayah Kabupaten Madiun	55.00	52.109.800,00	Dana Alokasi Umum		55.00	58.016.027,00
2.15	Persandian				149.999.900,00				250.772.173,75
2.15.16	Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang telah melakukan pengklarifikasian informasi		47.54	149.999.900,00			67.21	250.772.173,75
2.15.16.1	Operasional Pengamanan Informasi Persandian	Jumlah Sarpras operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	67.000.000,00	Dana Alokasi Umum		2.00	130.555.430,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.16.2	Penyusunan Kebijakan Persandian	Jumlah Kebijakan Keamanan Informasi yg disusun	Kosong	1.00	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	38.084.418,75
		Jumlah peserta sosialisasi sistem sertifikat elektronik dan tandatangan digital	Belum Ada	80.00				80.00	
2.15.16.3	Pengelolaan Sumber Daya Persandian	Jumlah jaring komunikasi sandi (JKS) berbasis Radio HT yg tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	47.999.900,00	Dana Alokasi Umum		1.00	82.132.325,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 2.11.1 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				11.369.894.080,00				15.589.165.738,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				4.696.712.000,00				5.295.036.994,00
2.11.0	Non Program				2.284.000.000,00				2.914.329.600,00
2.11.8	Program Pelayanan Kesekretariatan		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat	100.00	1.598.712.000,00			100.00	1.293.230.949,00
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.00				0.00	
2.11.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana		Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	Kosong	2.00	1.537.962.000,00	Dana Alokasi Umum	2.00	1.213.693.449,00
			prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Belum Ada	100.00			100.00	
			Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Belum Ada	16.00			16.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kosong	15.00	60.750.000,00	Dana Alokasi Umum		15.00	79.537.500,00
2.11.20	Program Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro		128140.00	169.000.000,00			128168.00	203.836.811,00
2.11.20.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	Kosong	240.00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum		240.00	101.836.811,00
2.11.20.5	Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah wira Usaha Baru	Wilayah Kabupaten Madiun	60.00	69.000.000,00	Pajak Rokok		60.00	102.000.000,00
2.11.21	Program Pengembangan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif		689.00	395.000.000,00			692.00	620.989.634,00
2.11.21.13	Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang dibina	Kosong	337.00	100.000.000,00	Pajak Rokok		337.00	204.000.000,00
2.11.21.14	Pengendalian dan Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang diawasi menuju koperasi sehat	Kosong	41.00	45.000.000,00	Pajak Rokok		41.00	53.550.000,00
2.11.21.15	Fasilitasi advokasi dan Penyuluh hukum Koperasi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi	Kosong	60.00	50.000.000,00	Pajak Rokok		60.00	80.325.000,00
2.11.21.16	Pembinaan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang berprestasi	Kosong	5.00	75.000.000,00	Pajak Rokok		5.00	80.325.000,00
2.11.21.17	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	prosentase koperasi yang volume usahanya meningkat	Kosong	1.68	125.000.000,00	Pajak Rokok		1.68	202.789.634,00
2.11.25	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Koperasi dan usaha Mikro (Cukai)	Jumlah Usaha Mikro yang dibina		100.00	250.000.000,00			100.00	262.650.000,00
2.11.25.1	Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat (Pelatihan Keterampilan Sablon Kaos)	Jumlah UM yang dilatih	Kosong	50.00	100.000.000,00	DBHCHT		50.00	102.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.25.2	Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat (Pelatihan Keterampilan Kerajinan (Craft))	Jumlah UM yang dilatih	Kosong	50.00	150.000.000,00	DBHCHT		50.00	160.650.000,00
3	Urusan Pilihan								
3.6	Perdagangan				6.136.809.630,00			8.657.991.013,00	
3.6.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah sarana perdagangan yang memadai		634.00	3.912.662.000,00			644.00	4.890.318.591,00
3.6.18.13	Revitalisasi Pasar Tradisional (DAK)	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	2.643.162.000,00	Dana Alokasi Khusus		1.00	3.003.318.591,00
3.6.18.79	Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK)	Jumlah sarana metrologi legal yang tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	633.00	1.269.500.000,00	Dana Alokasi Khusus		633.00	1.887.000.000,00
3.6.21	Program Pembinaan dan Peningkatan Pedagang formal	Jumlah Pedagang Formal		7447.00	726.284.030,00			7521.00	844.783.493,00
3.6.21.1	Pengembangan Usaha Perdagangan	Jumlah pedagang yang dibina	Wilayah Kabupaten Madiun	60.00	200.000.000,00	Pajak Rokok		100.00	133.875.000,00
3.6.21.2	Pengembangan Dan Pemasaran Produk Unggulan	Jumlah pedagang yang difasilitasi	Wilayah Kabupaten Madiun	23.00	225.952.116,00	Pajak Rokok		23.00	234.779.214,00
3.6.21.4	Pelayanan Tera Dan Tera Ulang UTTP	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	Wilayah Kabupaten Madiun	2400.00	125.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		2400.00	133.875.000,00
3.6.21.6	Kalibrasi Dan Verifikasi Peralatan Standar Laboratorium Kemetrolgian	Jumlah peralatan Lab. Kemetrolgian yang dikalibrasi dan diverifikasi	Wilayah Kabupaten Madiun	633.00	75.331.914,00	Pajak Rokok		633.00	76.838.552,00
3.6.21.7	Peningkatan Pengawasan pedagang tertib niaga	Jumlah Pedagang tertib niaga	Wilayah Kabupaten Madiun	1500.00	100.000.000,00	Pajak Rokok		1500.00	265.415.727,00
3.6.22	Program Operasi Pasar	Prosentase subsidi harga yang terlaksana		10.00	243.750.000,00			10.00	692.325.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6.22.2	Monitoring Harga Sembako Dan Barang Penting Lainnya	Jumlah Komoditi yang dimonitoring	Wilayah Kabupaten Madiun	28.00	53.750.000,00	Pajak Rokok		28.00	80.325.000,00
3.6.22.3	Penyediaan Data Inflasi Daerah	Jumlah Data Inflasi Daerah yang tersedia	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	100.000.000,00	Pajak Rokok		1.00	76.500.000,00
3.6.22.4	operasi pasar mandiri	Jumlah Operasi pasar yang dilakukan	Kosong	21.00	90.000.000,00	Dana Alokasi Umum		21.00	535.500.000,00
3.6.23	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Jumlah Pasar ber kriteria SNI		2.00	944.863.600,00			2.00	1.877.683.946,00
3.6.23.1	Rehabilitasi Pasar Daerah	Jumlah Pasar yang direhab	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	24.663.600,00	Dana Alokasi Umum		1.00	1.020.000.000,00
3.6.23.2	Pembinaan Petugas Pemungut PAD Pasar Daerah	Jumlah petugas pemungut PAD yang dibina	Wilayah Kabupaten Madiun	30.00	30.000.000,00	Pajak Rokok		30.00	36.817.332,00
3.6.23.3	Peningkatan SDM Bagi Pengelola Dan Pedagang Pasar Daerah	Jumlah pengelola dan pedagang yang dibina	Wilayah Kabupaten Madiun	50.00	30.000.000,00	Pajak Rokok		50.00	67.086.614,00
3.6.23.4	Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Rangka Pelayanan Pasar	Jumlah aparatur yang meningkat kualitasnya	Wilayah Kabupaten Madiun	43.00	277.200.000,00	Pendapatan Asli Daerah		43.00	235.620.000,00
3.6.23.5	Pengelolaan Operasional Keamanan, Kebersihan Dan Kelistrikan Pasar	Jumlah pengelola keamanan, kebersihan dan kelistrikan pasar	Wilayah Kabupaten Madiun	37.00	583.000.000,00	Dana Alokasi Umum		37.00	518.160.000,00
3.6.24	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal				96.530.165,00				100.429.983,00
3.6.25	Program Pembinaan Lingkungan sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Perdagangan (cukai)	Jumlah PKL/ Asongan yang dibina		80.00	212.719.835,00			80.00	252.450.000,00
3.6.25.1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi PKL/Asongan)	Jumlah PKL/ Asongan yang dibina	Wilayah Kabupaten Madiun	80.00	112.719.835,00	DBHCHT		80.00	150.450.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6.25.2	Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat	Jumlah masyarakat/ Kelompok yang dibantu	Wilayah Kabupaten Madiun	15.00	100.000.000,00	DBHCHT		15.00	102.000.000,00
3.7	Perindustrian				536.372.450,00				1.636.137.731,00
3.7.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Prosentase Peningkatan IKM		3.20	336.372.450,00			3.20	371.712.343,00
3.7.16.16	Pendamping Kegiatan APP Bidang Industri	Jumlah Kegiatan Pendampingan	Kosong	1.00	56.372.450,00	Pajak Rokok		1.00	58.649.897,00
3.7.16.30	Fasilitasi Pembiayaan IKM	Jumlah IKM yang difasilitasi	Kosong	34.00	45.000.000,00	Pajak Rokok		34.00	58.062.446,00
3.7.16.31	Pembinaan Dan Pengembangan IKM Melalui Pola OVOP	Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk khas daerah	Kosong	15.00	100.000.000,00	Pajak Rokok		15.00	102.000.000,00
3.7.16.32	Pengembangan Sentra Industri Kreatif	Jumlah Sentra Industri Kreatif	Kosong	24.00	100.000.000,00	Pajak Rokok		24.00	102.000.000,00
3.7.16.33	Fasilitasi Standarisasi Dan Desain Produk IKM	Jumlah IKM yang mendapat rekomendasi (halal, barcode, uji nutrisi, dll)	Kosong	37.00	35.000.000,00	Pajak Rokok		37.00	51.000.000,00
3.7.20	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Perindustrian (Cukai)	Jumlah IKM yang dibina		85.00	200.000.000,00				1.264.425.388,00
3.7.20.1	Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat (Pelatihan Bordir / Konveksi)	Jumlah IKM yang dilatih	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	25.000.000,00	DBHCHT		50.00	102.000.000,00
3.7.20.2	Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat (Pelatihan Pengembangan Makanan/ Minuman Olahan)	Jumlah IKM yang dilatih	Wilayah Kabupaten Madiun	25.00	25.000.000,00	DBHCHT		75.00	152.999.999,00
3.7.20.3	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat	Jumlah IKM yang difasilitasi Promosi	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	100.000.000,00	DBHCHT		35.00	754.425.389,00
3.7.20.4	Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat (Pelatihan Keterampilan Aneka Kerajinan)	Jumlah IKM yang dilatih	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	25.000.000,00	DBHCHT		75.00	153.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.7.20.5	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Pembuatan Paving Press dan Beton Pra Cetak)	Jumlah IKM yang dilatih	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	25.000.000,00	DBHCHT		50.00	102.000.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 2.12.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				2.227.076.374,00				1.921.063.412,50
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.12	Penanaman Modal				1.966.646.677,00				1.687.216.585,50
2.12.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)		88.00	1.249.568.263,00			88.00	601.042.600,50
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.00				80.00	
2.12.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	1.164.568.263,00	Dana Alokasi Umum		5.00	501.042.600,50
		Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Belum Ada	100.00				100.00	
		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Belum Ada	10.00				10.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Wilayah Kabupaten Madiun	15.00	85.000.000,00	Dana Alokasi Umum		15.00	100.000.000,00
2.12.19	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang puas terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		75.00	248.200.800,00			80.00	307.918.819,00
2.12.19.1	Pelayanan Perizinan Usaha	Prosentase Dokumen perizinan usaha yang diterbitkan	Wilayah Kabupaten Madiun	90.00	50.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		90.00	70.000.000,00
		Prosentase ketepatan waktu pelayanan perizinan usaha	Belum Ada	75.00				75.00	
2.12.19.2	Pelayanan Perizinan Tertentu	Prosentase ketepatan waktu pelayanan perizinan tertentu	Wilayah Kabupaten Madiun	70.00	50.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		70.00	70.000.000,00
		Prosentase dokumen perizinan tertentu yang diterbitkan	Belum Ada	90.00				90.00	
2.12.19.3	Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat yang disusun	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	53.201.030,00	Pendapatan Asli Daerah		1.00	70.000.000,00
2.12.19.4	Penyusunan dan Penyajian Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah publikasi data informasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	94.999.770,00	Pajak Rokok		5.00	97.918.819,00
2.12.20	Program Peningkatan Investasi Usaha	Jumlah investor skala besar dan menengah yang berinvestasi di Kab. Madiun		100.00	468.877.614,00			100.00	778.255.166,00
		Prosentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal		60.00				70.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.20.1	Fasilitasi Percepatan Investasi	Jumlah event promosi investasi yang diikuti	Wilayah Kabupaten Madiun	6.00	300.000.000,00	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah		6.00	488.000.000,00
2.12.20.2	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah dokumen rencana pengembangan penanaman modal yang disusun	Kosong	1.00	88.877.614,00	Pendapatan Asli Daerah		1.00	190.255.166,00
2.12.20.3	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM setelah dilakukan pembiinaan dan evaluasi	Wilayah Kabupaten Madiun	50.00	80.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		50.00	100.000.000,00
3	Urusan Pilihan								
3.5	Energi dan Sumberdaya Mineral				260.429.697,00				233.846.827,00
3.5.18	Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		Jumlah energi baru terbarukan yang dikembangkan	1.00	260.429.697,00			1.00	233.846.827,00
		Persentase rekomendasi pemanfaatan ESDM yang diterbitkan		100.00				100.00	
3.5.18.1	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengusahaan Energi Sumber Daya Mineral	Jumlah masyarakat yang dibina dalam pemanfaatan energi baru terbarukan	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	160.429.697,00	Pajak Rokok, Pendapatan Asli Daerah		100.00	143.846.827,00
3.5.18.2	Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengusahaan Energi Sumber Daya Mineral	Persentase kegiatan terkait pemanfaatan ESDM yang tertibkan	Kosong	85.00	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		85.00	90.000.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 2.13.1 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				11.946.961.905,00				11.206.110.067,74
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				2.034.229.973,00				2.698.131.811,00
2.13.0	Non Program				173.261.000,00				205.770.000,00
2.13.8	Program Pelayanan Kesekretariatan		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	85.00	830.664.373,00			90.00	919.062.811,00
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90.00				90.00	
2.13.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Dilaksanakan	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	680.664.373,00	Dana Alokasi Umum		10.00	769.062.811,00
		Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Yang Terpelihara	Belum Ada	100.00				100.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah Dokumen Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum		10.00	150.000.000,00
2.13.24	Program Pengembangan Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah Atlit Yang Berprestasi		10.00	1.030.304.600,00			11.00	1.573.299.000,00
		Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif		6.00				7.00	
2.13.24.1	Peningkatan SDM Kepemudaan	Jumlah Pemuda Kreatif	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	721.879.600,00	Dana Alokasi Umum		10.00	900.000.000,00
		Jumlah Pemuda Pelopor	Belum Ada	5.00				5.00	
		Jumlah Pemuda Berprestasi	Belum Ada	85.00				85.00	
2.13.24.2	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Atlit Berprestasi	Kosong	78.00	117.000.000,00	Dana Alokasi Umum		78.00	225.000.000,00
		Jumlah Atlit dan Wasit Yang Bersertifikat	Belum Ada	60.00				60.00	
2.13.24.3	Peningkatan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Olahraga Yang Melibatkan Masyarakat	Kosong	7.00	191.425.000,00	Dana Alokasi Umum		7.00	448.299.000,00
3	Urusan Pilihan								
3.2	Pariwisata				9.912.731.932,00				8.507.978.256,74
3.2.18	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan		13.00	8.195.537.982,00			14.00	5.007.326.229,00
		Jumlah Pelaku Industri Pariwisata Yang Sudah Dibina		24.00				26.00	
3.2.18.4	Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK)	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	Kosong	49.00	1.948.537.982,00	DAU Infrastruktur		49.00	1.845.884.417,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2.18.5	Pengembangan Daya Tarik Wisata (Penunjang DAK)	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	Kosong	48.00	97.000.000,00	Dana Alokasi Umum		48.00	97.151.812,00
3.2.18.6	Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata	Jumlah Fasilitas yang dibangun di Destinasi Wisata	Kosong	21.00	6.000.000.000,00	DAU Infrastruktur		21.00	2.235.000.000,00
3.2.18.43	Pengembangan Usaha Pariwisata Daerah	Jumlah Usaha Pariwisata Yang Dibina	Kosong	33.00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum		33.00	75.000.000,00
3.2.19	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Even Pariwisata Yang Dilaksanakan		22.00	517.193.950,00			23.00	2.148.132.027,74
		Prosentasi Kelembagaan Pariwisata Yang Dikembangkan		16.00				18.00	
3.2.19.6	Fasilitasi Kerjasama Pariwisata Daerah	Jumlah Kerjasama Pariwisata Yang Dilaksanakan	Wilayah Kabupaten Madiun	7.00	80.880.000,00	Dana Alokasi Umum		7.00	192.733.030,00
3.2.19.43	Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah (DID)	Jumlah Event Pariwisata Yang Dilaksanakan	Wilayah Kabupaten Madiun	21.00	346.313.950,00	Dana Alokasi Umum		21.00	1.955.398.997,74
3.2.19.45	Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Wilayah Kabupaten Madiun	20.00	90.000.000,00	Dana Alokasi Umum		20.00	0,00
3.2.21	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur lingkup Pariwisata(Cukai)	Prosentase Sarana dan Prasarana Pariwisata yang Dibangun Dengan Dana Cukai		15.00	900.000.000,00			15.00	1.046.520.000,00
3.2.21.1	Pembangunan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata (Cukai)	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibangun Dengan Dana Cukai di Destinasi Wisata	Kosong	14.00	900.000.000,00	DBHCHT		14.00	1.046.520.000,00
3.2.22	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Pariwisata (Cukai)	Prosentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dibiina Dengan Dana Cukai		80.00	300.000.000,00			80.00	306.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2.22.1	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat lingkup pariwisata (Cukai)	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dibina Dengan Dana Cukai	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	300.000.000,00	DBHCHT		100.00	306.000.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 2.17.1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				1.875.414.684,00				1.211.015.004,72
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.17	Perpustakaan				1.616.336.534,00				1.068.511.406,50
2.17.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai sakiap perangkat daerah, Kepuasan ASN terhadap perangkat daerah (skor)		75.00	1.048.946.493,00			80.00	754.079.586,00
2.17.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Nilai Sakip Perangkat Daerah, Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	DesaMejayan, Kecamatan MEJAYAN	80.00	1.027.899.019,00	Dana Alokasi Umum		80.00	625.565.978,00
2.17.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah Dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kecamatan MEJAYAN	17.00	21.047.474,00	Dana Alokasi Umum		17.00	128.513.608,00
2.17.17	Program Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca	Prosentase jumlah pengunjung perpustakaan pertahun		100.00	567.390.041,00			0.00	314.431.820,50

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.17.28	Pelayanan Perpustakaan	jumlah anggota baru perpustakaan pertahun	DesaMejayan,Kecamatan MEJAYAN	600.00	122.066.491,00	Dana Alokasi Umum		600.00	255.000.000,00
2.17.17.29	Pengembangan Minat Baca	jumlah taman bacaan kategori aktif	DesaMejayan,Kecamatan MEJAYAN	15.00	186.199.980,00	Dana Alokasi Umum		15.00	59.431.820,50
2.18	Kearsipan				259.078.150,00				142.503.598,22
2.18.19	Program Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai Audit Kearsipan eksternal		712.90	100.000.000,00			20.00	95.904.758,66
2.18.19.5	Penataan Depo Arsip	Jumlah arsip statis tertata	Kecamatan MEJAYAN	200.00	73.875.000,00	Dana Alokasi Umum		200.00	35.575.270,00
2.18.19.6	Pengelolaan Arsip Dinamis	prosentase OPD yang mengelola arsip secara baku, jumlah OPD yang mendapat nilai audit kearsipan yg mencapai nilai cukup	Kecamatan MEJAYAN	14.00	26.125.000,00	Dana Alokasi Umum		14.00	60.329.488,66
2.18.20	Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	jumlah arsip dinamis aktif inaktif yang terkelola		20.00	159.078.150,00			30.00	46.598.839,56
2.18.20.10	Pengawasan kearsipan Internal	jumlah pengawasan arsip internal	DesaMejayan,Kecamatan MEJAYAN	100.00	98.538.150,00	Dana Alokasi Umum		100.00	23.299.420,00
2.18.20.11	Penyusutan Arsip OPD	jumlah penyusutan arsip OPD	Desa Mejayan	100.00	60.540.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	23.299.419,56



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 3.3.1 Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				12.725.371.880,00				10.621.050.381,22
3	Urusan Pilihan								
3.1	Kelautan dan Perikanan				450.000.000,00				281.154.718,00
3.1.25	Program Pengembangan Perikanan	- Jumlah Produksi Perikanan		4165.22	450.000.000,00			4437.59	281.154.718,00
3.1.25.22	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan	- Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan yang Direhab	Kosong	1.00	300.000.000,00	DAU Infrastruktur		1.00	106.154.718,00
3.1.25.26	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap	- Jumlah Benih Ikan untuk Restocking	Wilayah Kabupaten Madiun	175000.00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum		175000.00	75.000.000,00
3.1.25.28	Kreasi Cipta Menu Olahan Berbahan Baku Ikan	- Terlaksananya Lomba Kreasi Cipta Menu Olahan Berbahan Baku Ikan	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum		2.00	100.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3	Pertanian				12.275.371.880,00				10.339.895.663,22
3.3.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	- Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah		80.00	1.200.928.880,00			85.00	1.002.999.974,82
		- Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.00				80.00	
3.3.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	- Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan	Kosong	12.00	1.115.928.880,00	Dana Alokasi Umum		12.00	937.499.974,82
		-Presentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Belum Ada	100.00				100.00	
3.3.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	- Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kosong	12.00	85.000.000,00	Dana Alokasi Umum		12.00	65.500.000,00
3.3.24	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	- Produksi Tembakau		229.69	250.000.000,00			234.28	260.100.000,00
3.3.24.9	Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) Tembakau (Cukai)	- Jumlah pupuk yang diperbantukan	Kosong	16000.00	250.000.000,00	DBHCHT		16000.00	260.100.000,00
3.3.27	Program Pemberdayaan Penyuluh dan Lembaga Petani	- Prosentase Kelompok Tani Tingkat Lanjut		79.00	200.000.000,00			86.00	225.000.000,00
		- Prosentase Penyuluh Tingkat Ahli		67.00				69.00	
3.3.27.15	Sarasehan Kelembagaan Petani	- Jumlah petani yang mengikuti bimtek	Kosong	200.00	40.885.000,00			200.00	100.000.000,00
3.3.27.30	pameran hasil produksi	- Jumlah kelompok tani yang mengikuti pameran produk pertanian	Kosong	50.00	84.715.000,00	Dana Alokasi Umum		50.00	50.000.000,00
3.3.27.31	penilaian kelas kelompok	- Jumlah Kelompok Tani Yang Dinilai	Kosong	764.00	74.400.000,00	Dana Alokasi Umum		764.00	75.000.000,00
3.3.30	Program Pengembangan Tanaman Pangan	- Produksi tanaman pangan		2592.34	6.986.640.000,00			57071.68	6.461.373.779,20
		- Produksi tanaman pangan		2592.34				546526.08	
		- Produksi tanaman pangan		56957.77				57071.68	
		- Produksi tanaman pangan		56957.77				546526.08	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		- Produksi tanaman pangan		545435.21				57071.68	
		- Produksi tanaman pangan		545435.21				546526.08	
3.3.30.1	Perlindungan Tanaman Pangan	Jumlah kelompok yang mengikuti sekolah lapang	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	250.000.000,00	Pajak Rokok		2.00	250.000.000,00
3.3.30.12	Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (DAK)	- Jumlah sarana prasarana pertanian yang tersedia dalam kondisi baik	Kosong	13.00	4.394.443.000,00	Dana Alokasi Khusus		0.00	3.849.648.000,00
		- Jumlah sarana prasarana pertanian yang tersedia dalam kondisi baik	Belum Ada	13.00				13.00	
		- Jumlah sarana prasarana pertanian yang tersedia dalam kondisi baik	Belum Ada	13.00				1.00	
		- Jumlah sarana prasarana pertanian yang tersedia dalam kondisi baik	Belum Ada	1.00				0.00	
		- Jumlah sarana prasarana pertanian yang tersedia dalam kondisi baik	Belum Ada	1.00				13.00	
		- Jumlah sarana prasarana pertanian yang tersedia dalam kondisi baik	Belum Ada	1.00				1.00	
3.3.30.16	Pengembangan Sarana Prasarana Infrastruktur Pertanian	- Jumlah Sarana Prasarana Infrstruktur yang Terbangun	Wilayah Kabupaten Madiun	20.00	2.322.197.000,00	DAU Infrastruktur		20.00	2.341.725.779,20
3.3.30.18	obor pangan lestari	- Tersedianya sarana percontohan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi bagi masyarakat	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	20.000.000,00
3.3.31	Program Pengembangan Peternakan	- Jumlah Populasi Ternak		1759127.00	200.000.000,00			24610.00	105.000.000,00
		- Jumlah Populasi Ternak		1759127.00				46334.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		1759127.00				66224.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		1759127.00				85884.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		1759127.00				215757.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		1759127.00				329541.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		- Jumlah Populasi Ternak		1759127.00				1794310.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		216.00				24610.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		216.00				46334.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		216.00				66224.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		216.00				85884.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		216.00				215757.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		216.00				329541.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		216.00				1794310.00	
		- Jumlah Produksi Peternakan		421.88				430.32	
		- Jumlah Produksi Peternakan		421.88				4584.47	
		- Jumlah Produksi Peternakan		421.88				6460.59	
		- Jumlah Populasi Ternak		24128.00				24610.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		24128.00				46334.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		24128.00				66224.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		24128.00				85884.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		24128.00				215757.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		24128.00				329541.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		24128.00				1794310.00	
		- Jumlah Produksi Peternakan		4494.58				430.32	
		- Jumlah Produksi Peternakan		4494.58				4584.47	
		- Jumlah Produksi Peternakan		4494.58				6460.59	
		- Jumlah Populasi Ternak		45426.00				24610.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		45426.00				46334.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		45426.00				66224.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		45426.00				85884.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		- Jumlah Populasi Ternak		45426.00				215757.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		45426.00				329541.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		45426.00				1794310.00	
		- Jumlah Produksi Peternakan		6333.91				430.32	
		- Jumlah Produksi Peternakan		6333.91				4584.47	
		- Jumlah Produksi Peternakan		6333.91				6460.59	
		- Jumlah Populasi Ternak		64925.00				24610.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		64925.00				46334.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		64925.00				66224.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		64925.00				85884.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		64925.00				215757.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		64925.00				329541.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		64925.00				1794310.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		84200.00				24610.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		84200.00				46334.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		84200.00				66224.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		84200.00				85884.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		84200.00				215757.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		84200.00				329541.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		84200.00				1794310.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		211527.00				24610.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		211527.00				46334.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		211527.00				66224.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		211527.00				85884.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		211527.00				215757.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		- Jumlah Populasi Ternak		211527.00				329541.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		211527.00				1794310.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		323080.00				24610.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		323080.00				46334.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		323080.00				66224.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		323080.00				85884.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		323080.00				215757.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		323080.00				329541.00	
		- Jumlah Populasi Ternak		323080.00				1794310.00	
3.3.31.11	Pendistribusian Hasil Produksi Peternakan	- Jumlah hasil produksi peternakan yang terdistribusi	Kosong	20000.00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum		20000.00	105.000.000,00
		- Jumlah hasil produksi peternakan yang terdistribusi	Belum Ada	20000.00				10000.00	
		- Jumlah hasil produksi peternakan yang terdistribusi	Belum Ada	10000.00				20000.00	
		- Jumlah hasil produksi peternakan yang terdistribusi	Belum Ada	10000.00				10000.00	
3.3.31.20	rehabilitasi sarana prasarana peternakan	-Jumlah Sarana Prasarana Peternakan yang di Rehabilitasi	Kosong	1.00	150.000.000,00	DAU Infrastruktur		1.00	0,00
3.3.32	Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	- Prosentase partisipasi kelompok tani, Gapoktan, P3A/GP3A		100.00	1.900.000.000,00			100.00	733.453.909,20

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.32.1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (IPDMIP)	- Jumlah Kelompok Tani, Gapoktan, P3A, GP3A	Wilayah Kabupaten Madiun	17.00	1.900.000.000,00	Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)		17.00	733.453.909,20
3.3.34	Program Pengembangan Perkebunan	- Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan		375.30	857.000.000,00			382.81	415.000.000,00
		- Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan		375.30				900.86	
		- Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan		375.30				20401.72	
		- Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan		883.20				382.81	
		- Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan		883.20				900.86	
		- Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan		883.20				20401.72	
		- Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan		20001.69				382.81	
		- Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan		20001.69				900.86	
		- Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan		20001.69				20401.72	
3.3.34.1	Pembangunan Sarana Prasarana Perkebunan	- Jumlah panjang jalan usaha perkebunan, jaringan irigasi dan alsin	Kosong	1.50	757.000.000,00	DAU Infrastruktur		0.00	250.000.000,00
		- Jumlah panjang jalan usaha perkebunan, jaringan irigasi dan alsin	Belum Ada	1.50				1.50	
3.3.34.3	rehabilitasi tanaman perkebunan	- Lahan Kakao dan cengkeh yang terehabilitasi	Kosong	10.00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum		10.00	165.000.000,00
3.3.35	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Pemberdayaan Ekonomi	- Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan bibit		4.00	170.000.000,00			4.00	175.968.000,00
3.3.35.1	Bantuan Sarana Produksi Bibit/ Benih Perkebunan (Cukai)	- Jumlah bibit MPTS	Kosong	2000.00	170.000.000,00	DBHCHT		2000.00	175.968.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.36	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	- Prosentase Kolompok Ternak Yang Terbina		100.00	250.000.000,00			100.00	261.000.000,00
3.3.36.1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veretiner) (Cukai)	- Jumlah Masyarakat yang Terbina	Kosong	315.00	70.550.950,00	DBHCHT		315.00	92.000.000,00
3.3.36.2	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular) (Cukai)	- Jumlah Alat Kesehatan dan Kedokteran Hewan	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	66.241.100,00	DBHCHT		1.00	90.000.000,00
		- Jumlah Alat Kesehatan dan Kedokteran Hewan	Belum Ada	1.00				2.00	
		- Jumlah Alat Kesehatan dan Kedokteran Hewan	Belum Ada	2.00				1.00	
		- Jumlah Alat Kesehatan dan Kedokteran Hewan	Belum Ada	2.00				2.00	
3.3.36.3	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Ternak) (Cukai)	- Jumlah Kelompok Ternak yang Dibina	Wilayah Kabupaten Madiun	120.00	113.207.950,00	DBHCHT		120.00	79.000.000,00
3.3.37	Program Pengembangan Hortikultura	- Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		3911.00	260.803.000,00			906.00	700.000.000,00
		- Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		3911.00				3989.00	
		- Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		3911.00				56710.00	
		- Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		55598.00				906.00	
		- Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		55598.00				3989.00	
		- Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		55598.00				56710.00	
		-Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		282.00				288.00	
		-Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		282.00				661.00	
		-Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		648.00				288.00	
		-Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		648.00				661.00	
		- Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		889.00				906.00	
		- Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		889.00				3989.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		- Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		889.00				56710.00	
3.3.37.7	Pengembangan Kebun Bibit Hortikultura	- Jumlah Bibit Hortikultura yang Dikembangkan	Kosong	1.00	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	450.000.000,00
3.3.37.10	Rehabilitasi Infrastruktur Kebun Bibit	- Prosentase Infrastruktur Kebun Bibit Dalam Kondisi Baik	Kosong	80.00	180.803.000,00	DAU Infrastruktur		80.00	250.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021

KABUPATEN MADIUN

Nama Perangkat Daerah : 4.1.3 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				21.725.840.275,00				27.830.447.888,90
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				21.725.840.275,00				27.830.447.888,90
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah		80.00	11.444.588.577,00			85.00	16.405.546.094,50

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Wilayah Kabupaten Madiun, Wilayah Kabupaten Madiun, Wilayah Kabupaten Madiun, Wilayah Kabupaten Madiun, Wilayah Kabupaten Madiun, Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	11.297.797.147,00	Dana Alokasi Umum		100.00	16.209.185.435,50
		Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Belum Ada	85.00				85.00	
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Wilayah Kabupaten Madiun, Wilayah Kabupaten Madiun, Wilayah Kabupaten Madiun, Wilayah Kabupaten Madiun, Wilayah Kabupaten Madiun	20.00	146.791.430,00	Dana Alokasi Umum		20.00	196.360.659,00
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	- Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan daerah (skor)		80.00	187.992.385,00			85.00	160.619.229,00
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	- Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang Layak fungsi	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	183.992.385,00	Dana Alokasi Umum		100.00	156.119.229,00
		- Prosentase pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran	Belum Ada	100.00				100.00	
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	- Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi sesuai peraturan yang berlaku	Wilayah Kabupaten Madiun	20.00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum		20.00	4.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (Skor)		80.00	559.666.805,00			85.00	436.489.999,00
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor yang layak fungsi	Wilayah Kabupaten Madiun	85.00	544.666.805,00	Dana Alokasi Umum		85.00	420.985.593,00
		Jumlah laporan hasil perjalanan acara kedinasan	Belum Ada	50.00				50.00	
		Kepuasan pengunjung Masjid Quba terhadap kebersihan dan keamanan (skor 1-5)	Belum Ada	4.00				4.00	
		Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Belum Ada	100.00				100.00	
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum		10.00	15.504.406,00
4.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Kepuasan Bupati/Wabup terhadap pelayanan Bagian Umum (Skor)		86.00	1.852.925.000,00			90.00	1.995.721.290,00
4.1.16.5	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	-Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Kosong	85.00	110.000.000,00	Dana Alokasi Umum		0.00	0,00
4.1.16.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Wilayah Kabupaten Madiun	160.00	1.223.000.000,00	Dana Alokasi Umum		0.00	0,00
4.1.16.16	Peningkatan Pelayanan Acara-acara Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-Kegiatan Peningkatan pelayanan acara-acara kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	86.00	519.925.000,00	Dana Alokasi Umum		86.00	1.995.721.290,00
4.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah berkualitas yang ditetapkan dan diundangkan		70.00	139.976.485,00			70.00	185.740.161,00
4.1.26.3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah (Perda dan Perbup) yang sesuai /harmonis dengan peraturan perUU yang baru dan lebih tinggi.	Wilayah Kabupaten Madiun	70.00	64.976.485,00	Pajak Rokok		70.00	93.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.26.8	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yg diupload ke website JDIH	Wilayah Kabupaten Madiun	43.00	55.000.000,00	Pajak Rokok		43.00	74.470.000,00
4.1.26.44	Peningkatan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah HAM (RADHAM)	Jumlah aparaturnya yang mengikuti sosialisasi RADHAM	Wilayah Kabupaten Madiun	83.00	20.000.000,00	Pajak Rokok		83.00	18.270.161,00
4.1.34	Program Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Persentase Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa		85.00	244.354.812,00			85.00	0,00
4.1.34.4	Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	-	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	96.334.180,00	Dana Alokasi Umum		0.00	0,00
4.1.34.5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	-	Wilayah Kabupaten Madiun	4.00	10.612.500,00	Dana Alokasi Umum		0.00	0,00
4.1.34.14	Bimbingan Teknis Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa	-	Wilayah Kabupaten Madiun	6.00	68.664.772,00	Dana Alokasi Umum		0.00	0,00
4.1.34.19	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem LPSE	-	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	68.743.360,00	Dana Alokasi Umum		0.00	0,00
4.1.35	Program Penunjang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah rumusan kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti		6.00	224.025.000,00			5.00	1.065.383.859,00
4.1.35.15	Fasilitasi Pengembangan Perusahaan Daerah	- Jumlah Rumusan Kebijakan yang ditindaklanjuti	Wilayah Kabupaten Madiun	4.00	148.000.000,00	Dana Alokasi Umum		4.00	550.000.000,00
4.1.35.29	Penyusunan Data Hasil Produksi	- Jumlah Rumusan Kebijakan hasil produksi pertanian, pangan dan perikanan yang tersusun	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	242.193.980,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.35.30	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ESDM dan LH	- Jumlah Rumusan Kebijakan Hasil Evaluasi Monitoring SDA dan LH yang tersusun	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	68.025.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	273.189.879,00
4.1.36	Program Perlengkapan dan Pengelolaan Barang	persentase data aset daerah yang valid		100.00	150.000.000,00			100.00	173.694.780,00
4.1.36.4	Pensertifikatan Tanah Aset Pemkab	-	Wilayah Kabupaten Madiun	70.00	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum		0.00	173.694.780,00
4.1.38	Program Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase fasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan terkait kegiatan Pimpinan Daerah yang sesuai SOP		100.00	971.961.928,00			100.00	1.005.024.839,40
4.1.38.4	Pelaksanaan Pertemuan Kehumasan	Jumlah informasi berita Pimpinan Daerah yang ditindaklanjuti	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	55.862.708,00	Dana Alokasi Umum		5.00	55.862.708,00
4.1.38.5	Fasilitasi Pelaksanaan Upacara	Jumlah Upacara yang terfasilitasi	Wilayah Kabupaten Madiun	20.00	715.213.000,00	Dana Alokasi Umum		20.00	715.213.000,00
4.1.38.8	Peningkatan Acara Keprotokolan	Jumlah Instansi yang menggunakan pelayanan keprotokolan	Wilayah Kabupaten Madiun	56.00	28.000.000,00	Dana Alokasi Umum		56.00	28.000.000,00
4.1.38.11	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Daerah Beserta Jajaran dan Instansi Vertikal	Jumlah informasi berita yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait kegiatan Pimpinan Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	99.903.320,00	Pajak Rokok		5.00	99.903.320,00
4.1.38.15	Fasilitasi Peliputan Dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah	Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan Pimpinan Daerah yang terillis	Wilayah Kabupaten Madiun	240.00	72.982.900,00	Dana Alokasi Umum		240.00	106.045.811,40
4.1.42	Program Penunjang Administrasi Pemerintahan	Jumlah rumusan kebijakan administrasi pemerintahan		36.00	700.000.000,00			62.00	797.941.286,00
4.1.42.1	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah kerjasama/MoU yang disepakati	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	110.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	110.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah laporan hasil kunjungan kerja yang difasilitasi	Belum Ada	12.00				12.00	
4.1.42.2	Penunjang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah pemenuhan data dukung LPPD yang masuk ke Bagian Adm. Pemerintahan / Jumlah pemenuhan data dukung LPPD yang sesuai peraturan	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	100.000.000,00
4.1.42.3	Penunjang Penyelenggaraan Perangkat Wilayah	Jumlah dokumen batas desa/kelurahan yang di susun	Wilayah Kabupaten Madiun	36.00	340.000.000,00	Dana Alokasi Umum		36.00	537.941.286,00
		Jumlah dokumen pembakuan rupa bumi di susun	Belum Ada	2.00				2.00	
4.1.42.4	Peringatan Hari Jadi Provinsi	Jumlah Event yang dilaksanakan	Wilayah Kabupaten Madiun	3.00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum		3.00	50.000.000,00
4.1.43	Program Fasilitasi Hukum	Persentase kasus hukum perdata, TUN, dan pidana yang tertangani sampai tingkat incrach (putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)		100.00	160.000.000,00			100.00	660.765.380,00
4.1.43.1	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat desa dan masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum terpadu	Wilayah Kabupaten Madiun	700.00	70.000.000,00	Pajak Rokok		700.00	175.506.485,00
4.1.43.2	Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum	Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk	Wilayah Kabupaten Madiun	8.00	40.000.000,00	Pajak Rokok		8.00	125.258.895,00
4.1.43.3	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Miskin	Jumlah kasus hukum perdata, TUN dan pidana yang diselesaikan	Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum		12.00	360.000.000,00
4.1.44	Program Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah intervensi penanganan inflasi		5.00	200.000.000,00			5.00	102.000.000,00
4.1.44.1	Pengawasan dan Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah	- Jumlah Rumusan Kebijakan Pengendalian Inflasi	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum		5.00	102.000.000,00
4.1.46	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (Cukai)	Persentase stakeholder yang memahami ketentuan di bidang cukai		100.00	659.060.050,00			100.00	535.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.46.1	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan Serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	- Jumlah Media Sosialisasi Peraturan di bidang cukai	Wilayah Kabupaten Madiun	22.00	659.060.050,00	Dana Alokasi Umum, DBH CHT		22.00	535.500.000,00
		- Prosentase Stakeholder yang memahami Ketentuan di bidang cukai (150 Peserta)	Belum Ada	80.00				80.00	
4.1.48	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti		100.00	3.661.922.383,00			100.00	4.306.020.971,00
4.1.48.1	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Kehidupan Beragama	Jumlah calon kafilah yang di bina	Wilayah Kabupaten Madiun	50.00	1.171.276.102,00	Dana Alokasi Umum		50.00	1.335.727.705,08
		Jumlah partisipasi lembaga / sekolah/ormas/ponpes yang di undang	Belum Ada	17.00				17.00	
		Jumlah peserta kegiatan spiritual yang difasilitasi	Belum Ada	16500.00				16500.00	
4.1.48.2	Peringatan Hari Besar Agama	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peringatan hari besar agama	Wilayah Kabupaten Madiun	10360.00	1.004.658.660,00	Dana Alokasi Umum		10360.00	1.151.430.007,73
4.1.48.3	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan	Jumlah pondok pesantren yang diberdayakan	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	960.934.750,00	Dana Alokasi Umum		5.00	1.093.729.326,72
		Jumlah Ustadz ustadzah TPA/TPQ yang di bina	Belum Ada	3000.00				3000.00	
		Jumlah lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	Belum Ada	6.00				6.00	
4.1.48.4	Pemberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) dan Pemulangan Jamaah Haji	Indeks kepuasan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan haji (Skor 1-5)	Wilayah Kabupaten Madiun	4.00	298.060.000,00	Dana Alokasi Umum		4.00	236.831.153,42

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.48.7	Fasilitasi Pelaksanaan Lomba MTQ Tingkat Propinsi (DID)	Jumlah pemenang MTQ tingkat propinsi	Wilayah Kabupaten Madiun	9.00	0,00	Dana Insentif Daerah		9.00	185.158.901,67
4.1.48.8	sinkronisasi pengembangan UKS	Jumlah sekolah yang di bina	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	36.305.667,00	Dana Alokasi Umum		5.00	37.031.780,35
4.1.48.9	sinkronisasi lintas OPD bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah rumusan kebijakan bidang kesra yang di hasilkan	Wilayah Kabupaten Madiun	3.00	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum		3.00	74.063.560,71
4.1.48.10	Pengelolaan sarana prasarana peribadatan	Jumlah tempat ibadah yang mendapat bantuan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	121.882.204,00	Dana Alokasi Umum		10.00	129.180.629,14
		Persentase tempat ibadah yang terdaftar	Belum Ada	75.00				75.00	
4.1.48.12	Fasilitasi pengembangan lokasi pemantauan rakyatul hilal	Jumlah draff rumusan kebijakan pembangunan tempat pemantauan rukyatul hilal	Wilayah Kabupaten Madiun	9.00	24.110.000,00	Dana Alokasi Umum		9.00	29.711.544,70
4.1.48.13	Verifikasi dan validasi bantuan sosial, hibah kepada kelompok masyarakat dan keagamaan	Jumlah verifikasi proposal permohonan bantuan kelompok/organisasi masyarakat	Wilayah Kabupaten Madiun	30.00	4.695.000,00	Dana Alokasi Umum		30.00	33.156.361,48
4.1.50	Porgram Penataan Ketatalaksanaan, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang LKjIPnya Sesuai Ketentuan		90.00	569.366.850,00			95.00	0,00
4.1.50.1	Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan	-	Wilayah Kabupaten Madiun	50.00	90.000.000,00	Dana Alokasi Umum		0.00	0,00
4.1.50.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	125.366.850,00	Dana Alokasi Umum		0.00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.50.3	Peningkatan kualitas Kelambagaan	-	Wilayah Kabupaten Madiun	70.00	129.000.000,00	Dana Alokasi Umum		0.00	0,00
4.1.50.4	Penguatan Reformasi Birokrasi	-	Wilayah Kabupaten Madiun	70.00	225.000.000,00	Dana Alokasi Umum		0.00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020****dan Prakiraan Maju Tahun 2021****KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.4 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				19.592.000.000,00				10.165.361.075,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				19.592.000.000,00				10.165.361.075,00
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)		80.00	4.293.250.000,00			85.00	4.293.250.000,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85.00				90.00	
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Perseentase peralatan dan Perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	4.270.750.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	4.270.750.000,00
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek, Kursus dan Pelatihan	Belum Ada	7.00				7.00	
		Jumlah Kelengkapan Pakaian Dinas Anggota DPRD	Belum Ada	45.00				45.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	Belum Ada	10.00				10.00	
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Wilayah Kabupaten Madiun	19.00	22.500.000,00	Dana Alokasi Umum		19.00	22.500.000,00
4.1.40	Program Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terlayani		100.00	663.625.000,00			100.00	663.625.000,00
4.1.40.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Perundang-undangan yang tersosialisasikan	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	65.446.500,00	Dana Alokasi Umum		5.00	65.446.500,00
4.1.40.3	Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah dokumen kegiatan DPRD yang terpublikasi	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	462.458.500,00	Dana Alokasi Umum		5.00	462.458.500,00
4.1.40.4	Peningkatan Layanan Aspirasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	135.720.000,00	Dana Alokasi Umum		5.00	135.720.000,00
4.1.47	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Fasilitasi Penyelenggaraan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		100.00	14.635.125.000,00			100.00	5.208.486.075,00
4.1.47.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dilegalisasi	Wilayah Kabupaten Madiun	11.00	4.048.250.000,00	Dana Alokasi Umum		11.00	4.048.250.000,00
4.1.47.3	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Pendalaman Tugas	Wilayah Kabupaten Madiun	9.00	9.436.075.000,00	Dana Alokasi Umum		9.00	9.436.075,00
4.1.47.6	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Jaminan Kesehatan	Wilayah Kabupaten Madiun	45.00	65.000.000,00	Dana Alokasi Umum		45.00	65.000.000,00
4.1.47.7	Penunjang Kegiatan Reses DPRD	Jumlah Dokumen Usulan Jaring Aspirasi dari Masyarakat	Wilayah Kabupaten Madiun	542.00	790.000.000,00	Dana Alokasi Umum		542.00	790.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.47.10	Inspeksi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah	Inspeksi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	60.00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum		47.00	200.000.000,00
4.1.47.11	Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK RI	Jumlah Klarifikasi Hasil Pemeriksaan BPK	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	95.800.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	95.800.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.5 Kecamatan Balerejo

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				724.757.645,00			731.379.411,00	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				724.757.645,00			731.379.411,00	
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)		85.00	264.275.750,00			85.00	269.082.411,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85.00				85.00	
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Prosentase Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan BALEREJO	81.00	247.418.200,00	Dana Alokasi Umum		81.00	220.000.000,00
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Prosentase dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan BALEREJO	81.00	16.857.550,00	Dana Alokasi Umum		81.00	49.082.411,00
4.1.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		89.35	460.481.895,00			93.29	462.297.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Kecamatan BALEREJO	6.00	103.095.750,00	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah		6.00	104.875.403,00
4.1.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang terlaksana	Kecamatan BALEREJO	3.00	118.921.645,00	Dana Alokasi Umum		3.00	109.838.900,00
4.1.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang terlaksana	Kecamatan BALEREJO	5.00	91.954.900,00	Dana Alokasi Umum		5.00	83.985.549,00
4.1.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan kesejahteraan sosial yang terlaksana	Kecamatan BALEREJO	5.00	96.249.600,00	Dana Alokasi Umum		5.00	92.409.546,00
4.1.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan yang baik di kecamatan	Kecamatan BALEREJO	89.35	50.260.000,00	Dana Alokasi Umum		89.35	71.187.602,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020****dan Prakiraan Maju Tahun 2021****KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.6 Kecamatan Dagangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				3.077.175.071,87				3.239.380.196,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				3.077.175.071,87				3.239.380.196,00
4.1.0	Non Program				2.377.175.071,87				2.435.743.513,00
4.1.0.0	Non Kegiatan	-	Kecamatan DAGANGAN	12.00	2.377.175.071,87	Dana Alokasi Umum		0.00	2.435.743.513,00
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan				339.820.000,00			85.00	269.082.411,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.00				85.00	
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	Kecamatan DAGANGAN	80.00	337.820.000,00	Dana Alokasi Umum		80.00	269.082.411,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Belum Ada	80.00				80.00	
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	-	Kecamatan DAGANGAN	8.00	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum		0.00	0,00
4.1.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		89.35	360.180.000,00			93.29	534.554.272,00
4.1.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Tata Pemerintahan Desa yang terlaksana	Kecamatan DAGANGAN	90.00	41.872.000,00	Dana Alokasi Umum		90.00	74.456.492,00
4.1.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang terlaksana	Kecamatan DAGANGAN	90.00	121.835.000,00	Dana Alokasi Umum		90.00	115.760.537,00
4.1.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang dilaksanakan	Kecamatan DAGANGAN	85.00	87.208.000,00	Dana Alokasi Umum		85.00	105.999.372,00
4.1.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kecamatan DAGANGAN	91.00	77.039.200,00	Dana Alokasi Umum		91.00	202.111.144,00
4.1.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan yang terlaksana	Kecamatan DAGANGAN	85.00	32.225.800,00	Dana Alokasi Umum		85.00	36.226.727,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.7 Kecamatan Dolopo

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				2.711.132.860,00				2.703.700.379,97
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				2.711.132.860,00				2.703.700.379,97
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASn terhadap pelayanan sekretariat PD		76.00	684.063.887,00			76.00	749.450.962,19
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81.00				81.00	
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Kecamatan DOLOPO, Kecamatan DOLOPO, Wilayah Kabupaten Madiun, Kecamatan DOLOPO	81.00	664.282.887,00	Dana Alokasi Umum		81.00	733.688.462,19
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	Belum Ada	9.00				9.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Belum Ada	12.00				12.00	
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kecamatan DOLOPO, Kecamatan DOLOPO, Kecamatan DOLOPO	8.00	19.781.000,00	Dana Alokasi Umum		8.00	15.762.500,00
4.1.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		100.00	289.825.950,00			100.00	401.536.999,18
4.1.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan DOLOPO	90.00	57.208.300,00	Dana Alokasi Umum		90.00	88.236.481,00
4.1.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman dan Ketertiban di wilayah kecamatan dalam kondisi aman dan terkendali	Kecamatan DOLOPO	90.00	59.898.900,00	Dana Alokasi Umum		90.00	98.397.227,18
4.1.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan terlaksana dengan baik	Kecamatan DOLOPO	90.00	62.896.750,00	Dana Alokasi Umum		90.00	77.040.319,00
4.1.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Program Kesejahteraan Sosial terlaksana dengan baik	Kecamatan DOLOPO	90.00	60.630.000,00	Dana Alokasi Umum		90.00	77.561.525,00
4.1.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Pelayanan Kecamatan berjalan dengan baik	Kecamatan DOLOPO	100.00	49.192.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	60.301.447,00
4.1.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat di kelurahan dapat terpenuhi		100.00	1.737.243.023,00			100.00	1.552.712.418,60
4.1.30.38	Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan yang terlaksana	Kecamatan DOLOPO, Kecamatan DOLOPO	6.00	201.945.000,00	Dana Alokasi Umum		6.00	332.134.871,87

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.30.39	Penyelenggaraan Pembangunan	Penyelenggaraan Pembangunan	Kecamatan DOLOPO, Kecamatan DOLOPO	83.00	811.200.000,00	Dana Alokasi Umum, DAU Infrastruktur, DAU Tambahan		83.00	251.262.564,61
4.1.30.40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah Penyelenggaraan Kemasyarakatan yang terlaksana	Kecamatan DOLOPO	4.00	18.216.023,00	Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan		4.00	234.915.349,32
4.1.30.41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)	Jumlah Sarana dan prasaran yang terbangun	Kecamatan DOLOPO, Kecamatan DOLOPO	6.00	401.680.000,00	DAU Tambahan		6.00	683.399.632,80
4.1.30.42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terpenuhi	Kecamatan DOLOPO, Kecamatan DOLOPO	100.00	304.202.000,00	DAU Tambahan		0.00	51.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021

KABUPATEN MADIUN

Nama Perangkat Daerah : 4.1.8 Kecamatan Geger

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				750.000.000,00				844.882.049,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				750.000.000,00				844.882.049,00
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)		81.00	390.525.950,00			81.00	420.609.137,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81.00				81.00	
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	Kecamatan GEGER	3.00	385.526.150,00	Dana Alokasi Umum		3.00	415.609.137,00
		jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Belum Ada	12.00				12.00	
		prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Belum Ada	85.00				85.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kecamatan GEGER	8.00	4.999.800,00	Dana Alokasi Umum		8.00	5.000.000,00
4.1.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		85.00	359.474.050,00			85.00	424.272.912,00
4.1.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	tata pemerintahan desa terselenggara dengan baik	Kecamatan GEGER	88.00	46.162.100,00	Dana Alokasi Umum		88.00	109.410.137,00
4.1.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan dalam kondisi aman dan terkendali	Kecamatan GEGER	88.00	117.719.950,00	Dana Alokasi Umum		88.00	97.829.323,00
4.1.29.31	Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan terlaksana dengan baik	Kecamatan GEGER	88.00	105.140.300,00	Dana Alokasi Umum		88.00	111.783.577,00
4.1.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	program kesejahteraan sosial di kecamatan terlaksana dengan baik	Kecamatan GEGER	88.00	53.219.400,00	Dana Alokasi Umum		88.00	61.472.500,00
4.1.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	pelayanan kecamatan terlaksana dengan baik	Kecamatan GEGER	88.00	37.232.300,00	Dana Alokasi Umum		88.00	43.777.375,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.9 Kecamatan Gemarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				450.000.000,00				541.587.267,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				450.000.000,00				541.587.267,00
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	-		100.00	333.427.966,00			0.00	315.804.447,00
		Prosentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		100.00					
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dan sarana prasarana perkantoran yang terpenuhi	Kecamatan GEMARANG	90.00	323.427.966,00	Dana Alokasi Umum			310.804.447,00
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Nilai SAKIP Kecamatan A	Kecamatan GEMARANG	90.00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum			5.000.000,00
4.1.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		93.00	116.572.034,00			0.00	225.782.820,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang terpenuhi	Kecamatan GEMARANG	90.00	25.910.200,00	Dana Alokasi Umum		0.00	58.181.177,00
4.1.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase pelaksanaan tugas pada Seksi ketentraman dan Ketertiban yang terlaksana	Kecamatan GEMARANG	90.00	40.278.250,00	Dana Alokasi Umum		0.00	64.386.339,00
4.1.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	persentase Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang terpenuhi	Kecamatan GEMARANG	93.00	16.491.100,00	Dana Alokasi Umum		0.00	20.687.213,00
4.1.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyelenggaraan Kesejahteraan yang terpenuhi	Kecamatan GEMARANG	90.00	10.172.484,00	Dana Alokasi Umum		0.00	15.487.726,00
4.1.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan yang terpenuhi	Kecamatan GEMARANG	90.00	23.720.000,00	Dana Alokasi Umum		0.00	67.040.365,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.10 Kecamatan Jiwan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				624.748.369,00				723.893.247,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				624.748.369,00				723.893.247,00
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah		80.00	322.941.184,00			85.00	309.893.052,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81.00				81.00	
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bintek, kursus dan pelatihan	Kecamatan JIWAN	1.00	317.941.184,00	Dana Alokasi Umum		1.00	304.893.052,00
		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Belum Ada	14.00				14.00	
		Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Belum Ada	68.00				68.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kecamatan JIWAN	13.00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum		13.00	5.000.000,00
4.1.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		75.00	301.807.185,00			78.00	414.000.195,00
4.1.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang terlaksana	Kecamatan JIWAN	3.00	45.355.250,00	Dana Alokasi Umum		3.00	84.442.301,00
		Jumlah rekomendasi APDDes yang terverifikasi sesuai dengan peraturan	Belum Ada	14.00				14.00	
4.1.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan	Kecamatan JIWAN	2.00	73.748.750,00	Dana Alokasi Umum		0.00	114.231.036,00
4.1.29.31	Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksana	Kecamatan JIWAN	3.00	64.133.185,00	Dana Alokasi Umum		3.00	80.252.451,00
4.1.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksana	Kecamatan JIWAN	3.00	73.095.000,00	Dana Alokasi Umum		3.00	74.527.001,00
4.1.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terlaksana	Kecamatan JIWAN	3.00	45.475.000,00	Dana Alokasi Umum		3.00	60.547.406,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.11 Kecamatan Kebonsari

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				624.991.929,00				737.187.590,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				624.991.929,00				737.187.590,00
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASn terhadap pelayanan sekretariat PD		80.00	323.119.129,00			85.00	323.119.129,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81.00				81.00	
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	Kosong	80.00	323.119.129,00	Dana Alokasi Umum			323.119.129,00
4.1.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase pelayanan masyarakat terpenuhi		100.00	301.872.800,00			0.00	414.068.461,00
4.1.29.16	Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Kecamatan	Kosong	89.00	30.114.450,00	Dana Alokasi Umum			40.114.450,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang terpenuhi	Kosong	90.00	95.967.680,00	Dana Alokasi Umum			115.967.680,00
4.1.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase pelaksanaan tugas pada Seksi ketentraman dan Ketertiban yang terlaksana	Kosong	90.00	62.067.110,00	Dana Alokasi Umum			82.067.110,00
4.1.29.31	Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	persentase Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang terpenuhi	Kecamatan KEBONSARI	90.00	40.425.570,00	Dana Alokasi Umum			82.621.231,00
4.1.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyelenggaraan Kesejahteraan yang terpenuhi	Kosong	90.00	73.297.990,00	Dana Alokasi Umum			93.297.990,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.12 Kecamatan Kare

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				475.001.159,00				475.001.159,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				475.001.159,00				475.001.159,00
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)		81.00	239.273.509,00			81.00	239.273.509,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81.00				81.00	
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	Kecamatan KARE	92.00	234.273.509,00	Dana Alokasi Umum		92.00	234.273.509,00
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kecamatan KARE	30.00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum		30.00	5.000.000,00
4.1.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Pelayanan Masyarakat yang terpenuhi		93.00	235.727.650,00			95.00	235.727.650,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Prosentase Kegiatan bidang pemerintahan Deasa yang terlaksana	Kecamatan KARE	89.00	61.268.230,00	Dana Alokasi Umum		89.00	61.268.230,00
4.1.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Jumlah Linmas Yang Memperoleh Pembinaan	Kecamatan KARE	87.00	77.520.715,00	Dana Alokasi Umum		87.00	77.520.715,00
4.1.29.31	Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Prosentase Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang Terlaksana	Kecamatan KARE	87.00	51.417.780,00	Dana Alokasi Umum		87.00	51.417.780,00
4.1.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	Kecamatan KARE	93.00	35.024.000,00	Dana Alokasi Umum		93.00	35.024.000,00
4.1.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Prosentase Jumkah Masyarakat yang terlayani	Kecamatan KARE	94.00	10.496.925,00	Dana Alokasi Umum		94.00	10.496.925,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.13 Kecamatan Madiun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				1.667.600.244,00				1.738.969.379,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				1.667.600.244,00				1.738.969.379,00
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Program Pelayanan Kesekretariatan		83.00	556.793.109,00			84.00	546.193.563,00
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian, dan Sarana Prasarana	Kecamatan MADIUN, Kelurahan Nglames	83.00	544.801.109,00	Dana Alokasi Umum		83.00	532.822.913,00
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	-	Kecamatan MADIUN, Kelurahan Nglames	81.00	11.992.000,00	Dana Alokasi Umum		81.00	13.370.650,00
4.1.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		85.00	265.836.150,00			90.00	411.444.780,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Tata Pemerintahan Desa Yang Terlaksana	Kecamatan MADIUN	100.00	51.866.550,00	Dana Alokasi Umum		100.00	96.463.888,00
4.1.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Terselenggaranya Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban yang Terlaksana	Kecamatan MADIUN	100.00	87.720.150,00	Dana Alokasi Umum		100.00	95.529.973,00
4.1.29.31	Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan MADIUN	100.00	59.939.650,00	Dana Alokasi Umum		100.00	104.502.668,00
4.1.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan MADIUN	100.00	23.240.600,00	Dana Alokasi Umum		100.00	51.250.363,00
4.1.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan MADIUN	100.00	43.069.200,00	Dana Alokasi Umum		100.00	63.697.888,00
4.1.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan		78.00	844.970.985,00			81.00	781.331.036,00
4.1.30.38	Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Penyelenggaraan tata Pemerintah Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Nglames	83.00	71.177.100,00	Dana Alokasi Umum		83.00	171.787.770,00
4.1.30.39	Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah usulan yang ditindaklanjuti dalam usulan kegiatan	Kelurahan Nglames	83.00	401.887.235,00	DAU Infrastruktur		83.00	204.752.625,00
4.1.30.40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah Penyelenggaraan Kemasyarakatan yang terlaksana	Kelurahan Nglames	83.00	19.485.650,00	Dana Alokasi Umum		83.00	83.207.355,00
4.1.30.41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang terbangun	Kelurahan Nglames	83.00	267.923.500,00	DAU Tambahan		83.00	304.583.286,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.30.42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Nglames	83.00	84.497.500,00	DAU Tambahan		83.00	17.000.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.14 Kecamatan Mejayan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				3.818.258.590,00				3.665.788.963,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				3.818.258.590,00				3.665.788.963,00
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase pelayanan kesekretariatan yang terlaksana		100.00	772.952.470,00			100.00	641.839.562,00
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Persentase administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana yang terlaksananya	Kecamatan MEJAYAN, Kecamatan MEJAYAN	100.00	772.952.470,00	Dana Alokasi Umum		100.00	641.839.562,00
4.1.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan yang terlaksana		80.00	382.923.200,00			80.00	422.172.800,00
4.1.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Persentase tata pemerintahan desa yang terselenggara	Kecamatan MEJAYAN	80.00	53.751.400,00	Dana Alokasi Umum		80.00	59.261.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	Kecamatan MEJAYAN	80.00	106.204.500,00	Dana Alokasi Umum		80.00	117.090.400,00
4.1.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terselenggara	Kecamatan MEJAYAN	80.00	92.118.500,00	Dana Alokasi Umum		80.00	101.560.600,00
4.1.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase kesejahteraan sosial yang terselenggara	Kecamatan MEJAYAN	80.00	104.867.400,00	Dana Alokasi Umum		80.00	115.616.300,00
4.1.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan kecamatan yang terselenggara	Kecamatan MEJAYAN	80.00	25.981.400,00	Dana Alokasi Umum		80.00	28.644.500,00
4.1.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan yang terlaksana		80.00	2.662.382.920,00			80.00	2.601.776.601,00
4.1.30.38	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pemerintahan yang terselenggara	Kosong	80.00	124.478.920,00	Dana Alokasi Umum		80.00	374.309.900,00
4.1.30.39	Penyelenggaraan Pembangunan	Persentase pembangunan yang terselenggara	Kosong	80.00	1.298.440.000,00	Dana Alokasi Umum		80.00	862.793.900,00
4.1.30.40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Persentase kemasyarakatan yang terselenggara	Kosong	80.00	180.641.000,00	Dana Alokasi Umum		80.00	357.467.900,00
4.1.30.41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)	Persentase pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan yang terlaksana	Kosong	80.00	628.931.000,00	DAU Tambahan		80.00	402.881.960,40

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.30.42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)	Persentase pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kosong	80.00	429.892.000,00	Dana Alokasi Umum,DA U Tambahan		80.00	604.322.940,60

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.15 Kecamatan Pilangkenceng

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				724.906.440,00				823.756.806,12
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				724.906.440,00				823.756.806,12
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Kecamatan A		82.00	376.662.485,00			85.00	361.443.792,12
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	KecamatanPILANGKENCENG	12.00	366.662.485,00	Dana Alokasi Umum		12.00	341.443.792,12
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	KecamatanPILANGKENCENG	13.00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum		13.00	20.000.000,00
4.1.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi-		100.00	348.243.955,00			100.00	462.313.014,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	-Jumlah Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa yang terlaksanakan	KecamatanPILANGKENG	3.00	83.777.371,00	Dana Alokasi Umum		3.00	93.737.150,00
4.1.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	-Jumlah penyelenggaraan ketertraman dan ketertiban yang terlaksanakan	KecamatanPILANGKENG	6.00	70.811.205,00	Dana Alokasi Umum		6.00	112.811.205,00
4.1.29.31	Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	-Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksanakan	KecamatanPILANGKENG	5.00	86.292.768,00	Dana Alokasi Umum		5.00	93.123.135,00
4.1.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksanakan	KecamatanPILANGKENG	4.00	63.601.136,00	Dana Alokasi Umum		4.00	91.803.750,00
4.1.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terlaksanakan	KecamatanPILANGKENG	5.00	43.761.475,00	Dana Alokasi Umum		5.00	70.837.774,00



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.16 Kecamatan Sawahan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.17 Kecamatan Saradan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				649.999.785,00				757.333.719,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				649.999.785,00				757.333.719,00
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan				234.221.635,00				224.758.132,00
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Sekretariat PD (Skor)	Kecamatan SARADAN	80.00	234.221.635,00	Dana Alokasi Umum		80.00	224.758.132,00
		jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Belum Ada	88.00				88.00	
4.1.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan			100.00	415.778.150,00			100.00	532.575.587,00
4.1.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan SARADAN	12.00	83.209.510,00	Dana Alokasi Umum		12.00	113.016.968,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan SARADAN	12.00	86.194.600,00	Dana Alokasi Umum		12.00	99.258.619,00
4.1.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan terlaksana dengan baik	Kecamatan SARADAN	12.00	79.907.500,00	Dana Alokasi Umum		12.00	135.000.000,00
4.1.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan SARADAN	12.00	94.870.087,00	Dana Alokasi Umum		12.00	108.500.000,00
4.1.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan SARADAN	12.00	71.596.453,00	Dana Alokasi Umum		12.00	76.800.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.18 Kecamatan Wungu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				2.761.239.608,00				2.943.290.849,97
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				2.761.239.608,00				2.943.290.849,97
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)		85.00	933.286.967,33			90.00	903.249.957,77
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81.00				81.00	
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Prosentase pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana	Kecamatan WUNGU, Kecamatan WUNGU, Kecamatan WUNGU, Wilayah Kabupaten Madiun	83.00	874.239.129,33	Dana Alokasi Umum		83.00	827.499.957,77

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Prosentase kegiatan dalam perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran yang terlaksana	Kecamatan WUNGU, Kecamatan WUNGU, Kecamatan WUNGU	84.00	59.047.838,00	Dana Alokasi Umum		84.00	75.750.000,00
4.1.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		93.00	278.805.350,00			95.00	360.759.613,60
4.1.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Tata pemerintahan Desa yang terlaksana	Kecamatan WUNGU	90.00	73.332.200,00	Dana Alokasi Umum		90.00	129.100.571,60
4.1.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban yang terlaksana	Kecamatan WUNGU	90.00	51.553.850,00	Dana Alokasi Umum		90.00	127.478.588,00
4.1.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang terlaksana	Kecamatan WUNGU	85.00	84.773.500,00	Dana Alokasi Umum		85.00	73.119.312,00
4.1.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	Kecamatan WUNGU	91.00	31.256.000,00	Dana Alokasi Umum		91.00	18.883.260,00
4.1.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Kecamatan yang terlaksana	Kecamatan WUNGU	85.00	37.889.800,00	Dana Alokasi Umum		85.00	12.177.882,00
4.1.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Prosentase pelayanan masyarakat terpenuhi		93.00	1.549.147.290,67			95.00	1.679.281.278,60
4.1.30.38	Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan dalam Pemerintahan	Wilayah Kabupaten Madiun, Kecamatan WUNGU	7.00	61.084.115,00	Dana Alokasi Umum		7.00	168.655.706,54
4.1.30.39	Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Kegiatan dalam Pembangunan	Kecamatan WUNGU, Kecamatan WUNGU, Wilayah Kabupaten Madiun	12.00	853.010.438,57	Dana Alokasi Umum		12.00	596.969.503,38

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.30.40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan dalam Kemasyarakatan	Kecamatan WUNGU,Kecamatan WUNGU	7.00	85.332.100,00	Dana Alokasi Umum		7.00	179.256.435,88
4.1.30.41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)	Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana	Kecamatan WUNGU,Kecamatan WUNGU	8.00	509.735.337,10	DAU Tambahan		8.00	609.551.632,80
4.1.30.42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)	Jumlah Kegiatan pemberdayaan	Wilayah KabupatenMadiun,Kecamatan WUNGU	5.00	39.985.300,00	DAU Tambahan		5.00	124.848.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020****dan Prakiraan Maju Tahun 2021****KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.1.19 Kecamatan Wonoasri

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				2.121.714.278,77				2.261.082.479,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				2.121.714.278,77				2.261.082.479,00
4.1.0	Non Program	-		1.00	1.596.714.768,77			0.00	1.636.054.360,00
4.1.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah		80.00	248.398.510,00			85.00	251.541.294,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81.00				81.00	
4.1.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bintek, kursus dan pelatihan	Kecamatan WONOASRI	1.00	244.898.510,00	Dana Alokasi Umum		1.00	246.541.294,00
		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Belum Ada	10.00				10.00	
		Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Belum Ada	68.00				68.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	- Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kecamatan WONOASRI	13.00	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum		13.00	5.000.000,00
4.1.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		75.00	276.601.000,00			78.00	373.486.825,00
4.1.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa yang terlaksana	Kecamatan WONOASRI	4.00	46.781.000,00	Dana Alokasi Umum		4.00	64.232.300,00
		Jumlah rekomendasi APBDes yang terverifikasi sesuai dengan peraturan	Belum Ada	10.00				10.00	
4.1.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang terlaksana	Kosong	6.00	67.300.000,00	Dana Alokasi Umum		6.00	91.406.500,00
4.1.29.31	Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang terlaksana	Kecamatan WONOASRI	5.00	78.270.000,00	Dana Alokasi Umum		5.00	81.472.250,00
4.1.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	Kecamatan WONOASRI	4.00	38.550.000,00	Dana Alokasi Umum		4.00	58.087.800,00
4.1.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan yang terlaksana	Kecamatan WONOASRI	5.00	45.700.000,00	Dana Alokasi Umum		5.00	78.287.975,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.2.1 Inspektorat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				2.127.287.426,00				2.096.202.396,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.2	Pengawasan				2.127.287.426,00				2.096.202.396,00
4.2.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)		75.00	1.127.287.426,00			80.00	1.138.707.180,00
4.2.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	Wilayah Kabupaten Madiun	17.00	1.025.287.426,00	Dana Alokasi Umum		17.00	1.003.707.180,00
		Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Belum Ada	100.00				80.00	
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	Belum Ada	43.00				43.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Wilayah Kabupaten Madiun	8.00	102.000.000,00	Dana Alokasi Umum		8.00	135.000.000,00
4.2.23	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD dan unit kerja yang laporan keuangannya sesuai SAP		100.00	733.923.450,00			100.00	686.097.135,00
		Persentase OPD yang melaksanakan penerapan SPIP sesuai dengan peraturan yang berlaku		56.60				70.00	
		Persentase pengaduan/kasus yang telah diklarifikasi		100.00				100.00	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti		85.00				90.00	
4.2.23.2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah pengaduan / kasus yang masuk	Wilayah Kabupaten Madiun	45.00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum		45.00	55.000.000,00
4.2.23.12	Evaluasi Penerapan SPIP di OPD	Jumlah OPD yang dievaluasi SPIP	Wilayah Kabupaten Madiun	10.00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum		10.00	16.000.000,00
4.2.23.36	Pengawasan Pelayanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik yang terawasi dari pungli	Wilayah Kabupaten Madiun	55.00	202.644.250,00	Dana Alokasi Umum		55.00	200.847.135,00
		Jumlah Laporan Gratifikasi yang masuk	Belum Ada	1.00				1.00	
4.2.23.37	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah dokumen LHP yang terbit	Wilayah Kabupaten Madiun	251.00	300.000.000,00	Dana Alokasi Umum		251.00	309.250.000,00
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Belum Ada	85.00				85.00	
4.2.23.38	Review Laporan Keuangan	Jumlah dokumen hasil reuiu Laporan Keuangan yang terbit	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	21.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.23.39	Penilaian Integritas	Indeks Integritas	Wilayah Kabupaten Madiun	52.91	141.279.200,00	Dana Alokasi Umum		52.91	84.000.000,00
		Jumlah OPD yang sudah membangun Zona Integritas	Belum Ada	4.00				4.00	
4.2.24	Program Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase OPD yang nilai SAKIPnya sesuai ketentuan		60.00	266.076.550,00			70.00	271.398.081,00
4.2.24.4	Monitoring Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen rencana aksi yang terbit	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	14.576.550,00	Dana Alokasi Umum		1.00	15.000.000,00
4.2.24.7	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi PMPRB yang terbit	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	12.500.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	13.000.000,00
4.2.24.9	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil reuiu LKJIP	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	159.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	161.500.000,00
		Jumlah OPD yang dokumen SAKIPnya sesuai ketentuan	Belum Ada	53.00				53.00	
4.2.24.10	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah dokumen hasil reuiu DAK	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	81.898.081,00
		Jumlah dokumen hasil reuiu Renja yang terbit	Belum Ada	2.00				2.00	
		Jumlah dokumen hasil reuiu RKA yang terbit	Belum Ada	2.00				2.00	

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020****dan Prakiraan Maju Tahun 2021****KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.3.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				8.112.711.650,00				6.292.471.738,61
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.3	Perencanaan				7.225.435.978,00				5.413.308.300,83
4.3.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	- Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah		80.00	2.492.845.200,00				1.288.091.464,39
4.3.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan	Wilayah Kabupaten Madiun	17.00	2.442.845.200,00	Dana Alokasi Umum		17.00	1.238.091.464,39
		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang Layak Fungsi	Belum Ada	100.00				100.00	
4.3.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	Penyusunan Dokumen perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	4.00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum		4.00	50.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD		100.00	1.269.396.286,00			100.00	1.158.704.664,30
		Prosentase usulan Musrenbang yang terokomodir dalam RKPD		50.00				50.00	
		Persentase capaian kinerja program		80.00				85.00	
4.3.21.8	Penyusunan rancangan RKPD dan RKPDP Perubahan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	Wilayah Kabupaten Madiun	6.00	767.297.262,00	Dana Alokasi Umum		6.00	710.739.116,10
4.3.21.12	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah buku LKPJ yang disediakan	Wilayah Kabupaten Madiun	150.00	173.512.500,00	Dana Alokasi Umum		150.00	171.926.100,00
4.3.21.98	Pengumpulan, Verifikasi dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengisi data SIPD	Wilayah Kabupaten Madiun	30.00	145.910.021,00	Dana Alokasi Umum		30.00	144.575.986,77
4.3.21.99	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Kab. Madiun	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Kab. Madiun	Wilayah Kabupaten Madiun	4.00	182.676.503,00	Dana Alokasi Umum		4.00	131.463.461,43
4.3.26	Program Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase capaian kinerja program di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		80.00	2.207.633.243,00			85.00	1.871.660.729,41
		Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100.00				100.00	
		Prosentase usulan Musrenbang yang terokomodir dalam RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		50.00				50.00	
4.3.26.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Pertanian	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Pertanian	Kosong	2.00	475.275.368,00	Dana Alokasi Umum		2.00	183.579.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3.26.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan PU, Perhubungan dan Penataan Ruang	Penyusunan Dokumen Perencanaan PU, Perhubungan dan Penataan Ruang	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	529.564.500,00	Dana Alokasi Umum		2.00	742.298.287,91
4.3.26.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kominfo	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kominfo	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	640.919.475,00	Dana Alokasi Umum		2.00	357.153.736,50
4.3.27	Program Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	Persentase capaian kinerja program di Bidang Ekonomi dan SDA		80.00	460.902.049,00			85.00	444.619.935,84
		Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD di Bidang Ekonomi dan SDA		100.00				100.00	
		Prosentase usulan Musrenbang yang terokomodir dalam RKPD di Bidang Ekonomi dan SDA		50.00				50.00	
4.3.27.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	94.129.374,00	Dana Alokasi Umum		2.00	96.011.961,48
4.3.27.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Pariwisata	penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan pariwisata	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	93.641.818,00	Dana Alokasi Umum		2.00	70.014.500,36
4.3.27.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pertanian, Pangan dan LH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pertanian, Pangan dan LH	Wilayah Kabupaten Madiun	5.00	273.130.857,00	Dana Alokasi Umum		5.00	278.593.474,00
4.3.28	Program Perencanaan Bidang Sosbud dan Penmas	persentase informasi/laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti		80.00	794.659.200,00				650.231.506,89
		Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik		100.00					
		Jumlah sekolah yang di bina		50.00					
4.3.28.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	Wilayah Kabupaten Madiun	3.00	304.896.317,00	Dana Alokasi Umum		3.00	259.994.243,85

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3.28.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	190.001.356,00	Dana Alokasi Umum		2.00	135.480.504,99
4.3.28.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	299.761.527,00	Dana Alokasi Umum		2.00	254.756.758,05
4.7	Penelitian dan Pengembangan				887.275.672,00				879.163.437,78
4.7.21	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan		100.00	887.275.672,00			100.00	879.163.437,78
4.7.21.14	Optimalisasi Hasil Kelitbangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Optimalisasi Hasil Kelitbangan Bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah	Wilayah Kabupaten Madiun	3.00	240.262.785,00	Dana Alokasi Umum		3.00	238.066.096,68
4.7.21.15	Optimalisasi Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA, SOSBUD, PEN MAS	Optimalisasi Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA, SOSBUD, PEN MAS	Wilayah Kabupaten Madiun	3.00	400.758.960,00	Dana Alokasi Umum		3.00	397.094.878,08
4.7.21.16	Inovasi Dan Penerbitan Hasil - Hasil Kelitbangan	Inovasi Dan Penerbitan Hasil-Hasil Kelitbangan	Wilayah Kabupaten Madiun	16.00	246.253.927,00	Dana Alokasi Umum		16.00	244.002.463,02

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.4.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				2.002.196.177.750.559,00				2.255.565.586.677,76
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.4	Keuangan				2.002.196.177.750.559,00				2.255.565.586.677,76
4.4.0	Non Program	-		100.00	1.372.582.729.000,00			0.00	1.428.035.071.251,60
4.4.0.0	Non Kegiatan	-	Kosong	100.00	1.372.582.729.000,00	Dana Alokasi Umum		0.00	1.428.035.071.251,60
4.4.0	Non Program				5.863.694.360,00				7.363.694.560,00
4.4.0	Non Program	-		100.00	2.000.356.122.502.063,00			0.00	379.431.824.224,00
4.4.0.0	Non Kegiatan	-	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	2.000.356.122.502.063,00	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		0.00	379.431.824.224,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.0	Non Program				403.379.270.040,00				377.361.622.640,00
4.4.0	Non Program	-		100.00	14.521.165.336,00			0.00	16.011.435.397,00
4.4.0.0	Non Kegiatan	-	Kosong	100.00	14.521.165.336,00	Pendapatan Asli Daerah		0.00	16.011.435.397,00
4.4.0	Non Program				28.926.169.360,00				30.322.613.931,00
4.4.0	Non Program				8.235.000.000,00				10.235.000.000,00
4.4.0	Non Program				515.000.000,00				1.515.000.000,00
4.4.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah		100.00	2.521.038.800,00			100.00	2.246.192.659,36
4.4.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	1.936.038.800,00	Dana Alokasi Umum		100.00	1.676.192.659,36
4.4.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah pejabat pengelola keuangan yang mendapatkan pembinaan	Kosong	256.00	585.000.000,00	Dana Alokasi Umum, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		256.00	570.000.000,00
		Jumlah dokumen pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Belum Ada	12.00				12.00	
4.4.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyusunan Raperda APBD dan Raperda P.APBD tepat waktu		100.00	1.291.452.950,00			100.00	1.447.691.349,00
4.4.17.105	Perencanaan Anggaran	Jumlah pelaksanaan pendampingan E-Budgeting dalam penyusunan APBD dan Perubahan dan jumlah dokumen standart biaya penunjang dan ASB	Kosong	80.00	774.907.750,00	Dana Alokasi Umum, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		100.00	1.130.647.220,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.17.106	Penyusunan Anggaran	Jumlah buku Raperda, Perda dan Penjabaran APBD dan Perubahan	Kosong	480.00	374.630.200,00	Dana Alokasi Umum		100.00	263.910.600,00
4.4.17.107	Pengendalian Anggaran	Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi DPA	Kosong	256.00	141.915.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	53.133.529,00
4.4.19	Program Penatausahaan Aset dan Akuntansi	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAP		100.00	1.244.740.500,00			100.00	1.029.050.547,20
		Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah		100.00				100.00	
4.4.19.62	Inventarisasi dan Penghapusan Aset	Jumlah dokumen inventarisasi dan penghapusan aset	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	364.941.800,00	Dana Alokasi Umum		100.00	278.435.500,00
4.4.19.63	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	Jumlah buku SSH yang tepat waktu dan jumlah laporan penggunaan dan pemanfaatan BMD	Wilayah Kabupaten Madiun	85.00	521.705.700,00	Dana Alokasi Umum, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		100.00	433.125.000,00
4.4.19.64	Akutansi dan Laporan Keuangan	Jumlah laporan prognosis dan realisasi APBD	Wilayah Kabupaten Madiun	240.00	358.093.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	317.490.047,20
4.4.23	Program Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pencairan sesuai ketentuan		100.00	974.988.150,00			100.00	566.390.118,60
4.4.23.4	Penatausahaan penerbitan SP2D	-	Wilayah Kabupaten Madiun	12500.00	171.988.400,00	Dana Alokasi Umum		0.00	78.750.000,00
4.4.23.5	Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah, SPD dan DTH/RTH	Laporan alokasi dana transfer ke daerah, SPD, dan DTH/RTH tepat waktu	Wilayah Kabupaten Madiun	4.00	623.999.750,00	Dana Alokasi Umum		100.00	352.973.618,60

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.23.6	Rekonsiliasi Pengelolaan Gaji PNS	Rekonsiliasi Pengelolaan Gaji PNS	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	179.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	134.666.500,00

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Jalan Alun - Alun Utara 1-3 Caruban

No Telp : (0351) 4487000 No Faks : (0351) 4487000 email : setda@madiunkab.go.id

Tabel T-C.33.**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KABUPATEN MADIUN**

Nama Perangkat Daerah : 4.4.2 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				3.870.380.414,00				3.755.474.191,38
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.4	Keuangan				3.870.380.414,00				3.755.474.191,38
4.4.8	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah		75.00	1.595.995.187,00			80.00	1.228.267.318,78
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81.00				83.00	
4.4.8.1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang layak fungsi	Wilayah Kabupaten Madiun	100.00	1.585.995.187,00	Dana Alokasi Umum		100.00	1.213.267.318,78
		Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Belum Ada	13.00				13.00	
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	Belum Ada	1.00				1.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.8.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Wilayah Kabupaten Madiun	18.00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum		18.00	15.000.000,00
4.4.10	Program Pengembangan dan Penetapan Pendapatan	Jumlah ketetapan pajak yang telah ditetapkan		421000.00	466.235.250,00			421500.00	444.516.986,00
		Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan		89.00				93.00	
		Persentase peningkatan target pajak daerah		10.61				12.00	
4.4.10.3	Penilaian Obyek Khusus dan Pemutakhiran Data PBB-P2	Jumlah desa yang dilaksanakan pemutakhiran	Wilayah Kabupaten Madiun	2.00	65.193.000,00	Pendapatan Asli Daerah		2.00	27.149.486,00
4.4.10.5	Pengelolaan BPHTB	Jumlah Validasi BPHTB yang sudah terselesaikan	Wilayah Kabupaten Madiun	3000.00	43.901.150,00	Pendapatan Asli Daerah		3000.00	41.367.500,00
4.4.10.16	Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah peningkatan target pajak daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	0.50	102.139.100,00	Pendapatan Asli Daerah		0.50	100.000.000,00
4.4.10.17	Pendataan dan Penyelenggaraan penetapan pajak daerah	Jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak	Wilayah Kabupaten Madiun	410000.00	255.002.000,00	Pendapatan Asli Daerah		410000.00	276.000.000,00
		Jumlah dokumen pendataan obyek PAD	Belum Ada	1.00				1.00	
4.4.21	Program Penatausahaan, Verifikasi dan Penagihan Pendapatan	Jumlah laporan pendapatan asli daerah yang tertib administrasi		1.00	1.808.149.977,00			1.00	2.082.689.886,60
		Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi		1250.00				1275.00	
		Persentase realisasi PAD tahun berkenaan		100.00				100.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.21.37	Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan PBB Dan PAD	Jumlah sarana pemungutan PAD yang tercetak	Wilayah Kabupaten Madiun	24.00	436.376.500,00	Pendapatan Asli Daerah		24.00	415.000.000,00
		Jumlah rekonsiliasi dan evaluasi yang dilaksanakan	Belum Ada	2.00				2.00	
4.4.21.40	Penagihan dan monitoring PBB-2	jumlah pelunasan SPPT PBB P2	Wilayah Kabupaten Madiun	342350.00	1.359.750.000,00	Pendapatan Asli Daerah		342350.00	1.640.000.000,00
		Jumlah SPPT PBB P2 yang terdistribusi	Belum Ada	410000.00				410000.00	
		jumlah desa yang telah melunasi PBB	Belum Ada	50.00				85.00	
4.4.21.41	Verifikasi piutang dan pelayanan wajib pajak	Jumlah dokumen verifikasi piutang	Wilayah Kabupaten Madiun	1.00	12.023.477,00	Pendapatan Asli Daerah		1.00	27.689.886,60
		jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi	Belum Ada	1250.00				1250.00	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dipedomani pada RKPD Tahun 2020.

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai ukuran capaian pembangunan daerah secara makro pada periode perencanaan tertentu. Adapun IKU Kabupaten Madiun Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Madiun Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Target 2020
1	2	3
1	Persentase Penduduk Miskin	8
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,66
3	Persentase desa/kelurahan Cepat Berkembang	51
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	< 0,22
5	Persentase silat dilestarikan disetiap desa	100
6	Nilai PDRB	20
7	Indeks Pendidikan	0,64
8	Indeks Kesehatan	0,79
9	Indeks Keamanan Manusia	A
10	Indeks Ketertiban Umum	85
11	Indeks Kualitas Air	56,25
12	Indeks Kualitas Udara	85,20
13	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	90,32
14	Persentase Jalan Yang Berkeselamatan	60
15	Nilai Investasi (Penanaman Modal Dalam Negeri)	500
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
17	Indeks Layanan Keagamaan	79,70
18	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	A
20	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Target 2020
1	2	3
21	Opini Atas Audit BPK	WTP
22	Indeks Profesional ASN	Sedang
23	Persentase Jalan dan jembatan Kondisi Mantap	67,66
24	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	77,31
25	Nilai Inflasi	< 2,65

Sumber : RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja Kunci pada RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Madiun

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2020
1	2	3
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
A	Urusan Wajib	
1	Terkait Pelayanan Dasar	
a	Sosial	
a.1	<i>Persentase Penduduk Miskin</i>	8
a.1.1	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	89,16
		324.522
a.1.2	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	89,16
		324.522
2	Tidak Terkait Pelayanan Dasar	
a	Tenaga kerja	
a.1	<i>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</i>	2,66
a.1.1	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	73
a.1.2	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	68
b	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
b.1	<i>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</i>	69,74
b.1.1	Persentase Perempuan yang Berpartisipasi Dalam Ekonomi	51,7
c	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2020
1	2	3
c.1	<i>Persentase desa/kelurahan Cepat Berkembang</i>	51
		105
c.1.1	Persentase BUMDES yang aktif	24
c.1.2	Persentase lembaga ekonomi yang aktif	44
d	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
d.1	<i>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</i>	< 0,22
d.1.1	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76,9
e	Kebudayaan	
e.1	<i>Persentase silat dilestarikan disetiap desa</i>	100
e.1.1	Persentase budaya daerah yang dikembangkan	42,99
e.1.2	Persentase benda situs cagar budaya yang dikembangkan	3,86
3	Urusan Fungsi Penunjang	
a	Administrasi Pemerintahan	
a.1	<i>Nilai PDRB</i>	20
II	ASPEK PELAYANAN UMUM	
A	Urusan Wajib	
1	Terkait Pelayanan Dasar	
a	Pendidikan	
a.1	<i>Indeks Pendidikan</i>	0,64
a.1.1	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	96,81
a.1.2	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK dan MA	93,23
a.1.3	Angka Kelulusan Paket A/B/C	100
a.1.4	Rasio Tenaga Pendidik Karakter Keagamaan dengan Jumlah Kelas	1:3
b	Kesehatan	
b.1	<i>Indeks Kesehatan</i>	0,79
b.1.1	Prevalensi Balita Stunting	20,3
b.1.2	Angka Kematian Ibu	0
b.1.3	Angka Kematian Bayi	0
b.1.4	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	79
b.1.5	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	60
c	Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	
c.1	<i>Indeks Keamanan Manusia</i>	A
c.1.1	Persentase Potensi gangguan/konflik yang teratasi	100
c.1.2	Persentase informasi/laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti	100
c.2	<i>Indeks Ketertiban Umum</i>	85

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2020
1	2	3
c.2.1	Persentase kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	70
2	Tidak Terkait Pelayanan Dasar	
a	Lingkungan hidup	
a.1	<i>Indeks Kualitas Air</i>	56,25
a.2	<i>Indeks Kualitas Udara</i>	85,20
a.3	<i>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</i>	90,32
a.1.1	Persentase Pelaku Usaha dan Kegiatan yang menerapkan dokumen Lingkungan	36,36
b	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
b.1.1	Persentase penduduk yang sudah memiliki kartu identitas	83,5
c	Perhubungan	
c.1	<i>Persentase Jalan Yang Berkeselamatan</i>	60
c.1.1	Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan	65
d	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	
d.1.1	Persentase peningkatan industri kecil dan menengah	3,1
		1.001
d.1.2	Jumlah usaha mikro	128.140
e	Penanaman modal	
e.1	<i>Nilai Investasi (Penanaman Modal Dalam Negeri)</i>	500
e.1.1	Jumlah investor skala menengah dan besar yang berinvestasi di Kabupaten Madiun	100
e.1.2	Persentase masyarakat yang puas terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	75
3	Urusan Fungsi Penunjang	
a	Administrasi Pemerintahan	
a.1	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	Baik
a.1.1	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	89,35
a.2	<i>Indeks Layanan Keagamaan</i>	79,70
a.2.1	Indeks Kehidupan Beragama	75,5
b	Pengawasan	
b.1	<i>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)</i>	A
b.1.1	Nilai SAKIP OPD	A
b.2	<i>Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</i>	Level 3
b.2.1	Persentase OPD yang melaksanakan penerapan SPIP sesuai dengan peraturan yang berlaku	57,5
c	Perencanaan	

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2020
1	2	3
c.1.1	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	100
c.1.2	Persentase capaian kinerja program	80
c.1.3	Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	50
d	Keuangan	
d.1	<i>Opini Atas Audit BPK</i>	WTP
d.1.1	Persentase OPD yg tertib tata kelola barang milik daerah	100
d.1.2	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	100
e	Kepegawaian	
e.1	<i>Indeks Profesional ASN</i>	Sedang
e.1.1	Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi	85
e.1.2	Persentase pelayanan kepangkatan yang tepat waktu	97
e.1.3	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	97
e.1.4	Persentase pembaruan data kepegawaian	89
e.1.5	Persentase ASN yang memiliki capaian kinerja lebih dari 75	98
e.1.6	Jumlah dokumen penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai tepat waktu	1
e.1.7	ASN yang mengikuti uji kompetensi	200
e.1.8	ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	140
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH	
A	Urusan Wajib	
1	Terkait Pelayanan Dasar	
a	Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
a.1	<i>Persentase Jalan dan jembatan Kondisi Mantap</i>	67,66
		585,62
a.1.1	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kondisi Baik	68,65
		510,10
a.1.2	Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik	61,65
		75,52
b.1	<i>Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik (%)</i>	77,31
		734.978
B	Urusan Pilihan	
a	Pertanian	
a.1.1	Jumlah produksi tanaman pangan (padi)	552.922,44
a.1.2	Jumlah Produksi tanaman perkebunan (kakao)	955,09
b	Pariwisata	
b.1.1	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	13
c	Perdagangan	
c.1.1	Persentase Subsidi Harga	10

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2020
1	2	3
c.1.2	Jumlah pedagang formal	naik 1
C	Urusan Fungsi Penunjang	
a	Administrasi Pemerintahan	
a.1	<i>Nilai Inflasi</i>	< 2,65
a.1.1	Jumlah intervensi penanganan inflasi	2

BAB VII

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2020, selain itu RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020;
- b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Madiun Tahun 2020
- c. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun 2020;
- d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Bilamana pada pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020 menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Madiun, Juni 2019

BUPATI MADIUN

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO